



LAPORAN KINERJA INTERIM

BALAI POM DI BALIKPAPAN

**TRIWULAN II
TAHUN
2026**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Balaipom.balikpapan@gmail.com

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Balai POM di Balikpapan dapat menjalankan amanah pengawasan Obat dan Makanan dengan baik pada Triwulan II Tahun 2026. Periode ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian kinerja, mengidentifikasi tantangan, serta memperkuat langkah perbaikan dalam rangka pencapaian target kinerja Tahun 2026.

Melalui Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026, kami berupaya menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerja Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dalam meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesehatan publik dan mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, Balai POM di Balikpapan terus berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas dan profesional.

Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada seluruh mitra kerja, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Semoga laporan ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi dan mempercepat pencapaian target kinerja di triwulan berikutnya.

Balikpapan, 20 Juli 2026
Kepala Balai POM di Balikpapan



Gerson Pararak, S.Si., Apt., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
RINGKASAN EKSLUSIF	5
HIGHLIGHT	8
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	16
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	17
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	20
1.4 ISU STRATEGIS.....	21
1.5 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	22
1.6 ISU STRATEGIS	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA	35
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	41
2.3 PERJANJIAN KINERJA	44
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	48
2.5 METODE PENGUKURAN	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	57
3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI.....	183
3.3 REALISASI ANGGARAN	190
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN	202
4.2 SARAN	202
LAMPIRAN	204

RINGKASAN EKSKLUSIF

Berdasarkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 menjelaskan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal per triwulan, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja pada triwulan berikutnya dan menjadi penyempurna dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Balikpapan Tahun 2026 ini menjadi gambaran capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 yang diukur berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Balikpapan Tahun 2026 dengan total sebanyak 27 Indikator Kinerja Kegiatan. Keberhasilan Program yang dicapai terangkum dalam 7 Sasaran Strategis. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Balikpapan Tahun 2025–2029 yang kemudian dirinci dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang dilakukan dari 7 Sasaran Kegiatan, berikut dapat terlihat capaian setiap sasaran strategis yang dimiliki oleh Balai POM di Balikpapan pada periode Triwulan II Tahun 2026:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 101,32% dengan kriteria **Sangat Baik**
 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO (Penilaian pada akhir tahun)
 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 105,45% dengan kriteria **Sangat Baik**
 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT sebesar 0% (Tidak ada kasus KLB)
 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 110,00% dengan kriteria **Sangat Baik**

RINGKASAN EKSKLUSIF

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 85,52 % dengan kriteria **Cukup**
 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 107,99% dengan kriteria **Sangat Baik**
 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 102,56% dengan kriteria **Sangat Baik**
 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 96,29% dengan kriteria **Baik**
 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 105,74 % dengan kriteria **Sangat Baik**
 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT (Penilaian pada akhir tahun)
 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 109,86 % dengan kriteria **Sangat Baik**
 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (Penilaian pada akhir tahun)
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan pangan olahan sebesar 93,80 % dengan kriteria **Baik**
 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Jumlah desa pangan aman sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
- Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan sebesar 110,00 % dengan kriteria **Sangat Baik**

RINGKASAN EKSKLUSIF

4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT (Belum ada target TW II)
5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 100,00 % dengan kriteria **Baik**
6. Layanan Publik UPT yang prima di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - Indeks Pelayanan Publik UPT (Penilaian pada akhir tahun)
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Balikpapan yang optimal diperoleh capaian indikator kinerja sebagai berikut :
 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Penilaian pada akhir tahun)
 - Nilai AKIP UPT (Penilaian pada akhir tahun)
 - Nilai Kinerja Anggaran UPT (Penilaian pada akhir tahun)
 - Indeks Manajemen Risiko UPT (Penilaian pada akhir tahun)

Adapun hasil capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Balai POM di Balikpapan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,82 % dengan predikat kinerja organisasi "Istimewa".

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Kegiatan serta membiayai kegiatan lainnya, pada DIPA Revisi TA. 2026, Balai POM di Balikpapan memperoleh anggaran sebesar Rp 3,290,614,000 dengan realisasi penggunaan anggaran Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp 1,754,658,062,- sehingga pencapaian Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 53.32%.

HIGHLIGHT KEGIATAN BALAI POM DI BALIKPAPAN TRIWULAN II TAHUN 2026

GENCAR AWASI SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN SEPANJANG BULAN MARET- JUNI 2026



Sepanjang bulan Maret - Juni 2026, Balai POM di Balikpapan telah melaksanakan kegiatan Pengawasan di Sarana Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan. Kegiatan ini merupakan salah satu target Balai POM di Balikpapan untuk memastikan bahwa peredaran produk dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dimana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Fokus pengawasan meliputi kondisi kemasan, izin edar, kedaluwarsa, dan kondisi sarana distribusi maupun produksi melalui pengamatan lapangan dan wawancara pelaku usaha. Hasilnya, ditemukan produk Obat Bahan Alam (OBA) yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

HADIRKAN BOOTH LAYANAN KONSULTASI DI FESTIVAL KEMUDAHAN DAN PELINDUNGAN USAHA MIKRO



Balai POM di Balikpapan hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Kementerian UMKM RI pada Rabu, 17 Juni 2026, di BSCC Dome Balikpapan.

Mengusung tema "UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi", partisipasi ini diwujudkan melalui penyediaan booth layanan khusus bagi para pelaku usaha yang hadir. Selama kegiatan berlangsung, petugas Balai POM Balikpapan memberikan layanan konsultasi langsung, pendampingan proses sertifikasi, serta edukasi mengenai obat dan makanan aman.

Kehadiran booth ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi pelaku usaha UMK guna mempercepat pengurusan izin edar, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Balai POM di Balikpapan dalam mendorong daya saing produk lokal agar mampu tumbuh inovatif, aman, dan legal di pasar nasional.

KAWAL PANGAN AMAN DI PASAR SEGAR SEPAKU



Dalam rangka mendukung terwujudnya pasar yang menyediakan pangan aman bagi masyarakat, Balai POM di Balikpapan bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Sosialisasi Keamanan Pangan melalui Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di Pasar Segar Sepaku, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan diawali dengan penyampaian edukasi kepada pedagang dan pengunjung pasar melalui pembagian leaflet serta pemasangan poster yang memuat informasi mengenai bahaya penggunaan bahan berbahaya pada pangan, pentingnya penggunaan bahan tambahan pangan sesuai ketentuan, serta cara memilih pangan yang aman dan layak dikonsumsi melalui Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) dan aplikasi BPOM Mobile.

Melalui kegiatan ini, Balai POM di Balikpapan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan guna mewujudkan pasar yang menyediakan pangan aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan.

FESTIVAL UMKM SINERGI MENDORONG UMKM NAIK KELAS



Kepala Balai POM di Balikpapan, Bapak Gerson Pararak hadir dan berpartisipasi aktif sebagai narasumber dalam kegiatan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (UMKM RI), Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang bertempat di BSCC Dome Balikpapan ini mengusung tema "UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi" dan diikuti oleh ribuan pelaku UMKM secara antusias.

Dalam sesi pemaparan materi, Gerson Pararak mengupas tuntas mengenai regulasi dan tata cara memperoleh Izin Edar BPOM. Langkah ini merupakan bentuk komitmen nyata Balai POM di Balikpapan dalam memberikan pendampingan, kemudahan, serta kepastian hukum bagi para pelaku UMKM di bidang obat dan makanan.

Melalui edukasi ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing dan mutu produknya, sehingga tidak hanya mampu berinovasi, tetapi juga menjamin keamanan konsumen. Sinergi ini menjadi momentum penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang legal dan berkelanjutan.

MONEV PROGRAM DESA PANGAN AMAN DI KELURAHAN PEMALUAN



Balai POM di Balikpapan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Desa Pangan Aman di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Kamis, 18 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 15 peserta yang terdiri dari Tim Keamanan Pangan Desa (KPD) serta lintas sektor terkait yang berperan dalam pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di Kelurahan Pemaluan.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meninjau perkembangan pelaksanaan Program Desa Pangan Aman sekaligus memastikan keberlanjutan program yang telah dijalankan selama tahun 2026.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Program Desa Pangan Aman di Kelurahan Pemaluan dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

BALAI POM DI BALIKPAPAN GELAR VAKSINASI HPV DOSIS 2



Balai POM di Balikpapan kembali melaksanakan Gerakan Sejuta Vaksin HPV melalui pemberian vaksin hpv dosis kedua kepada ASN dan Masyarakat pada hari Selasa, 2 Juni 2026 di Aula Gedung Parkir Klandasan.

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari vaksinasi tahap pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 April 2026 dan diikuti kurang lebih 400 peserta yang terbagi menjadi 2 sesi. Peserta yang hadir merupakan ASN dan Masyarakat yang telah menerima dosis pertama dan berkomitmen menyelesaikan rangkaian vaksinasi sesuai jadwal untuk mendapatkan manfaat perlindungan yang optimal.

Melalui kegiatan ini, Balai POM di Balikpapan turut mendukung upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kanker serviks melalui vaksinasi hpv. Partisipasi ASN dan Masyarakat dalam program ini menjadi bentuk kepedulian bersama untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga

KOLABORASI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA BERSAMA POLDA KALTIM



Kepala Balai POM di Balikpapan Gerson Pararak bersama Kepala Balai Besar POM di Samarinda Agung Kurniawan hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Konferensi Pers Pengungkapan Kasus dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba yang diselenggarakan oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Timur pada Selasa, 26 Mei 2026 di Gedung Mahakam Polda Kaltim.

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantor menyampaikan hasil pengungkapan empat kasus tindak pidana narkoba dengan total enam tersangka yang terdiri atas 2 warga negara Belanda, 1 warga negara Malaysia, pelaku home industri sabu di Balikpapan, serta 2 tersangka yang tergabung dalam jaringan peredaran etomidate asal Samarinda. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, Bea Cukai Balikpapan, Kejaksaan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Balikpapan, serta rekan-rekan media pers.

Pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba di Kalimantan Timur kali ini menggunakan mobil insinerator milik Balai Besar POM di Samarinda. Pemanfaatan fasilitas tersebut menjadi bentuk dukungan BPOM dalam memastikan barang bukti dimusnahkan secara aman, efektif, dan sesuai prosedur sehingga tidak berpotensi disalahgunakan kembali.

AUDIENSI BERSAMA POLDA KALTIM



Pada hari Selasa, 26 Mei 2026, Kepala Balai POM di Balikpapan Gerson Pararak bersama Kepala Balai Besar POM di Samarinda Agung Kurniawan melaksanakan audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro sebagai upaya memperkuat sinergi dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Pertemuan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun koordinasi yang semakin erat antara BPOM dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan di wilayah Kalimantan Timur.

Selain mempererat silaturahmi antarinstansi, audiensi ini juga menjadi wadah untuk menyamakan pandangan dan memperkuat komitmen dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Kapolda Kalimantan Timur turut menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang telah dibangun bersama BPOM selama ini.

Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan kerja yang telah terjalin selama ini dapat semakin kuat dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama, BPOM dan Polda Kalimantan Timur terus berupaya menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta mendukung terciptanya peredaran obat dan makanan yang aman di Kalimantan Timur.

SOSIALISASI KEAMANAN PANGAN DI SEKOLAH



Balai POM di Balikpapan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Komunitas Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada Rabu, 29 April 2026. Berlokasi di Ruang Rapat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU. Kegiatan ini diikuti oleh 12 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan perwakilan murid dari berbagai satuan pendidikan di kab. PPU.

Dalam kegiatan tersebut, Balai POM di Balikpapan menekankan pentingnya perlindungan konsumen dan pemahaman keamanan pangan sejak dini. Peserta diberikan edukasi mendalam mengenai penerapan prinsip Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) untuk menghindari produk pangan yang tidak layak atau mengandung bahan berbahaya, cara mengenal dan memilih pangan aman dengan 5 Kunci Keamanan Pangan, cara membaca Informasi Nilai Gizi (ING), dan pentingnya keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat bertindak sebagai agent of change dalam menyebarkan informasi keamanan pangan di lingkungan sekolah masing-masing, guna mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, sehat, dan bermutu.

KOLABORASI MEWUJUDKAN PANGAN AMAN DAN BIROKRASI BERINTEGRITAS



Balai POM di Balikpapan melaksanakan kegiatan Advokasi Terpadu Program Nasional dan Kabupaten/Kota Pangan Aman, Forum Konsultasi Publik, serta Pencanangan Zona Integritas Tahun 2026 pada Selasa, 28 April 2026, bertempat di Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU). Kegiatan yang digelar secara hybrid ini diikuti oleh 28 peserta secara tatap muka dan 29 peserta secara daring melalui Zoom Meeting.

Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Balai POM di Balikpapan, Gerson Pararak, S.Si., Apt., M.H., Bupati Penajam Paser Utara, H. Mudyat Noor, S.Hut., Sekretaris Daerah, Drs. H. Tohar, M.M, serta perwakilan dari berbagai instansi terkait. Kehadiran pimpinan daerah dan stakeholder ini mencerminkan dukungan nyata terhadap implementasi program nasional di bidang obat dan makanan serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, Balai POM di Balikpapan terus mendorong terwujudnya ekosistem pangan aman berbasis kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen, sekaligus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik demi perlindungan masyarakat yang lebih optimal.

BEKALI MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN ITK PAHAMI LABEL PANGAN OLAHAN



Balai POM di Balikpapan hadir sebagai narasumber pada kegiatan Flavor 5.0 (Festival of Learning, Vision, Open Talk, and Reflection) yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknologi Pangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dalam rangka Dies Natalis ke-5, pada hari Sabtu, 11 April 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan di kampus ITK dan dihadiri sekitar 50 peserta dari dosen dan mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan. Dalam kegiatan ini, Kasubbag Tata Usaha Balai POM di Balikpapan Denisa Ayu Fitriarsi menyampaikan materi terkait Label Pangan Olahan sesuai tema “Labelling Matters: What Every Student Entrepreneur Needs to Know”. Materi ini diberikan kepada peserta untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencantuman label yang sesuai ketentuan pada produk pangan olahan.

Paparan difokuskan pada aspek apa saja yang wajib dicantumkan dalam label, seperti nama produk, komposisi, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar, serta informasi nilai gizi. Selain itu, dijelaskan pula mengapa label menjadi hal penting, tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai sarana informasi dan perlindungan bagi konsumen.

INSPEKSI SARANA PRODUKSI SPPG UNTUK MEMASTIKAN PANGAN AMAN DAN HIGIENIS



Program Makan Bergizi Gratis (MGB) dirancang untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat. Namun di balik setiap makanan yang disajikan, ada proses produksi yang harus dipastikan aman, higienis, dan memenuhi standar keamanan pangan. Untuk itu, Balai POM di Balikpapan melaksanakan inspeksi sarana produksi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan proses pengolahan makanan dalam program ini telah memenuhi standar keamanan pangan, higiene, dan sanitasi, Jumat (13/3/2026).

Dalam inspeksi ini, Balai POM di Balikpapan melakukan peninjauan langsung terhadap berbagai aspek penting dalam proses produksi pangan. Pemeriksaan meliputi kondisi bangunan dan fasilitas produksi, kebersihan lingkungan pengolahan, kelayakan peralatan yang digunakan, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga penyajian dan distribusi pangan.

MOBILKU CEPAT AWASI TAKJIL RAMADHAN



Takjil yang kita beli saat berbuka puasa terlihat menarik dan menggugah selera. Tapi, apakah sudah dipastikan aman untuk dikonsumsi? 🤔

Untuk menjawab hal tersebut, Kepala Balai POM di Balikpapan Gerson Pararak turun secara langsung meninjau jajanan takjil pada Pasar Ramadan di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota melalui inovasi Mobilku Cepat (Mobil Laboratorium Keliling Uji Cepat Pangan dan Kosmetik, Jumat (13/3/2026).

Petugas melakukan pengambilan sampel dan uji cepat langsung di lokasi terhadap berbagai jajanan takjil yang dijual oleh pedagang. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tes kit untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya yang dilarang dalam pangan, seperti Boraks, Formalin, Rhodamin B, dan Methanil Yellow. Dari sampel yang diuji tidak ditemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya.

BPOM BALIKPAPAN TINJAU SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG)



Kepala Balai POM di Balikpapan Gerson Pararak melaksanakan kegiatan peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah Balikpapan Tengah dan Balikpapan Selatan, Senin (9/3/2026)

Dalam kegiatan peninjauan tersebut, tim Balai POM di Balikpapan melakukan pemantauan secara langsung terhadap berbagai aspek penting dalam pengelolaan pangan, mulai dari kondisi sarana dan prasarana dapur pengolahan, kebersihan lingkungan, kelayakan peralatan yang digunakan, hingga penerapan praktik higiene oleh para penjamah pangan.

Balai POM di Balikpapan juga memberikan edukasi dan penguatan kepada pengelola serta penjamah pangan terkait pentingnya penerapan praktik pengolahan pangan yang baik, menjaga kebersihan personal, serta melakukan pengendalian terhadap potensi risiko kontaminasi pangan. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengelola dalam menjaga kualitas pangan yang disajikan.

INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN JELANG RAMADAN DAN IDULFITRI 1447 H



Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 H, Balai POM di Balikpapan bersama Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan di sejumlah sarana distribusi dan penjualan pangan di Kota Balikpapan, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Agus Budi selaku Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Balikpapan, Asisten III Pemerintah Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Alwiati, beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Balikpapan. Sarana diperiksa dengan melakukan pengamatan lapangan dan wawancara pelaku usaha. Intensifikasi dilakukan dengan berfokus pada pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), Kedaluwarsa, dan Rusak.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan keamanan dan mutu produk pangan khususnya pada parcel lebaran yang ada di Kota Balikpapan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, disebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut sebagai BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang dimaksud dengan obat dan makanan dalam peraturan tersebut mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pimpinan tertinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sangat menentukan pencapaian tujuan bidang kesehatan nasional. Pengawasan obat dan makanan memiliki karakteristik khusus karena kebijakan ditetapkan secara terpusat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Balai di seluruh Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan, sebab tindakan yang diambil harus konsisten dan selaras dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pengawasan menjadi efektif dan efisien. Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPOM perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas dan terstruktur. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan digital dan basis data terintegrasi, menjadi instrumen penting dalam memastikan konsistensi, transparansi, dan

akuntabilitas pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, BPOM dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan obat serta makanan yang beredar di masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. Perencanaan Jangka Panjang (PJP) POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. BPOM utamanya mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang keempat yakni “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 19 tahun

2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Badan POM memiliki 83 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 26 Balai Besar POM, 37 Balai POM, dan 20 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, dalam pasal 4 dijelaskan fungsi yang diselenggarakan oleh UPT BPOM yaitu :

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Balai POM di Balikpapan merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Balikpapan memiliki lingkup pengawasan di 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun

2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebagai berikut:

a) Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM/Balai POM/Loka POM disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Wilayah Kerja Balai POM di Balikpapan mengawasi tiga wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dengan Struktur Organisasi berikut ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Balikpapan

Balai POM di Balikpapan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan menggunakan test kit, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.4. Isu Strategis

Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategis Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan sistem pengawasan mulai dari pre-market hingga post-market yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Balai POM di Balikpapan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari BPOM dalam melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2025-2029. Dalam kegiatan operasionalnya terdapat 4 (empat) kegiatan utama yang dilakukan Balai POM di Balikpapan dalam melaksanakan pengawasan, antara lain:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kota Balikpapan
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kota Balikpapan, Paser dan Penajam Paser Utara.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1. Internal

1.5.1.1. Sumber Daya Manusia

Pada awal tahun 2026 jumlah pegawai Balai POM di Balikpapan berjumlah 13 orang PNS aktif, 3 orang PPPK dan 8 orang *outsourcing* yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan. Kemudian per Juni 2025 masuk 6 pegawai CPNS, maka jumlah PNS/PPPK aktif menjadi 22 orang.

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Balai POM di Balikpapan Tahun 2026

No.	Fungsi	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Kasubag Tata Usaha	1
2.	Tata Usaha	7
3.	Pengujian	3
4.	Pemeriksaan	6
5.	Penindakan	2
6.	Infokom	2
Jumlah		22

Tabel 1.2 Seluruh Pegawai Balai POM di Balikpapan Tahun 2026

No	Pegawai	Jumlah
1.	PNS	19
2.	PPPK	3
3.	Sopir	1
4.	Satpam	3
5.	Tenaga Kebersihan	1
6.	Tenaga Administrasi	3
Jumlah		30

Selain jumlah pegawai sesuai dengan SK ASN, Balai POM di Balikpapan juga mengangkat pegawai *outsourcing* sebagai tambahan pegawai sebanyak 8 orang pegawai non teknis yang terdiri dari tenaga administrasi, satpam, sopir, dan tenaga kebersihan.

1.5.1.2. Anggaran

Mulai tahun 2021, Balai POM di Balikpapan telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja Mandiri. Anggaran Balai POM di Balikpapan bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor : SP DIPA- 063.01.2.690471/2026 yang diterbitkan pada tanggal 01 Desember 2026 sebesar Rp. 3.800.253.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).

1.5.1.3. Sarana Prasarana

Balai POM di Balikpapan berdiri di atas tanah seluas 578 m2 dengan luas bangunan 184 m2 bertempat di Gedung pinjaman eks KORPRI Jl. Telagasari No. 72 RT 37 Kota Balikpapan. Status kepemilikan tanah dan/atau bangunan adalah pinjam pakai.

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas yang memadai. Fasilitas yang diadakan oleh Balai POM di Balikpapan diantaranya adalah rumah dinas untuk Kepala Balai POM di Balikpapan dengan status kepemilikannya adalah sewa. Kendaraan operasional berupa 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) mobil jabatan dengan status sewa dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Untuk menunjang pekerjaan Balai POM di Balikpapan peralatan pengolah data seperti Laptop, PC, printer, scanner, jaringan internet dan penambahan daya listrik dari PLN yang awalnya hanya 5.500 VA dan sudah dinaikkan menjadi 10.600 VA. Sarana komunikasi yang dimiliki Balai POM di Balikpapan antara lain:

- Hotline Kantor : 0542-8793168
- Hotline ULPK : 0857 3135 0104
- Sosial Media
 - a. Instagram : @bpom.balikipapan (status aktif)
 - b. Twitter : @Bpombalikipapan (status aktif)

c. Youtube : Balai POM di Balikpapan (status aktif)

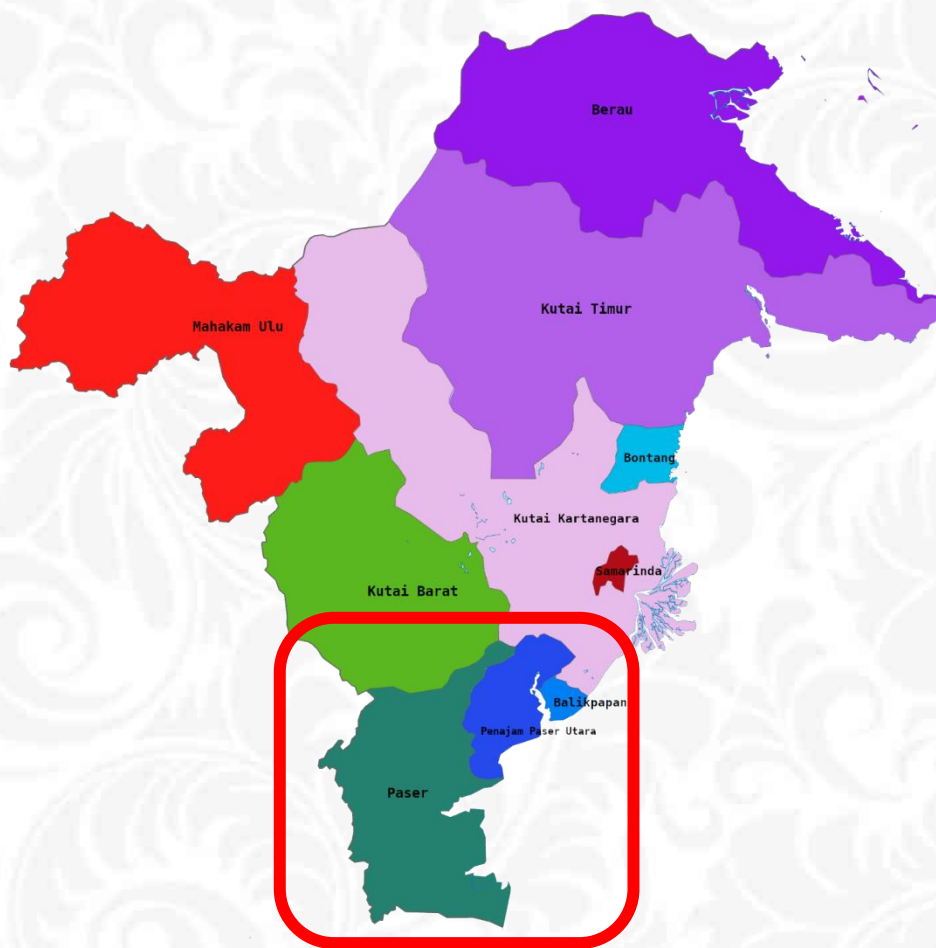
Status Kepemilikan Tanah

Kantor Balai POM di Balikpapan yang terletak di Jl. Telaga Sari No.72 RT 37 Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan memiliki status Pinjam Pakai dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk digunakan dengan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Balai POM di Balikpapan tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Balikpapan No: 032 /17/BPKD dan No: PR 07.06.153.19.0206 yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2023 dengan periode sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2028.

1.5.1.4. Eksternal

1.5.1.5. Kondisi Geografis dan Demografis

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Balikpapan memiliki wilayah kerja 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser. Dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut:



Gambar 1.1. Wilayah Pengawasan Balai POM di Balikpapan

UPT	Jumlah Kecamatan	Cakupan Kerja (Kecamatan)
Balai POM di Balikpapan	20	Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Barat, Babulu, Waru, Penajam, Sepaku, Batu Sopang, Muara Samu, Batu Engau, Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Muara Komam, Long Kali

Tabel 1.1 Cakupan Wilayah kerja Balai POM di Balikpapan

1. Luas Wilayah Kerja (km²)

a. Kota Balikpapan

Memiliki luas wilayah sebesar 511.01 km² dan jumlah penduduk sebanyak 753.532 jiwa, terdiri dari 6 Kecamatan dan 34 Kelurahan dengan kecamatan Balikpapan Barat merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan Balikpapan Tengah merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dan Luas Pengelolaan Laut 160,10 km².

b. Kabupaten Penajam Paser Utara

Memiliki luas wilayah sebesar 3.060,82 km² dan jumlah penduduk sebanyak 196.566 jiwa, terdiri dari 4 kecamatan dan 54 desa/kelurahan dengan Kecamatan Penajam merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan kecamatan Babulu merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil.

c. Kabupaten Paser

Memiliki luas wilayah sebesar 10.851,8 km² dan jumlah penduduk sebanyak 303.424 jiwa, kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang terdiri dari 139 desa dan 5 kelurahan dari jumlah desa/kelurahan tersebut, Kecamatan Long Ikis mempunyai jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu 26 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Tanjung Harapan mempunyai jumlah desa paling sedikit yaitu 7 desa, Wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 85.087 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Muara Samu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 7.770 jiwa.

2. Data Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Balikpapan

Kota	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah Darat (Km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)	(4)
Balikpapan	Balikpapan Selatan	7	38,81
	Balikpapan Kota	5	11,10
	Balikpapan Timur	4	119,16
	Balikpapan Tengah	6	10,83
	Balikpapan Barat	6	192,88
	Balikpapan Utara	6	138,24
Penajam Paser Utara	Babulu	12	399,45
	Waru	4	553,88
	Penajam	23	1.207,37
	Sepaku	15	1.172,36
Paser	Batu Sopang	9	1111,38
	Muara Samu	7	835,25
	Batu Engau	8	480,4
	Tanjung Harapan	1	1501,61
	Pasir Belengkong	1	836,62
	Tanah Grogot	1	326,95
	Kuaro	1	596,76
	Long Ikis	1	1138,37
	Muara Komam	1	1753,4
	Long Kali	1	2250,44

Tabel 1.2 Data Luas Wilayan per Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Balikpapan

1.5.1.6. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Pada tahun 2026, Balai POM di Balikpapan mencatat total sebanyak 5.468 sarana dan 120.339 jumlah murid SD yang menjadi sasaran pengawasan yang sudah mencakup wilayah Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sarana	Jumlah
1	Industri farmasi	0
2	Fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	2
3	Industri obat tradisional (IOT)	0
4	Industri ekstrak bahan alam (IEBA)	0
5	Usaha kecil obat tradisional (UKOT)	2
6	Usaha mikro obat tradisional (UMOT)	0
7	Industri farmasi yang memproduksi suplemen kesehatan	0
8	Industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	0
9	Industri pangan yang memproduksi suplemen kesehatan	0
10	Industri kosmetik	5
11	Industri farmasi/industri obat tradisional yang memproduksi kosmetik	0
12	Industri pangan	31
13	Industri rumah tangga pangan (IRTP)	2.632
14	Pedagang besar farmasi (PBF)	19
15	Apotek	337
16	Toko obat	114
17	Instalasi farmasi pemerintah (IFP)	3
18	Rumah sakit	24
19	Puskesmas	57
20	Klinik	176
21	Lain-lain (praktek dokter dan bidan)	0
22	Kantor Kesehatan Pelabuhan	1

23	Fasilitas distribusi obat tradisional	194
24	Fasilitas distribusi suplemen kesehatan	25
25	Fasilitas distribusi kosmetik	305
26	Klinik kecantikan	37
27	Sarana peredaran pangan olahan	667
28	Jumlah sekolah	837
29	Jumlah murid SD menurut kabupaten/kota	120.339
JUMLAH		126.321

Tabel 1.3 Sasaran Pengawasan Balai POM di Balikpapan Tahun 2026

Sebagai implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), pada tahun 2026 Balai POM di Balikpapan telah melakukan pemeriksaan terhadap 314 sarana. Sarana tersebut meliputi sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Toko Obat) serta sarana distributor obat (PBF dan IFK) dengan persentase populasi apoteker penanggung jawab dan penanggung jawab toko obat perempuan sebesar 76%, sementara laki-laki sebesar 24%. Selain itu, pemeriksaan juga meliputi sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, distribusi pangan olahan dan produksi kosmetik serta pangan olahan dengan persentase populasi pemilik usaha/penanggung jawab perempuan sebesar 62% dan laki-laki sebesar 38%.

1.6. Isu Strategis

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan memiliki 3 wilayah pengawasan yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Kota Balikpapan merupakan daerah yang sangat strategis sebagai salah satu pusat perekonomian di Kalimantan Timur dan menjadi salah pintu gerbang menuju ke beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Penunjukkan Kalimantan Timur khususnya sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan. Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser sebagai wilayah daerah/kota penyangga IKN. Hal

tersebut berpotensi meningkatkan perekonomian dan perdagangan termasuk didalamnya peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang meningkat. Potensi peningkatan dalam bidang sediaan farmasi dan pangan olahan ialah dengan pertumbuhan industri sediaan farmasi dan pangan olahan, peningkatan distribusi perdagangan dan konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk peningkatan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lebih bervariasi menjadi suatu tantangan Balai POM di Balikpapan dalam melaksanakan Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Balikpapan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan RPJMN 2025-2029. Identifikasi tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai rumusan dalam perencanaan strategis tahun 2025-2029. Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Balikpapan, dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

I. Isu Internal

Adapun isu internal yang terjadi di Balai POM di Balikpapan antara lain:

- a. Terdapat Pegawai yang mendapatkan tugas pada beberapa fungsi sekaligus

Terbatasnya jumlah sumber daya Manusia (SDM) di Balai POM di Balikpapan dan tingginya capaian target dan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja, sehingga banyak pegawai yang mendapatkan tugas tambahan di luar tugas utama yang melekat pada fungsi dan jabatannya untuk mencapai target kinerja Balai POM di Balikpapan.

- b. Pegawai yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan tidak berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai.

Terbatasnya jumlah sumber daya Manusia (SDM) di lingkungan Balai POM di Balikpapan terutama di fungsi Tata Usaha dan Keuangan. Seiring dengan perubahan Balai POM di Balikpapan menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri maka diperlukan Petugas/SDM untuk menjabat

Pengelola keuangan yang diambil dari Pegawai yang bekerja di bagian pengawasan.

- c. Jumlah SDM belum memadai dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai POM di Balikpapan saat ini belum memadai dalam mendukung pengawasan obat dan makanan secara optimal. Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2025, Balai POM di Balikpapan masih membutuhkan tambahan pegawai. Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pegawai yang tersedia dengan kebutuhan SDM yang ideal. Saat ini, persentase pemenuhan jumlah pegawai baru mencapai 48,57%(63,89%) dari total kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Untuk menutupi gap tersebut, Balai POM di Balikpapan masih memerlukan penambahan SDM sebanyak 13 pegawai.

- d. Kendaraan fungsional yang mendukung Pengawasan Obat dan Makanan belum tercukupi

Kendaraan fungsional dalam mendukung pengawasan obat dan makanan belum tercukupi, sementara ini kendaraan operasional dan fungsional yang dimiliki oleh Balai POM di Balikpapan hanya 3 kendaraan bermotor dengan rincian dua motor dan 1 mobil Lab keliling. Balai POM di Balikpapan masih membutuhkan kendaraan roda 4 /mobil yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan sediaan farmasi dan Pangan olahan karena belum tercovernya semua wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan memiliki transportasi umum yang layak agar pengawasan menjadi lebih optimal.

- e. Ruangan Laboratorium belum memenuhi syarat untuk pengujian Level 1 dan 2 sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 200 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengembangan Laboratorium Balai POM di Balikpapan saat ini hanya melakukan pengujian komoditas pangan, Obat dan kosmetik menggunakan metode uji cepat (rapid test kit) untuk parameter-parameter uji kritis yang telah ditetapkan. Untuk pengujian yang lebih kompleks masih dilakukan di laboratorium regionalisasi (Balai koordinator). Dalam rentang waktu tahun 2025-2029, Balai POM di Balikpapan direncanakan melakukan pengujian kompleks secara

mandiri, seiring dengan berjalannya perencanaan pembangunan kantor dan laboratorium Balai POM di Balikpapan, diharapkan kapasitas pengujian semakin meningkat dan dapat melakukan pengujian mandiri untuk parameter yang lebih banyak.

II. Isu Eksternal

Adapun isu eksternal yang terjadi di Balai POM di Balikpapan antara lain:

a. Globalisasi Perdagangan.

Globalisasi perdagangan ini berdampak juga pada Industri sediaan farmasi dan Pangan olahan yang makin berkembang seiring dengan meningkatnya inovasi teknologi, berkembangnya alur distribusi dan penjualan, kemudahan Informasi. Hal tersebut dapat berdampak positif terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang bervariasi sehingga masyarakat mempunyai banyak opsi dalam menentukan pola konsumsinya tetapi terdapat dampak negatif yang terjadi seperti semakin beragamnya modus operandi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk penggunaan teknologi (informasi, produksi dan lain lain) dan Akses perdagangan bebas menyebabkan beredarnya produk produk ilegal dan/atau substandard ke pasar dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya strategi pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan dari sisi permintaan juga diperlukan edukasi yang masif kepada masyarakat agar terciptanya lingkungan pasar yang aman dan bermutu.

b. Isu hoaks tentang sediaan farmasi dan pangan olahan yang mudah menyebar di masyarakat.

Kemajuan teknologi Informasi telah memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi, akan tetapi di era digital ini sering kali terdapat peningkatan hoaks informasi baik disengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang atau kelompok yang salah satunya berkaitan dengan Sediaan farmasi dan Pangan olahan. Penyebaran hoaks ini tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga dapat memicu kepanikan dan kerugian ekonomi serta menurunnya kredibilitas BPOM

di mata masyarakat. Salah satu wujud antisipasi isu hoaks sediaan farmasi dan pangan olahan yang menyebar di Masyarakat, Balai POM di Balikpapan membuat inovasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di platform media sosial berjudul “TGIF, Ternyata Guys Ini Fakta” yang dibuat secara rutin dan berkala berisi tentang fakta-fakta terkini dan update untuk menepis mitos dan hoax terkait sediaan farmasi dan pangan olahan.

- c. Permintaan masyarakat terhadap obat bahan alam (OBA) yang mengandung Bahan Kimia Obat dan kosmetik ilegal masih cukup tinggi.

Permintaan masyarakat terhadap Obat Bahan Alam (OBA) yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan kosmetik ilegal masih cukup tinggi merupakan fenomena yang mengkhawatirkan. Meskipun sudah sering Badan POM melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap produk tersebut namun masih banyak ditemukan. Produk tersebut seringkali dipromosikan melalui media sosial dengan klaim khasiat yang berlebihan dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Balai POM di Balikpapan terus berupaya untuk mengkampanyekan bahaya OBA mengandung BKO dan kosmetik ilegal melalui media sosial berupa konten edukatif dan menarik pada berbagai platform sosial media, KIE secara langsung menyeluruh dan tepat sasaran, serta Pengawasan dan Penindakan terhadap Pelaku usaha yang mengedarkan OBA mengandung BKO dan Kosmetik Ilegal melalui Operasi Pasar secara rutin dan berkala dan melibatkan lintas sektor terkait.

- d. Kota Balikpapan sebagai kota penyangga IKN menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Penunjukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Negara Indonesia membuat kota-kota di sekitar IKN berdampak dari segi sosial dan ekonomi, tak terkecuali Kota Balikpapan. Sebagai Kota Penyangga IKN Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan akan terdampak mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan. Peningkatan jumlah penduduk ini membawa sejumlah konsekuensi,

terutama dalam hal kebutuhan dasar termasuk sediaan farmasi dan pangan olahan. Dalam hal ini kemungkinan membuka peluang pertumbuhan Industri Farmasi dan pangan olahan di Kota Balikpapan serta perkembangan UMKM yang meningkat. Oleh karena itu Balai POM di Balikpapan diharapkan untuk siap untuk menghadapi tantangan tersebut dengan penguatan Infrastruktur Balai POM di Balikpapan baik dari segi Sarana prasarana dan juga Sumber Daya Manusia. Balai POM di Balikpapan juga diharapkan untuk melakukan peningkatan Pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan.

- e. Adanya tumpang tindih surat kepemilikan tanah alih status dari Kementrian Keuangan ke Badan POM sehingga tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat tanah.

Balai POM di Balikpapan tetap menargetkan pembangunan Kantor dan Laboratorium di rentang waktu 2025-2029, hal tersebut untuk sebagai pemenuhan sarana prasarana dalam menunjang dan meningkatkan kegiatan pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Balikpapan agar berjalan efektif efisien, selain itu juga sebagai pemenuhan aspirasi/ekspektasi masyarakat terkait peningkatan sarana prasarana Balai POM di Balikpapan. Terkait surat kepemilikan tanah Balai POM di Balikpapan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dapat ditemukan solusi yang baik dan progress alih kepemilikan tanah kepada Balai POM di Balikpapan serta pembangunan gedung kantor dan laboratorium dapat tetap berjalan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2029. Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2025- 2029 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia.

Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025- 2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Obat dan Makanan yang aman akan

meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dengan demikian, pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

Renstra Balai POM di Balikpapan 2025-2029 yang tertuang di dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas obat dan Makanan di Balikpapan Nomor HK.02.02.29B.12.25.110 menjadi komitmen untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Balikpapan sebagai UPT Badan POM akan memastikan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah kerja memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkhasiat dan bermutu. Laporan Kinerja Tahun 2026 Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai POM di Balikpapan bercita-cita mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2025-2029 yaitu:

VISI BPOM

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, perlu adanya pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 sebagai pondasi tersebut dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat

Indonesia

Mengacu pada visi Presiden yang tertuang pada RPJMN 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, maka BPOM mengusung Visi untuk rencana strategis 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM RI, Balai POM di Balikpapan tentunya berpedoman juga pada Visi tersebut di atas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

MISI BPOM

Untuk mendukung pencapaian Visi pada poin 2.1, maka disusunlah Misi strategis BPOM 2025-2029. Adapun Misi yang disusun harus selaras dengan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita, dengan penjelasan seperti gambar berikut:



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung secara langsung/tidak

langsung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Misi BPOM 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Untuk mendukung pencapaian Visi BPOM, Balai POM di Balikpapan juga menjalankan sepenuhnya Misi tersebut dalam melakukan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

TUJUAN BPOM

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan

keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2025-2029 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2026 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2026. RKT Tahun 2026 memuat 7 (Tujuh) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Balai POM di Balikpapan Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.50
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.25
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.20
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66.67
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.36
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	3
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	36.36
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.30
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00
		Nilai AKIP UPT BPOM	77.50

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.40

Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja di Balai POM di Balikpapan. Anggaran awal untuk Balai POM di Balikpapan pada program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp1.167.003.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp2.633.250.000 dengan total pagu sebesar Rp 3.800.253.000,-. Namun, perlu diperhatikan bahwa dokumen RKT ini merupakan perencanaan awal yang nantinya dapat berubah disesuaikan dengan mempertimbangkan realisasi, kapabilitas, dan ketersediaan anggaran. Balai POM di Balikpapan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki, sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara akuntabel dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2026 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2026 ini merupakan komitmen antara Kepala Balai POM di Balikpapan sebagai pengembal mandat/tugas/penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/pemberi amanah.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan sumberdaya yang ada, memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target Tahun 2026 yang harus dicapai selama tahun anggaran 2026. Sasaran strategis dengan

indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM di Balikpapan pada tahun berjalan sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja /Penetapan Kinerja dari tahun 2025 – 2029.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing-masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan persentase realisasi tahun 2025 dengan persentase target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 memuat memuat 7 (Tujuh) sasaran kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja Indikator Kinerja. Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.7
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.50
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.6
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.5
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.44
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	82.75
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66.67
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.59
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	36.36
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.85
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75.00
		Nilai AKIP UPT BPOM	77.50
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.48

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Balikpapan Tahun 2026

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2026 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2026. Target pada RKT tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2026 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan

target yang tercantum pada DIPA tahun 2026. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai POM di Balikpapan sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai POM di Balikpapan) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tidak sama dengan target Renstra 2025-2029 karena mengalami penyesuaian, dengan ketentuan :

- 1) Indikator kinerja yang realisasinya di tahun 2025 telah melebihi target PK tahun 2025 atau lebih tinggi dari target Renstra 2025-2026, maka target Indikator Kinerja dalam PK tahun 2026, minimal sama atau lebih baik dari realisasi kinerja tahun 2025 tersebut
- 2) Indikator kinerja yang realisasinya di tahun 2025 tidak mencapai target PK tahun 2025, maka target PK tahun 2026 adalah minimal sama dengan target RKT tahun 2026.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Balikpapan selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance Simetris* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2026 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target per

triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome).

Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2026 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun (RAPK) 2026, sebagai berikut:

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.7	98.7	98.7	98.7
		1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	27
		1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88
		1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100
		1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	86	86
		1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5	89.5	89.5	89.5
		1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100
		1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.6	92.6	92.6	92.6

		1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.5	97.5	97.5	97.5
		1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100
		1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.4	99.44	99.4	99.4
		1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	82.8	82.75	82.8	82.8
		1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0	100
		1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	5.9	6.9	7.9	9.0
		1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	0	66.7
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.6	91.59	91.6	91.6
		4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	95	100	1
		4.3	Jumlah desa pangan aman	5	90	100	1
		4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	100	100	1

3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15	50	75	36.4
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	55	100
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	91.0
6	Layanan Publik UPT yang prima	8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	4.85
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	75
		9.2	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	77.5
		9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	5
		9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	2.48

Tabel 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Tabel Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) yang disajikan merupakan target yang telah mengalami penyesuaian seiring adanya perubahan alokasi anggaran. Revisi terhadap target RAPK tersebut ditetapkan pada tanggal 09 Juni 2026, sehingga seluruh sasaran, indikator, dan alokasi anggaran yang tercantum di dalamnya mencerminkan kondisi terkini. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian outcome. Dengan adanya revisi ini, Balai POM di Balikpapan memiliki pedoman yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan, sekaligus memperkuat komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

2.5 Metode Pengukuran

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam cara tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian yang semakin baik atau semakin rendah.

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1 sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2 sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Disamping itu untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran diperlukan pengukuran kinerja kegiatan yang juga menjadi dasar evaluasi dan analisis karena berkaitan dengan indikator input, indikator output/outcome untuk menghitung efisiensi kegiatan dengan rincian pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dibahas pada evaluasi dan analisis.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.5 Kategori Capaian IKU terhadap target Renstra

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Merujuk pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 184 Tahun 2025 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan BPOM, maka dilakukan penunjukan 1 (satu) orang pejabat fungsional sebagai penanggung jawab data dengan kriteria memahami indikator kinerja unit kerja maupun indikator kinerja BPOM yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas Penanggung Jawab Data adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data kinerja dari masing-masing tim kerja di unit kerjanya.
- Melakukan verifikasi data sebelum dilaporkan.
- Melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan
- Mendokumentasikan data kinerja dengan baik agar data mampu telusur.

2.5 Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Data target anggaran yang digunakan adalah data RPD (Rencana Penarikan Dana). Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

2.6. Penanggung Jawab

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala Balai POM di Balikpapan Nomor HK.02.02.47B.05.26.41 Tahun 2026 tentang Tim Penyelenggaran Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan Tahun 2026, ditetapkanlah penanggung jawab sebagai berikut:

No	Indikator	PENANGGUNG JAWAB
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Gabriella Christyani, S.Farm, Apt
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Meylandika Saputri, S.Farm
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Gabriella Christyani, S.Farm, Apt
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Nitra Wahyuningsih, S.Si
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Gabriella Christyani, S.Farm, Apt
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Meylandika Saputri, S.Farm
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Gabriella Christyani, S.Farm, Apt
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Gabriella Christyani, S.Farm, Apt
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Meylandika Saputri, S.Farm
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Lucia Adventiana, S.Farm., Apt
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Apt. Fitriani, S.Farm
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	Meylandika Saputri, S.Farm
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Meylandika Saputri, S.Farm
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nikma Ulya, S.Si
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Denisa Ayu Fitriarsi, S.T.P

16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Indah Widiarini, S.Farm., Apt
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Apt. Salmawati, S.Farm
18	Jumlah desa pangan aman	Indah Widiarini, S.Farm., Apt
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Riskha Rinanda, S.K.M
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Eflinora Norma Furqia, S.Farm., Apt
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Bella Nindita Prabawati, S.H
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Bella Nindita Prabawati, S.H
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indah Widiarini, S.Farm., Apt
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Gabriella Christyani, S.Farm, Apt
25	Nilai AKIP UPT BPOM	Denisa Ayu Fitriasaki, S.T.P
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Denisa Ayu Fitriasaki, S.T.P
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Denisa Ayu Fitriasaki, S.T.P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing perjanjian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Balikpapan dengan tujuan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pengukuran capaian kinerja Balai POM di Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan II terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahun 2026, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2026, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan, serta evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut. Kategori capaian kinerja ditetapkan menjadi 4 kriteria berdasarkan rentang persentase capaian kinerja sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1.1

Tabel 3.1.1 Range Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja

KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS			
Kriteria	Capaian	Keterangan	KesimpulanEfektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	Abu Gelap	TidakDapatDisimpulkan
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	Biru	SangatEfektif
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	Hijau	Efektif
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	Kuning	Kurang Efektif
Kurang	< 60%	Merah	Tidak Efektif

Pada Triwulan II tahun 2026 Balai POM di Balikpapan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang dituangkan dalam RAPK yaitu terlaksananya 7 sasaran strategis seperti pada tabel dibawah ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 7 Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel 3.1.2.

Tabel 3.1.2 Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	% Capaian TW II	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102.25	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	98.45	Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	110,00	Sangat Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	15	tidak dapat dihitung, tidak ada target di TW II
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00	Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	-	Belum dinilai
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	Belum dinilai
NKO (Nilai Kinerja Organisasi)		102,68	Istimewa

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah ditetapkan 7 sasaran strategis dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.1.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Balai POM di Balikpapan
Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW II	Realisasi TW II	SEBELUM NORMALISASI		SETELAH NORMALISASI	
				CAPAIAN	KATEGORI	CAPAIAN	KATEGORI
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.7	100	101.32	Sangat Baik	101.32	Sangat Baik
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	Dinilai pada Akhir Tahun
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	92.80	105.45	Sangat Baik	105.45	Sangat Baik
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	Tidak Ada KLB	0.00	Tidak Ada KLB
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	100	116.28	Tidak dapat disimpulkan	110.00	Sangat Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5	76.54	85.52	Cukup	85.52	Cukup
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	Baik	100.00	Baik
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.6	100	107.99	Sangat Baik	107.99	Sangat Baik
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.5	100	102.56	Sangat Baik	102.56	Sangat Baik
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	Baik	100.00	Baik
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.44	95.75	96.29	Baik	96.29	Baik

	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	82.75	87.50	105.74	Sangat Baik	105.74	Sangat Baik
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	Dinilai pada Akhir Tahun
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.9	7.58	109.86	Sangat Baik	109.86	Sangat Baik
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	Dinilai pada Akhir Tahun
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.59	85.91	93.80	Baik	93.80	Baik
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95.00	100.00	Baik	100.00	Baik
	Jumlah desa pangan aman	90	90	100.00	Baik	100.00	Baik
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100.00	Baik	100.00	Baik
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	55.00	110.00	Sangat Baik	110.00	Sangat Baik
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	15	-	tidak dapat dihitung, tidak ada target dibulan juni	-	tidak dapat dihitung, tidak ada target dibulan juni
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	Baik	100.00	Baik
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	Dinilai pada Akhir Tahun
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	Dinilai pada Akhir Tahun
	Nilai AKIP UPT BPOM	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	Dinilai pada Akhir Tahun
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	Dinilai pada

							Akhir Tahun
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	Dinilai pada Akhir Tahun
Total Capaian Triwulan II Tahun 2026						=1734,81	
Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026						=102,68.%	
Predikat Nilai Kinerja Organisasi						=ISTIMEWA	

Dari 27 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 8 Indikator kinerja dengan capaian “Sangat Baik”, 8 indikator kinerja capaiannya “Baik”, 1 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 1 indikator tidak dapat dihitung karena belum ada target di Triwulan II dan 8 indikator kinerja yang akan dinilai pada akhir tahun.

Internal Process Perspective

SS1

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan

Tabel.3.1.4. Capaian Sasaran Strategis I Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi	% Capaian Thd Target TW II	Kriteria Capaian
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.7	98.7	100	101.32	Sangat Baik
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	92.80	105.45	Sangat Baik
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	0	0.00	Tidak Ada KLB
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	86	100	110.10	Sangat Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5	89.5	76.54	85.52	Cukup
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100.00	Baik

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.6	92.6	100	107.99	Sangat Baik
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.5	97.5	100	102.56	Sangat Baik
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100.00	Baik
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.44	99.44	95.75	96.29	Baik
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	82.75	82.75	87.50	105.74	Sangat Baik
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	6.9	7.58	109.86	Sangat Baik
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66.67	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun
Capaian SS I				102.25%	Sangat Baik

NPS sasaran strategis 1 Triwulan II tahun 2026 sebesar 102.25% menggambarkan bahwa capaian kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan berada dikriteria “Sangat Baik”

Berikut uraian terkait capaian kinerja setiap IKU sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan Triwulan II tahun 2026.

3.1.1.SASARAN KEGIATAN 1

Sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Kota Balikpapan yang merupakan *stakeholder perspektif*, terdiri dari 15 indikator kinerja yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan.

3.1.1.1 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan Farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi,

suplemen kesehatan dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai pedoman sampling, dihitung berdasarkan kesesuaian perencanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan pengujian, kesesuaian pelaporan dan kesesuaian pelaporan monitoring.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel.3.1.1.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II 2026

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	98,7	100	101,32	Sangat Baik

Pada TW II Tahun 2026, terdapat 71 sampel Sediaan Farmasi yang telah disampling dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil tersebut, didapat bahwa capaian TW II sebesar 101,32 dengan kategori “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)

Tabel.3.1.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I	% Capaian
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	98,81	101,2

Perbandingan capaian terhadap realisasi sebelumnya adalah 101,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut sampel sediaan farmasi telah berjalan secara efektif dan sesuai perencanaan strategis.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel.3.1.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	98,7	100	101,32	 Tercapai/ Melampaui

Apabila realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu 100%, dibandingkan dengan target tahunannya sebesar 98,7% maka didapat capaian kinerja sebesar 101,32% dan mendapat kategori “Tercapai/Melampaui”.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Berdasarkan sajian data di atas, pelaksanaan sampling sediaan farmasi sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Namun masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi menyebabkan penurunan kinerja, antara lain:

- Terdapat sampel yang belum selesai uji karena banyak libur pada bulan Mei
- Ketersediaan varian sampel di cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan yang masih terbatas.
- Penanganan sampel saat pengiriman, risiko sampel rusak yang disebabkan penanganan jasa pengiriman yang kurang optimal.
- Kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian yang menjadi parameter sampel untuk diuji.
- Kemungkinan lainnya adalah hasil pengujian sampel yang tidak memenuhi

syarat dikarenakan terdapat kendala dalam proses produksi maupun rantai distribusi sehingga mengakibatkan adanya penurunan mutu dan akhirnya menyebabkan produk tidak memenuhi syarat pengujian.

Tabel.3.1.1.4. Matriks Rekomendasi Triwulan II pada Indikator I

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat permintaan dari lab untuk mengirim sampel di akhir bulan sebelum bulan uji	"- Melaksanakan sesuai rekomendasi lab - Petugas agar dibuatkan ST dalam rentang waktu satu bulan agar dapat lebih fleksibel melaksanakan sampling"	Melaksanakan sesuai rekomendasi lab	TW III	T	-	-

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan sajian data di atas, pelaksanaan sampling sediaan farmasi sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Pemilihan sampel diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis resiko sebagaimana yang diatur melalui pedoman sampling. Pelaporan hasil sampling telah dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tahapan dalam kegiatan sampling yang dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan, pelaksanaan pengujian hingga pelaporan hasil tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan komitmen UPT dalam melakukan pelaksanaan kegiatan sampling sediaan farmasi dan konsistensi pelaku usaha dalam memproduksi Sediaan Farmasi yang memenuhi syarat, dalam hal pelabelan maupun proses produksi/distribusi. Hal ini selaras dengan komitmen pelaku usaha untuk tetap menjaga prinsip-prinsip produksi Sediaan Farmasi yang benar.

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya Persentase Sediaan Farmasi yang memenuhi syarat antara lain:

- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung ke sarana

maupun dengan kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi.

- Meningkatkan koordinasi dengan internal maupun lintas sektor terkait pembinaan pelaku usaha

3.1.1.2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Kegiatan KIE Farmakovigilans merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendeteksi, menilai, memahami, dan mencegah efek samping atau masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan obat. Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan, melalui kegiatan berupa monitoring efek samping obat (MESO). Tujuan dari MESO adalah untuk deteksi dini kejadian tidak diinginkan (KTD) / efek samping obat (ESO) yang terjadi pada masyarakat yang mengakses pelayanan kesehatan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan KIE terkait farmakovigilans kepada tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan Kesehatan (fasyankes) terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Peningkatan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel.3.1.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II 2026

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-	<i>Belum dinilai</i>

Pada tabel diatas, Target Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO Anggaran Balai POM di Balikpapan Triwulan I Tahun 2026 sebesar 0% dengan Realisasi Triwulan I tahun 2026 sebesar 0% maka diperoleh capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO Balai POM di Balikpapan Triwulan I tahun 2026 sebesar 0% dengan kriteria “Belum dinilai”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)

Tabel.3.1.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I	% Capaian
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	-	-	-

Pada Triwulan I telah dilakukan sosialisasi dalam rangka pembentukan focal point disejumlah sarana pelayanan kefarmasian di wilayah Kota Balikpapan, Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Paser yaitu sebanyak 30 sarana. Dikarenakan belum dilakukan perhitungan jumlah pelaporan KTD/ESO pada triwulan I dan triwulan II sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan pada kedua triwulan tersebut, perhitungan jumlah sarana yang melakukan pelaporan akan dihitung pada akhir tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan target tahunan memuat beberapa komponen utama, yaitu Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan sasaran kegiatan, Target Tahunan sebagai nilai yang harus dicapai selama satu tahun.

Tabel.3.1.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	27%	-	-	Penilaian pada akhir tahun

Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan/Efek Samping Obat (KTD/ESO) memiliki target tahunan sebesar 27%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator tersebut belum memiliki nilai realisasi dan capaian karena pengukuran serta penilaiannya dilaksanakan pada akhir tahun. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan pencapaian target tahunan belum dapat ditentukan pada periode Triwulan II.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penilaian Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala;

- Terjadinya peningkatan website pelaporan, yang menyebabkan pelaporan dari focal point menjadi terhambat.
- Focal Point Fasyankes belum melaporkan KTD/ESO pada website e-meso.
- Kemungkinan lainnya adalah personil Focal Point tidak dapat mengakses website e-meso karena faktor-faktor tertentu

Tabel.3.1.2.4. Matriks Rekomendasi Triwulan II pada Indikator 2

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	TW 4	Y	O1	Ketidakterediaan focal point farmakovigilans pada fasilitas kesehatan

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan atau kegagalan capaian indikator belum dapat dianalisis secara kuantitatif karena pengukuran dan penilaian indikator dilaksanakan pada akhir tahun. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantauan selama semester pertama menjadi langkah penting dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO.

- Melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terkait pelaksanaan farmakovigilans dan tata cara pelaporan KTD/ESO
- Keberhasilan program dalam dilakukan dengan komunikasi secara berkala ke focal point masing-masing pelayanan kefarmasian untuk melaporkan KTD/ESO yang terjadi kepada pasien sebagai bentuk kepedulian terhadap efek samping obat sehingga dapat dilakukan evaluasi penggunaan sediaan farmasi
- Potensi kendala yang dapat memengaruhi pencapaian target antara lain masih terbatasnya pemahaman tenaga kesehatan mengenai mekanisme pelaporan, rendahnya kesadaran untuk melaporkan kejadian, pergantian petugas pengelola, serta belum optimalnya koordinasi dan tindak lanjut pelaporan pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan.

3.1.1.3 Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel Pangan Olahan adalah sampel makanan atau minuman yang dipilih berdasarkan evaluasi sesuai pedoman sampling yang kemudian diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling serta ditindaklanjuti sesuai pedoman tindaklanjut. Persentase Pangan Olahan Berisiko yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan dan kesesuaian tindaklanjut.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Tabel.3.1.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II 2026

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88	92,8	105,45	<i>Sangat Baik</i>

Pada Triwulan II, terdapat 25 produk pangan olahan yang disampling berdasarkan analisis risiko dan pedoman sampling yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindaklanjut dan ketentuan lainnya. Berdasarkan data tersebut, didapat bahwa realisasi sebesar 92,8% dan capaian 105,45% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)

Tabel.3.1.3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I	% Capaian
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,80	68	136,47

Perbandingan capaian terhadap realisasi sebelumnya adalah 136,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut sampel pangan olahan telah berjalan efektif dan sesuai perencanaan strategis.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel.3.1.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88	92,8	105,45	 Tercapai/ Melampaui

Apabila realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat dibandingkan dengan target tahun 2026 yaitu 88% maka didapat capaian kinerja sebesar 105,45% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Berdasarkan sajian di atas, diketahui bahwa capaian kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada TW II sebesar 92,80% dengan kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan capaian kinerja yang meningkat dapat disebutkan bahwa pelaksanaan sampling sediaan farmasi sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Akan tetapi tetap terdapat kendala pada kegiatan sampling antara lain:

- Terdapat sampel yang belum selesai uji karena banyak libur pada bulan Mei
- Masih adanya pelaku usaha sebagai produsen yang belum konsisten dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dengan kemasan yang sesuai ketentuan
- Pelaku usaha sarana distribusi yang belum *aware* terhadap penanganan pangan olahan selama rantai distribusi.
- Adanya pelaku usaha yang belum peduli terhadap izin edar pangan olahan yang didistribusikan untuk menjamin produk pangan olahan merupakan pangan yang aman dan bermutu.
- Pembinaan yang dilakukan UPT terhadap pelaku usaha produksi dan distribusi belum berjalan dengan efektif. Baik pembinaan terhadap pelaku usaha pangan olahan skala UMKM maupun skala industri.

Tabel.3.1.3.4. Matriks Rekomendasi Triwulan II pada Indikator 3

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Untuk parameter penilaian laporan dan pengambilan kesimpulan kemungkinan tidak akan bisa 100% karena sampel masih masuk timeline pengujian sampai tenggat	Melaksanakan sesuai renlak. Tetap lakukan koordinasi ke lab untuk progres pengujian sampel	Melaksanakan sesuai renlak	TW III- TW IV	T	-	-

		waktu pelaporan kinerja							
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya Persentase Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- Melakukan tindak lanjut dan komunikasi secara intens terkait perkembangan pengujian sampel ke Balai Penguji.
- Peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan kegiatan sampling
- Pemanfaatan teknologi informasi oleh petugas untuk meningkatkan keakuratan/ketepatan dalam melakukan pemeriksaan penandaan
- Meningkatnya koordinasi antara UPT BPOM dalam regional IV dalam hal pelaksanaan sampling dan jadwal pengujian di laboratorium sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat capaian antara lain:
- Terlambatnya reagen atau dukungan fungsi pengujian lainnya sehingga kegiatan sampling tidak dapat dilakukan sesuai rencana pelaksanaan

3.1.1.4 Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT

Salah satu sasaran kegiatan Balai POM di Balikpapan yaitu Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar. Definisi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini yaitu sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan.

Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Standar yang digunakan adalah Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel.3.1.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II 2026

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100	0	0	Tidak Ada Kejadian KLB - KP

Pada triwulan II, di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan tidak ada sampel pangan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang disampling atau diuji oleh Balai POM di Balikpapan. Sehingga realisasi dan capaian 0. Capaian ini tidak dimasukkan ke dalam penilaian UPT.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)

Tabel.3.1.4.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I	% Capaian
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	0	0	0

Berdasarkan perbandingan realisasi antar triwulan, indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT tidak mengalami perubahan. Pada triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator 0 dan pada Triwulan II realisasi juga 0. Hasil ini menunjukkan bahwa pada triwulan I dan II tidak ada sampel pangan KLB keracunan pangan yang disampling atau diuji oleh Balai POM di Balikpapan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel.3.1.4.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100	0	0	Tidak Ada Kejadian KLB - KP

Apabila realisasi triwulan II dibandingkan dengan target tahun 2026 maka capaiannya adalah 0. Hal itu disebabkan di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan tidak ada sampel pangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

keracunan pangan yang disampling atau diuji oleh Balai POM di Balikpapan. Sehingga realisasi triwulan II Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT tidak dapat dijadikan capaian UPT karena tidak ada sampel pangan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan yang disampling atau diuji.

d. Analisis Penyebab keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT sebesar 0 karena tidak terdapat sampel KLB keracunan pangan yang disampling maupun diuji oleh Balai POM di Balikpapan. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat dijadikan sebagai capaian kinerja UPT.

Tidak tercapainya target pada indikator ini bukan disebabkan oleh kendala dalam pelaksanaan pengujian maupun keterbatasan sumber daya Balai POM di Balikpapan, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa tidak adanya sampel KLB keracunan pangan yang menjadi objek pengujian sesuai definisi indikator kinerja. Dengan demikian, realisasi indikator sangat bergantung pada adanya kejadian KLB keracunan pangan yang memerlukan pengambilan sampel dan pengujian oleh Balai POM di Balikpapan sesuai pedoman.

Meskipun tidak terdapat sampel yang dapat diuji pada triwulan II, Balai POM di Balikpapan tetap melaksanakan pemantauan informasi terkait kejadian KLB keracunan pangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai upaya menjaga kesiapsiagaan dalam pelaksanaan investigasi dan pengujian apabila terjadi KLB di wilayah pengawasan.

Tabel.3.1.4.4. Matriks Rekomendasi Triwulan II pada Indikator 4

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	tidak ada kendala	melakukan monitoring terkait berita atau kejadian KLB di wilayah kerja	memonitoring berita terkait KLB di wilayah kerja	TW III	Y	O7	Kegagalan identifikasi agen penyebab KLB
---	--	-------------------	--	--	--------	---	----	--

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT sangat bergantung pada adanya kejadian KLB keracunan pangan yang memerlukan pengambilan sampel dan pengujian oleh Balai POM di Balikpapan. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dilakukan Balai POM lebih berfokus pada upaya menjaga kesiapsiagaan dalam penanganan KLB daripada menciptakan kejadian KLB sebagai objek pengukuran. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator antara lain:

- Melaksanakan pemantauan informasi dan pelaporan kejadian dugaan KLB keracunan pangan di wilayah kerja.
- Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit, laboratorium kesehatan daerah, dan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi secara cepat apabila terjadi dugaan KLB keracunan pangan.
- Menyiapkan sumber daya pengawasan dan laboratorium agar siap melakukan pengambilan sampel dan pengujian sesuai pedoman apabila terdapat permintaan atau penugasan investigasi KLB.

Adapun belum tercapainya target pada Triwulan II bukan disebabkan oleh pelaksanaan program atau kegiatan Balai POM di Balikpapan, melainkan karena tidak terdapat sampel KLB keracunan pangan yang menjadi kewenangan Balai POM untuk dilakukan pengujian sesuai standar. Perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor dan mekanisme pelaporan dini yang tetap dilakukan agar apabila terjadi dugaan KLB, Balai POM dapat segera terlibat dalam proses investigasi, pengambilan sampel, maupun pengujian laboratorium sesuai pedoman.

3.1.1.5 Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel PIRT berisiko adalah sampel pangan olahan hasil produksi rumah tangga yang dipilih berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan penjumlahan kesesuaian target, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan keputusan, ketepatan waktu pengambilan kesimpulan sampai tindak lanjut sampel PIRT.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel.3.1.5.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II 2026

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	100	116.28	Tidak dapat disimpulkan

Pada TW II, dari 5 sampel PIRT Pangan Olahan yang disampling dan diuji selama tahun 2026. Semua sampel telah selesai uji dengan pengambilan keputusan sesuai pedoman sampling. Berdasarkan data tersebut, didapat realisasi sebesar 100% dan capaian 116,28% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (Triwulan I)

Tabel.3.1.5.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I	% Capaian
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	62,5	116,28

Perbandingan capaian terhadap realisasi sebelumnya adalah 116,28%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut sampel PIRT telah berjalan

efektif dan sesuai perencanaan strategis.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel.3.1.5.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	100	116,28	 Tercapai/ Melampaui

Apabila realisasi TW II indikator Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan dibandingkan dengan target tahun 2026, maka didapat capaian sebesar 116,28% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Berdasarkan data yang tersaji di atas, pada TW II telah dilakukan sampling dan pengujian telah selesai dilakukan. Capaian pada TW II dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” dengan target tahunan hanya 86%. Target tahunan yang diberikan berdasarkan riwayat capaian dari tahun sebelumnya. Dengan kecilnya target yang diberikan menunjukkan tidak adanya konsistensi dari pelaku usaha. Oleh karena itu menimbulkan kendala pada kegiatan sampling antara lain:

- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha sebagai produsen terkait batas waktu izin usaha
- Melakukan kerjasama yang intensif dengan lintas sektor terkait agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap pangan olahan PIRT yang beredar
- Meningkatkan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan pangan
- Mendorong kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kualitas pangan olahan yang diproduksi

Tabel.3.1.5.4. Matriks Rekomendasi Triwulan II pada Indikator 5

No.	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase PIRT yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Melakukan tindak lanjut bersama dinkes untuk sampel Nikimie Black Garlic karena pada label tercantum klaim kesehatan sementara nomor izin yang diajukan berupa PIRT sehingga perlu kejelasan komitmen dari pelaku usaha	Monitoring feedback dari dinkes	TW III-IV	Y	S5	Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder masih rendah

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Adapun program yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha sebagai produsen terkait batas waktu izin usaha
- Melakukan kerjasama yang intensif dengan lintas sektor terkait agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap pangan olahan PIRT yang beredar
- Meningkatkan edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan pangan
- Mendorong kesadaran pelaku usaha dalam menjaga kualitas pangan olahan yang diproduksi

3.1.1.6 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Persentase keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha serta lintas sektor dalam merespons hasil pengawasan yang disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengukuran dilakukan berdasarkan adanya umpan balik, konfirmasi, atau bukti tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan setelah pelaksanaan inspeksi. Bentuk tindak lanjut tersebut dapat berupa penyampaian klarifikasi, pemenuhan dokumen, perbaikan sarana dan prasarana, penyempurnaan proses produksi atau pelayanan, penghentian sementara kegiatan tertentu, penarikan produk, pembinaan, maupun langkah korektif lainnya sesuai dengan jenis dan tingkat ketidaksesuaian yang ditemukan. Semakin tinggi persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, semakin baik pula efektivitas koordinasi, pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan oleh UPT.

Penerbitan keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengawasan serta pedoman tindak lanjut hasil pengawasan yang berlaku. Pedoman tersebut menjadi dasar bagi petugas dalam menilai hasil pemeriksaan, menentukan status kepatuhan sarana, mengidentifikasi tingkat risiko, serta menetapkan bentuk tindak lanjut yang proporsional sesuai dengan jenis dan tingkat ketidaksesuaian yang ditemukan. Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi tidak hanya diberikan kepada sarana yang dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan, tetapi juga diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian yang dinyatakan Memenuhi Ketentuan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel.3.1.6.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II 2026

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,5	76,54	85,52	Cukup

Pada Triwulan II Tahun 2026, UPT telah menyampaikan sebanyak 26 surat tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 surat telah memperoleh respons atau bukti tindak lanjut, sehingga tingkat respons pelaku usaha mencapai 73,08%. Sementara itu, kepada lintas sektor telah disampaikan sebanyak 5 surat rekomendasi atau tindak lanjut, dengan 4 surat yang telah memperoleh respons balik atau sebesar 80%.

Berdasarkan penghitungan terhadap tingkat tindak lanjut oleh pelaku usaha dan lintas sektor, diperoleh realisasi indikator sebesar 76,54%. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 85,52% dan termasuk dalam kriteria “Cukup”. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi telah mendapatkan respons, namun masih terdapat 7 surat kepada pelaku usaha dan 1 surat kepada lintas sektor yang belum memperoleh tanggapan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Realisasi Kinerja Triwulan sebelumnya (Triwulan I)

Tabel.3.1.6.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I	% Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	76,54	33,3	229,84

Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada Triwulan II menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada Triwulan I, realisasi indikator tercatat sebesar 33,30%, sedangkan pada Triwulan II meningkat menjadi 76,54%.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa respons dan komitmen pelaku usaha serta lintas sektor dalam menindaklanjuti keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi semakin baik. Hal ini juga mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan pemantauan, koordinasi, komunikasi, dan penyampaian pengingat oleh UPT kepada para pemangku kepentingan. Meskipun realisasi pada Triwulan II telah meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan Triwulan I, masih terdapat beberapa surat tindak lanjut yang belum memperoleh respons. Oleh karena itu, upaya pengawalan terhadap rekomendasi yang belum diselesaikan perlu terus ditingkatkan melalui pemantauan berkala, koordinasi yang lebih intensif, serta penegasan batas waktu penyampaian tindak lanjut agar capaian indikator pada periode berikutnya dapat semakin optimal.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan target tahunan disajikan melalui beberapa komponen utama. Indikator Kinerja merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan sasaran kegiatan, sedangkan Target Tahunan merupakan nilai atau hasil yang

ditetapkan untuk dicapai dalam satu tahun anggaran. Perbandingan kedua komponen tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II serta menunjukkan sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah mendukung pencapaian target yang ditetapkan pada akhir tahun.

Tabel.3.1.6.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,5	76,54	85,52	 Akan Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut, indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan memiliki target tahunan sebesar 89,5%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi yang berhasil dicapai sebesar 76,54%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang disampaikan oleh UPT telah mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pelaku usaha maupun lintas sektor. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, realisasi tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 85,52% dan termasuk dalam kategori “Akan Tercapai”.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada triwulan berikutnya perlu dilakukan penguatan pemantauan, koordinasi, dan komunikasi secara berkala kepada pemangku kepentingan, khususnya terhadap surat rekomendasi yang belum memperoleh respons, agar seluruh tindak lanjut dapat diselesaikan tepat waktu dan target tahunan sebesar 89,5% dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tabel.3.1.6.4. Matriks Rekomendasi Triwulan II pada Indikator 6

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timelin e	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	kendala pihak linsek dan sarana yang sulit dihubungi	masing-masing PIC SIPT diharapkan untuk mengingatkan sarana dalam menyelesaikan CAPA	Melakukan jemput bola untuk menyelesaikan CAPA dari sarana	TW III-IV	Y	S2	Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder masih rendah

Realisasi indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 76,54%, meningkat sebesar 43,24 poin persentase dibandingkan Triwulan I yang hanya sebesar 33,30%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan respons dan komitmen pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti hasil inspeksi. Kondisi ini antara lain didukung oleh semakin intensifnya pemantauan terhadap surat tindak lanjut, penyampaian pengingat kepada pelaku usaha dan lintas sektor, serta meningkatnya koordinasi antara UPT dengan pihak yang menjadi objek rekomendasi.

Meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, realisasi Triwulan II masih belum mencapai target tahunan sebesar 89,5%. Dari 26 surat tindak lanjut yang disampaikan kepada pelaku usaha, baru 19 surat yang memperoleh respons, sehingga masih terdapat 7 surat yang belum ditindaklanjuti. Sementara itu, dari 5 surat rekomendasi yang disampaikan kepada lintas sektor, sebanyak 4 surat telah memperoleh respons dan masih terdapat 1 surat yang belum mendapatkan tanggapan. Belum optimalnya capaian tersebut dapat disebabkan oleh keterlambatan penyampaian bukti tindak lanjut, kurangnya pemahaman mengenai bentuk respons yang harus disampaikan, kendala dalam pelaksanaan perbaikan, pergantian penanggung jawab pada sarana, maupun koordinasi lintas sektor yang memerlukan waktu lebih panjang. Selain itu, beberapa rekomendasi mungkin membutuhkan

proses penyelesaian secara bertahap karena berkaitan dengan perbaikan sarana, kelengkapan administrasi, pembinaan, atau tindak lanjut yang melibatkan lebih dari satu instansi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang tercapainya Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang memenuhi syarat antara lain:

- Program pemantauan tindak lanjut hasil inspeksi memberikan kontribusi terhadap peningkatan capaian dibandingkan Triwulan I. Pemantauan dilakukan melalui pengecekan secara berkala terhadap surat yang telah diterbitkan, inventarisasi rekomendasi yang sudah dan belum memperoleh respons, serta penyampaian pengingat kepada pelaku usaha dan lintas sektor.
- Koordinasi dan komunikasi langsung melalui surat, telepon, pesan elektronik, maupun media komunikasi lainnya membantu mempercepat penyampaian klarifikasi dan bukti perbaikan. Selain itu, kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai pemenuhan ketentuan dan penyelesaian tindakan korektif turut meningkatkan pemahaman serta komitmen mereka dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat capaian antara lain:

- Belum optimalnya capaian dapat dipengaruhi oleh belum konsistennya kegiatan pengingat dan pemantauan berdasarkan batas waktu, belum tersedianya sistem pemantauan tindak lanjut yang terintegrasi, serta belum meratanya pemahaman pemangku kepentingan mengenai bentuk dokumen dan bukti tindak lanjut yang harus disampaikan

3.1.1.7 Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata capaian sarana produksi Obat, OBA (Obat Bahan Alam) dan SK (Suplemen Kesehatan) serta Kosmetik.

Persentase realisasi sarana produksi Obat dihitung berdasarkan:

1. Kesesuaian sarana dan cakupan pengawasan
2. Jumlah pelaksanaan inspeksi
3. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

Persentase realisasi sarana produksi OBA dan SK dihitung berdasarkan:

1. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

Sementara realisasi sarana produksi Kosmetik dihitung berdasarkan:

1. Pelaksanaan inspeksi
2. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
3. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
4. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel.3.1.7.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II 2026

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	Baik

Pada TW II indikator ini memiliki target triwulanan sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya juga mencapai 100% dengan kriteria “Baik”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target pemeriksaan telah diperiksa dan hasil pemeriksaannya telah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2026, target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi ditetapkan sebanyak 2 sarana. Pada Triwulan II, seluruh sarana yang menjadi target tersebut telah selesai diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman pengawasan serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, realisasi pemeriksaan mencapai 2 dari 2 sarana atau sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa target tahunan telah terpenuhi sepenuhnya pada Triwulan II serta mencerminkan pelaksanaan perencanaan, pemeriksaan, dokumentasi hasil, dan tindak lanjut pengawasan yang berjalan secara efektif dan tepat waktu. Selanjutnya, kualitas hasil pemeriksaan dan ketepatan penyelesaian tindak lanjut perlu terus dijaga agar kepatuhan sarana terhadap ketentuan dapat dipertahankan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Realisasi Kinerja Triwulan sebelumnya (Triwulan I)

Tabel.3.1.7.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I	% Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	100	100	100

Berdasarkan perbandingan realisasi antar triwulan, indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan menunjukkan kinerja yang konsisten. Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator telah mencapai 100%, dan capaian tersebut berhasil dipertahankan pada Triwulan II dengan realisasi sebesar 100%. Dengan demikian, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian antara Triwulan I dan Triwulan II karena seluruh sarana yang menjadi target pemeriksaan telah diperiksa serta ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman pengawasan dan ketentuan yang berlaku. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi telah berjalan sesuai dengan rencana, baik dari sisi ketepatan pelaksanaan pemeriksaan, penyelesaian hasil pemeriksaan, maupun tindak lanjut terhadap temuan yang

diperoleh. Capaian tersebut perlu terus dipertahankan melalui konsistensi penerapan pedoman, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut, serta penguatan dokumentasi hasil pengawasan agar kualitas pemeriksaan tetap terjaga pada periode berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel.3.1.7.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100	 Tercapai

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan target tahunan, indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target tahunan sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator tersebut telah mencapai 100%, sehingga capaian kinerjanya juga sebesar 100% dan termasuk dalam kategori “Akan Tercapai”. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target pemeriksaan pada tahun 2026, yaitu sebanyak 2 sarana, telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman pengawasan serta ketentuan yang berlaku.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tabel.3.1.7.4. Matriks Rekomendasi Triwulan II pada Indikator 7

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Monitoring progres tindak lanjut dari Rumah Madu Al-Ikhlas sampai batas waktu yang telah disepakati bersama (6 bulan dari 30 Juni 2026). Apabila ingkar, maka sarana produksi harus di PSK dan produk beredar tanpa izin ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Monitoring progres tindak lanjut dari Rumah Madu Al-Ikhlas	TW IV	Y	S5, S8	- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder masih rendah- Masih ditemukan produk sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE) yang beredar di wilayah Balai POM di Balikpapan pada saat pemeriksaan rutin pada sarana produksi Sediaan Farmasi

Capaian indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan hasil yang optimal. Dari target tahunan sebanyak 2 sarana, seluruh sarana telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman pengawasan serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, realisasi indikator mencapai 100% dan capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori “Baik”. Apabila dibandingkan dengan Triwulan I yang juga mencapai 100%, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan kinerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UPT mampu mempertahankan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan pada tingkat yang maksimal. Koordinasi yang baik antarpetugas, ketersediaan data dan dokumen pendukung, serta penerapan pedoman pemeriksaan secara konsisten turut menunjang penyelesaian seluruh target. Ketepatan dalam menyusun hasil pemeriksaan dan melakukan tindak lanjut juga menjadi faktor penting dalam

memastikan bahwa setiap sarana yang diperiksa telah memperoleh penanganan sesuai dengan hasil inspeksi. Dukungan dan keterbukaan dari pihak sarana selama proses pemeriksaan turut memperlancar pelaksanaan kegiatan.

Potensi kendala yang tetap perlu diantisipasi, seperti perubahan jadwal pemeriksaan, keterbatasan sumber daya petugas, ketidaksiapan sarana pada saat pemeriksaan, keterlambatan penyampaian dokumen, serta kendala dalam penyelesaian tindak lanjut hasil inspeksi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dari target tahunan sebanyak 2 sarana, seluruh sarana telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman pengawasan dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan mulai dari penetapan target, penyusunan jadwal, pelaksanaan pemeriksaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, hingga penyelesaian tindak lanjut telah berjalan secara efektif. Kegiatan yang paling berperan dalam menunjang keberhasilan capaian tersebut adalah:

- perencanaan pemeriksaan berdasarkan target yang telah ditetapkan
- pemetaan sarana yang akan diperiksa
- pengaturan jadwal dan penugasan petugas secara tepat, dan
- pelaksanaan inspeksi sarana produksi sediaan farmasi sesuai dengan pedoman juga memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator

Walaupun target telah tercapai, potensi kegagalan tetap perlu diantisipasi. Hambatan dapat muncul apabila terjadi perubahan jadwal, keterbatasan jumlah petugas, benturan dengan kegiatan pengawasan lainnya, ketidaksiapan sarana, keterlambatan penyampaian dokumen, maupun lambatnya pemenuhan tindakan korektif. Selain itu, apabila kegiatan pemantauan tidak dilakukan secara konsisten, terdapat risiko bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu meskipun inspeksi telah dilaksanakan.

3.1.1.8 Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan, termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi pangan olahan. Pengukuran dilakukan berdasarkan jumlah sarana yang telah diperiksa sesuai dengan pedoman pengawasan dan telah memperoleh tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target pemeriksaan pada periode berjalan.

Berdasarkan manual IKU per 20 Januari 2025, Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. Sedangkan Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:

- a. Ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan pada SIPT (tanggal 15 bulan berikutnya)
- b. Kesesuaian tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut
- c. Kesesuaian grading sarana yang diperiksa

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel.3.1.8.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II 2026

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,6	100	107,99	Sangat Baik

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi dengan target Triwulan II Tahun 2026, sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan diukur melalui indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan, termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. Pada Triwulan II, target indikator ditetapkan sebesar 92,6%, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi telah melampaui target sebesar 7,4 poin persentase dan menghasilkan capaian kinerja sebesar 107,99%, sehingga termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sarana produksi pangan olahan dan IRTP yang menjadi sasaran pemeriksaan pada periode Triwulan II telah diperiksa serta ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman pengawasan dan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dapat berupa pembinaan, rekomendasi perbaikan, pemenuhan dokumen, tindakan korektif, maupun tindak lanjut administratif sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian yang ditemukan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Realisasi Kinerja Triwulan sebelumnya (Triwulan I)

Tabel.3.1.8.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I	% Capaian
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100

Apabila realisasi indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan, termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II dibandingkan dengan Triwulan I, keduanya menunjukkan realisasi sebesar 100%. Hal ini berarti tidak terdapat peningkatan maupun penurunan secara persentase karena seluruh sarana yang dijadwalkan untuk diperiksa pada masing-masing triwulan telah selesai diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang berlaku. Dari target pemeriksaan tahun 2026 sebanyak 7 sarana, sampai dengan Triwulan II telah diperiksa sebanyak 3 sarana atau sebesar 42,86% dari jumlah target tahunan. Meskipun jumlah sarana yang diperiksa belum mencapai keseluruhan target tahunan, realisasi indikator tetap sebesar 100% karena tiga sarana yang menjadi target pelaksanaan sampai dengan periode tersebut seluruhnya telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Tabel.3.1.8.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,6	100	107,99	 Tercapai/ Melampaui

Berdasarkan tabel tersebut, indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan, termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan memiliki target tahunan sebesar 92,6%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator telah mencapai 100%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 107,99% dan termasuk dalam kategori “Tercapai/Melampaui”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sarana yang menjadi sasaran pemeriksaan pada periode Triwulan II telah diperiksa, dilaporkan, dan diberikan keputusan atau tindak lanjut hasil inspeksi sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang berlaku.

Balai POM di Balikpapan memiliki target pengawasan tahunan sebanyak 7 sarana produksi pangan olahan, termasuk IRTP. Penetapan target indikator sebesar 92,6% mempertimbangkan tidak hanya pelaksanaan pemeriksaan sarana, tetapi juga ketepatan petugas dalam menyelesaikan pelaporan dan menerbitkan keputusan hasil inspeksi sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana yang dijadwalkan sampai dengan Triwulan II telah diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tabel.3.1.8.4. Matriks Rekomendasi Triwulan II pada Indikator 8

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target terlalu sedikit sementara sarana yang butuh perhatian banyak	Target terlalu sedikit sementara sarana yang butuh perhatian banyak	Review kembali target sarana	TW III	Y	K4	Blokir atau pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat

Realisasi indikator Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan, termasuk IRTP, yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 100%, melampaui target tahunan sebesar 92,6%. Dengan demikian, capaian kinerja indikator tersebut sebesar 107,99% dan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dari target pengawasan tahunan sebanyak 7 sarana, sampai dengan Triwulan II telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana. Seluruh sarana yang dijadwalkan pada periode tersebut telah diperiksa, dibuatkan laporan hasil pemeriksaan, serta diberikan keputusan atau tindak lanjut sesuai dengan pedoman dan batas waktu yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan Triwulan I, realisasi pada Triwulan II tetap berada pada angka 100%, sehingga tidak terdapat peningkatan maupun penurunan secara persentase. Namun, kemampuan mempertahankan capaian maksimal menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan secara konsisten. Meskipun demikian, jumlah sarana yang telah diperiksa baru mencapai 3 dari 7 sarana, sehingga masih terdapat 4 sarana yang harus diselesaikan pada triwulan berikutnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena perubahan jadwal, keterbatasan petugas, ketidaksiapan sarana, atau adanya kegiatan pengawasan lain yang bersamaan dapat

berpotensi menghambat pencapaian target tahunan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung keberhasilan tersebut meliputi pemetaan dan penetapan sarana yang akan diperiksa, penyusunan jadwal pemeriksaan, pembagian tugas petugas, pelaksanaan inspeksi, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, serta penerbitan keputusan atau rekomendasi tindak lanjut. Perencanaan yang baik memungkinkan petugas mempersiapkan dokumen, instrumen pemeriksaan, dan kebutuhan teknis sebelum inspeksi dilaksanakan. Selain itu, koordinasi antarpetugas serta komunikasi dengan pelaku usaha membantu memastikan pemeriksaan dapat dilakukan sesuai jadwal dan data yang diperlukan tersedia pada saat pemeriksaan.

Meskipun capaian sampai dengan Triwulan II tergolong sangat baik, masih terdapat 4 sarana dari target tahunan yang belum diperiksa dan perlu diselesaikan pada triwulan berikutnya. Potensi kegagalan dapat terjadi apabila terdapat perubahan jadwal, keterbatasan petugas, benturan dengan kegiatan pengawasan lainnya, ketidaksiapan pelaku usaha, kesulitan akses ke lokasi, atau keterlambatan penyelesaian laporan dan tindak lanjut. Oleh karena itu, jadwal pemeriksaan terhadap sarana yang tersisa perlu dipantau secara berkala, disertai penyiapan jadwal alternatif dan pengaturan sumber daya petugas agar seluruh target tahunan dapat tercapai.

Secara keseluruhan, kegiatan perencanaan, pemeriksaan, pembinaan, penyelesaian laporan, penerbitan tindak lanjut, dan pemantauan secara berkala telah menunjang keberhasilan capaian kinerja pada Triwulan II. Untuk mempertahankan capaian tersebut, Balai POM di Balikpapan perlu melanjutkan koordinasi dengan pelaku usaha, mengendalikan ketepatan waktu setiap tahapan pemeriksaan, serta melakukan evaluasi terhadap kendala yang muncul. Dengan langkah tersebut, empat sarana yang tersisa diharapkan dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

3.1.1.9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang memenuhi ketentuan dihitung berdasarkan Persentase dari Jumlah total fasilitas distribusi Sediaan Farmasi memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total sarana distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan. Sarana distribusi Sediaan Farmasi yang menjadi target di Balai POM di Balikpapan meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Intalasi Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan dan Fasilitas Distribusi Kosmetik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel.3.1.9.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan II 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,5	100	102,56	Sangat Baik

Pada TW II, terdapat 62 sarana yang telah diperiksa dan penginputan data di SIPT telah dilakukan 100% sehingga didapat realisasi sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target TW II sebesar 97,5%, maka didapat capaian sebesar 102,56% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II	% Capaian
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100

Tabel 3.1.9.2 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Realisasi indeks kinerja sasaran strategis Presentase fasilitas Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II adalah 100%. Jika dibandingkan dengan kinerja Triwulan I yaitu 100%, capaian terhadap realisasi triwulan sebelumnya adalah 100%. Hal ini menunjukkan pengawasan fasilitas sediaan farmasi telah dilakukan secara efektif dan konsisten.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

. Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,5	100	102,56	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3.1.9.3 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Apabila realisasi TW II indikator Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2026, maka didapat capaian sebesar 102,56% dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	melanjutkan kegiatan pemeriksaan sesuai renlak	melaksanakan inspeksi sesuai dengan renlak bulanan	TW III - IV	Y	R1, S3, S4, R2	- Keterulangan hasil TMK pada sarana distribusi Sediaan Farmasi sehingga sarana beroperasi tidak sesuai dengan peraturan perundangan sehingga merugikan masyarakat.- Target sarana distribusi Sediaan Farmasi tutup/ tidak beroperasi sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan-Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi tidak sesuai dengan pedoman-Masih ditemukan produk sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE) yang beredar di wilayah Balai POM di Balikpapan pada saat pemeriksaan rutin pada sarana distribusi

Balai POM di Balikpapan sehingga perlu adanya pendekatan kembali kepada pelaku usaha dan lintas sektor di wilayah pengawasan terkait.

- Jumlah sumber daya manusia terutama di fungsi pemeriksaan yang terbatas tidak mencukupi pada beban kerja yang ada.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan paparan pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembinaan kepada pelaku usaha harus terus menerus dilakukan. Baik itu pembinaan terkait cara distribusi yang baik maupun edukasi terhadap produk-produk yang boleh diedarkan di wilayah negara Indonesia. Kesadaran pelaku usaha untuk terus konsisten melakukan cara distribusi yang baik maupun memilih produk untuk dijual harus selalu ditingkatkan. Pelaku usaha sebaiknya tetap beri sosialisasi dan pengertian bahwa mereka juga turut andil dalam sistem pengawasan peredaran Sediaan Farmasi.

Selain itu perlu dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan capaian kinerja seperti:

- Sosialisasi SOP dan *refreshment* pedoman terkait pengawasan sarana distribusi Sediaan Farmasi kepada masing-masing petugas.
- Melakukan pendekatan secara intensif kepada pelaku usaha maupun lintas sektor baik dilakukan secara langsung saat pemeriksaan atau dilakukan kegiatan sosialisasi terkait peraturan peredaran sediaan farmasi di Indonesia.

3.1.10 Persentase Sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang memenuhi ketentuan dihitung berdasarkan Persentase dari Jumlah total fasilitas distribusi Pangan Olahan memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan pendistribusian pangan olahan yang diperiksa dan

ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total sarana distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan. Sarana distribusi Pangan Olahan yang menjadi target di Balai POM di Balikpapan meliputi distributor pangan, toko grosir pangan, ritail modern (supermarket dan minimarket) dan toko kelontong.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi i	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	Baik

Tabel 3.1.10.1 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada TW II dilakukan pemeriksaan terhadap 13 sarana dengan pelaporan SIPT tepat waktu sehingga realisasi sebesar 100%. Pemeriksaan dilakukan pada wilayah pengawasan di Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser yang menjadi target sesuai rencana pelaksanaan. Apabila dibandingkan dengan target TW II yaitu sebesar 100%, maka didapat capaian sebesar 100 % dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I	% Capaian
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100%

Tabel 3.1.10.2 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Realisasi indeks kinerja sasaran strategis Presentase fasilitas Sediaan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan II adalah 100%. Jika dibandingkan dengan kinerja Triwulan I yaitu 100%, capaian terhadap realisasi triulan sebelumnya adalah 100%. Hal ini menunjukkan pengawasan sarana distribusi pangan telah dilakukan secara efektif dan konsisten.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3.1.10.3 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Apabila realisasi TW II indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2026, maka terdapat capaian dengan kategori “Tercapai/Melampaui”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	Diperhatikan untuk inspeksi HSM agar disesuaikan dengan peraturan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026	Melanjutkan kegiatan sesuai rencana	TW III - IV	Y	S15	Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi tidak sesuai dengan pedoman

Tabel 3.1.10.4 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Beberapa hal yang menyebabkan ketercapaian kinerja antara lain:

- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap produk-produk yang boleh diedarkan pada wilayah Indonesia
- Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengelolaan produk pangan olahan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Adanya kerjasama yang baik antara UPT dengan pelaku usaha maupun lintas sektor dalam hal memastikan produk dan kegiatan peredaran dapat dilakukan dengan baik

Adapun hal dapat menjadi tantangan dan peluang dalam hal mencapai indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya jumlah sarana distribusi pangan olahan di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan sehingga perlu adanya pendekatan kembali kepada pelaku usaha dan lintas sektor di wilayah pengawasan terkait.
- Jumlah sumber daya manusia terutama di fungsi

pemeriksaan yang terbatas tidak mencukupi pada beban kerja yang ada.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan paparan pada poin sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembinaan kepada pelaku usaha harus terus menerus dilakukan. Baik itu pembinaan terkait cara distribusi yang baik maupun edukasi terhadap produk-produk yang boleh diedarkan di wilayah negara Indonesia. Kesadaran pelaku usaha untuk terus konsisten melakukan cara distribusi yang baik maupun memilih produk untuk dijual harus selalu ditingkatkan. Pelaku usaha sebaiknya tetap beri sosialisasi dan pengertian bahwa mereka juga turut andil dalam sistem pengawasan peredaran Pangan Olahan.

Selain itu perlu dilakukan kegiatan yang dapat meningkatkan capaian kinerja seperti:

- Sosialisasi SOP dan *refreshment* pedoman terkait pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan kepada masing-masing personil Fungsi Pemeriksaan.
- Melakukan pendekatan secara intensif kepada pelaku usaha maupun lintas sektor baik dilakukan secara langsung saat pemeriksaan atau dilakukan kegiatan sosialisasi terkait peraturan peredaran Pangan Olahan di Indonesia.

3.1.11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi tiap komoditi.

Persentase iklan Obat yang diawasi sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan
- b. Ketepatan waktu pelaporan

Persentase iklan OBA yang diawasi sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Ketepatan waktu pelaporan (30 HK setelah pengawasan)

- c. Akurasi pengambilan keputusan

Persentase iklan SK yang diawasi sesuai ketentuan dihitung berdasarkan:

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Ketepatan waktu pelaporan (30 HK setelah pengawasan)
- c. Akurasi pengambilan keputusan

Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan:

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan:

- a. Pemenuhan target pengawasan
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling
- c. Ketepatan waktu pelaporan (tanggal 10 bulan berikutnya)

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,44	95,75	96,29	Baik

Tabel 3.1.11.1 Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan II Tahun 2026, indikator kinerja tersebut memiliki target sebesar 99,44%. Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan, diperoleh realisasi sebesar 95,75% dengan capaian kinerja sebesar 96,29%, sehingga termasuk dalam kriteria “Baik”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan iklan telah dilaksanakan dengan cukup optimal dan sebagian besar hasil pengawasan telah diselesaikan serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, realisasi yang diperoleh masih

berada 3,04 poin persentase di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam meningkatkan ketepatan pelaksanaan pengawasan, penyelesaian hasil evaluasi, dokumentasi, serta tindak lanjut terhadap iklan yang belum memenuhi ketentuan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,83	95,75

Tabel 3.1.11.2 Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Apabila dibandingkan antartriwulan, realisasi indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik. Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator tercatat sebesar 88,83%, kemudian meningkat menjadi 95,75% pada Triwulan II. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Triwulan II semakin efektif, baik dalam hal pelaksanaan pemantauan, evaluasi kesesuaian iklan, penyelesaian hasil pengawasan, maupun tindak lanjut terhadap iklan yang tidak memenuhi ketentuan.

Meningkatnya realisasi pada Triwulan II juga mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pengawasan, termasuk pengaturan jadwal, pembagian tugas petugas, ketepatan proses penilaian, serta kelengkapan dokumentasi hasil pengawasan. Meskipun realisasi telah mencapai 96,10%, masih terdapat sebagian kecil pelaksanaan pengawasan yang perlu dioptimalkan agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,44%	95,75%	96,29%	 Akan Tercapai

Tabel 3.1.11.3 Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan target tahunan, indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan memiliki target tahunan sebesar 99,44%. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator tersebut mencapai 95,75%. Apabila dibandingkan dengan target tahunan, diperoleh capaian kinerja sebesar 96,29% dan termasuk dalam kategori “Akan Tercapai”. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan telah berjalan secara optimal dan sebagian besar kegiatan pengawasan telah dilaksanakan, dievaluasi, serta diselesaikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja yang diperoleh sebesar 96,29%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan iklan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat sebagian kegiatan atau hasil pengawasan yang belum sepenuhnya diselesaikan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas pemantauan, percepatan penyelesaian evaluasi, penguatan dokumentasi, serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan agar kekurangan capaian dapat dipenuhi dan target tahunan dapat tercapai pada periode berikutnya.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	iklan obat media lokal belum ada, sedangkan untuk iklan lainnya tidak ada kendala hanya belum di input ke SIPT	Silahkan untuk berkoordinasi mengenai berlangganan media cetak dan harap lebih diperhatikan lagi perihal timeline input SIPT	koordinasi mengenai langganan media cetak lokal dengan tata usaha dan komoditi yang belum tercapai akan di lanjutkan pengawasan pada bulan selanjutnya	TW 4	Y	S1	Keterbatasan dalam menemukan iklan sesuai target yang ditentukan

Tabel 3.1.11.4 Persentase iklan sediaan Farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Balikpapan dilakukan pada berbagai media seperti media cetak, online, elektronik, maupun luar ruang. Realisasi indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 96,10%, meningkat sebesar 7,27 poin persentase dibandingkan dengan realisasi Triwulan I sebesar 88,83%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan iklan, terutama dalam kegiatan pemantauan, penilaian kesesuaian materi iklan, penyelesaian hasil evaluasi, serta pendokumentasian hasil pengawasan.

Meskipun mengalami peningkatan dan memperoleh capaian kinerja sebesar 96,64% dengan kategori “Baik”, realisasi Triwulan II masih belum mencapai target tahunan sebesar 99,44%. Masih terdapat selisih sebesar 3,34 poin persentase antara realisasi dan target yang ditetapkan. Belum tercapainya target dapat dipengaruhi oleh masih ditemukannya iklan yang belum memenuhi ketentuan, seperti ketidaksesuaian informasi, pencantuman klaim

yang tidak tepat, ketidaklengkapan informasi wajib, atau penggunaan materi promosi yang belum sesuai dengan persetujuan produk. Faktor lain yang berpotensi menyebabkan belum optimalnya capaian adalah keterlambatan penyelesaian hasil evaluasi dan dokumentasi, belum meratanya pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan periklanan, serta perlunya koordinasi lebih lanjut terhadap iklan yang ditayangkan melalui media daring atau berada di luar kewenangan langsung UPT.

**e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Kegiatan yang menunjang peningkatan capaian antara lain:

1. penyusunan jadwal pengawasan secara berkala,
2. pembagian tugas petugas berdasarkan komoditas atau media yang diawasi,
3. peningkatan intensitas pemantauan terhadap iklan yang beredar melalui media cetak, elektronik, luar ruang, dan media daring.
4. koordinasi internal antarpetugas dalam membahas hasil pengawasan turut mendukung ketepatan penilaian, terutama terhadap iklan yang memerlukan kajian atau verifikasi lebih lanjut.

Meskipun capaian Triwulan II telah meningkat dan termasuk kategori “Baik”, realisasi sebesar 96,10% masih berada di bawah target tahunan sebesar 99,44%, dengan selisih 3,34 poin persentase. Belum tercapainya target dapat dipengaruhi oleh luasnya cakupan media yang harus diawasi, terutama perkembangan iklan digital yang sangat cepat dan dapat berubah atau dihapus dalam waktu singkat. Selain itu, banyaknya akun, platform, serta variasi materi promosi menyebabkan kegiatan pemantauan membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Proses klarifikasi kepada pelaku usaha, verifikasi status produk, dan koordinasi dengan unit lain juga dapat memperpanjang penyelesaian hasil pengawasan.

3.1.12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Pengawasan label produk tembakau dan atau produk rokok elektroni dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok elektronik. Pengawasan label dilakukan sesuai standar bearti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Adapun cara perhitungan realisasi yaitu;

1. Persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label
2. Persentase ketepatan waktu pelaporan label

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar	82,75	87,50	105,74	Sangat Baik

Tabel 3.1.12.1 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar mencapai 87,50% dari target yang telah ditetapkan sebesar 82,75%. Berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 105,74% dengan kriteria “Sangat Baik”. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan, ketepatan dalam penentuan objek pengawasan, serta komitmen petugas dalam memastikan pencantuman informasi pada label produk telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar	100	87,50

Tabel 3.1.12.2 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 yang mencapai 100%, realisasi Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar pada Triwulan II mengalami penurunan menjadi 87,50%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya keterlambatan penyampaian laporan hasil pengawasan dari Unit Pelaksana Teknis kepada unit pengampu di Badan POM pusat. Kondisi ini menyebabkan sebagian hasil pengawasan yang telah dilaksanakan belum dapat tercatat dan terverifikasi secara optimal pada periode pelaporan Triwulan II.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar	82,75%	87,50%	105,74 %	 Tercapai/ Melampaui

Tabel 3.1.12.3 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar

Balai POM di Balikpapan memiliki target pengawasan sebanyak 144 label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada Tahun 2026. Sampai dengan Triwulan II, pelaksanaan kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tahapan yang ditetapkan dalam rangka memenuhi target tahunan tersebut. Kegiatan pengawasan mencakup pemeriksaan kesesuaian pencantuman informasi pada label produk terhadap standar dan ketentuan yang berlaku. Meskipun pelaksanaan pengawasan di lapangan telah berjalan sesuai rencana, masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan hasil pengawasan kepada unit pengampu di Badan

POM pusat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian hasil pengawasan yang telah dilaksanakan belum tercatat dan diverifikasi pada periode pelaporan Triwulan II, sehingga memengaruhi nilai realisasi indikator kinerja. Capaian pada TW II melebihi 100% sehingga kategori yang diperoleh adalah “Tercapai/Melampaui”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	ketepatan waktu pelaporan belum memenuhi ekspektasi	melaksanakan pengawasan label sesuai dengan renlak dan target capaian	perbaikan ketepatan waktu pelaporan pengawasan di SIPT	TW 4	Y	O	Kurangnya ketepatan waktu pelaporan pengawasan

Tabel 3.1.12.4 Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar

Keberhasilan capaian indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar pada Triwulan II Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah berjalan sesuai dengan perencanaan, ketersediaan target dan objek pengawasan yang jelas, serta komitmen petugas dalam melaksanakan pemeriksaan kesesuaian label berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku.

Terjadi penurunan realisasi capaian pada TW II pada aspek pelaporan pengawasan ke BPOM Pusat. Akibatnya, sebagian hasil pengawasan yang sebenarnya telah dilaksanakan sesuai rencana belum dapat tercatat, diverifikasi, dan diperhitungkan secara optimal dalam periode pelaporan Triwulan II. Dengan demikian, penurunan realisasi lebih dipengaruhi oleh aspek administrasi dan ketepatan waktu pelaporan, bukan karena tidak terlaksananya kegiatan pengawasan di lapangan.

e. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Capaian Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang dapat menunjang maupun meningkatkan tercapainya Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar antara lain:

1. Peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan label
2. Melakukan pemantauan secara lebih intensif terhadap progres pengawasan dan penyusunan laporan, percepatan penyelesaian dokumen pendukung, serta penguatan pengendalian internal terhadap batas waktu penyampaian laporan.
3. Melakukan peningkatan koordinasi dengan unit pengampu di Badan POM pusat untuk memastikan kelengkapan dan status pelaporan hasil pengawasan.

3.1.13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, dengan proporsi komponen masing-masing 25% yaitu:

1. Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2. Dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan.
3. Pelaksanaan Bimtek (B)
4. Dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
5. Pelaksanaan Advokasi (C)
6. Dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.
7. Pelaksanaan Publikasi (D)

8. Dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	Dinilai pada akhir tahun

Tabel 3.1.13.1 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di Wilayah Unit Pelaksana Teknis merupakan indikator yang pengukurannya dilakukan secara kumulatif setelah seluruh rangkaian kegiatan pengendalian AMR dilaksanakan sampai dengan akhir tahun. Oleh karena itu, pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi dan capaian indikator tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena pelaksanaan kegiatan masih berlangsung dan belum seluruh target tahunan terpenuhi. Penilaian terhadap indikator ini baru dapat dilakukan setelah seluruh data hasil pelaksanaan kegiatan terkumpul, diverifikasi, dan direkapitulasi secara menyeluruh pada akhir periode tahun berjalan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-

Tabel 3.1.13.2 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Penilaian capaian baru dapat dilaksanakan setelah seluruh kegiatan selesai, data dukung terkumpul secara lengkap, dilakukan verifikasi, serta hasil pelaksanaan direkapitulasi pada akhir tahun. Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi indikator tersebut terhadap target tahunan belum dapat dihitung dan dinilai capaiannya secara definitif.

Dengan demikian, capaian Triwulan II belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I karena pada kedua periode tersebut belum dilakukan pengukuran akhir terhadap indikator. Meskipun capaian belum dapat diukur, Balai POM di Balikpapan tetap melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres kegiatan untuk memastikan seluruh tahapan pengendalian AMR terlaksana sesuai rencana dan mendukung pencapaian target tahunan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan.

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	- %	- %	-

Tabel 3.1.13.3 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dihitung berdasarkan Penggunaan Tools AMR, Pelaksanaan Bimtek, Advokasi, dan Publikasi. Sampai TW II, penggunaan tools AMR telah rutin dilaksanakan oleh petugas ketika melakukan pemeriksaan ke sarana pelayanan kefarmasian. Pelaksanaan advokasi akan dilaksanakan oleh Kepala Balai POM di Balikpapan secara bertahap. Publikasi terkait hasil pengawasan antimikroba di wilayah Balai POM di Balikpapan juga telah dirilis melalui akun instagram bpom.balikpapan pada TW II. Sementara bimbingan teknis terkait penggunaan antimikroba direncanakan untuk dilaksanakan pada TW IV. Tidak ditemukan kendala yang berarti saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, keberhasilan, kegagalan, peningkatan, maupun penurunan kinerja pada indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di Wilayah Unit Pelaksana Teknis belum dapat dianalisis secara definitif. Hal ini disebabkan pengukuran indikator tersebut dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh rangkaian kegiatan pengendalian AMR selesai dilaksanakan, seluruh data dukung terkumpul, serta dilakukan verifikasi dan rekapitulasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian AMR tetap berjalan sesuai dengan tahapan dan rencana kerja yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan antara lain adanya perencanaan kegiatan yang jelas, koordinasi dengan petugas dan pihak terkait, pelaksanaan pemantauan terhadap progres kegiatan, serta pengumpulan data dan dokumen pendukung secara bertahap.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di Wilayah Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pengawasan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan secara terencana sepanjang tahun. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Koordinasi dengan dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, apoteker, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan antibiotik secara rasional dan mendukung upaya pengendalian resistensi antimikroba.
2. Refreshment penggunaan tools pemeriksaan AMR kepada petugas
3. Penguatan koordinasi internal antarpetugas, pembagian tugas yang jelas, dan pengendalian terhadap jadwal pelaksanaan dan pelaporan turut mendukung ketepatan waktu penyelesaian kegiatan.

3.1.14 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Balikpapan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pada triwulan II tahun 2026, target nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Balikpapan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 6,9. Sedangkan untuk target tahunan sebesar 9. Realisasi triwulan II nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Balikpapan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 7,58. Persentase nilai capaian indikator terhadap target bulanan/triwulan sebesar 109,86% dengan kriteria “Sangat Baik”. Pencapaian sasaran kegiatan ini menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan olahan di wilayah kerja UPT	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,9	7,58	109,86%	Sangat Baik

Tabel 3.1.14.1 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pelaksanaan pengukuran nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berdasarkan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM. Standar Kemampuan Laboratorium dibagi menjadi tiga komponen yaitu,

1. Standar Ruang Lingkup (75%)
2. Standar Peralatan (15%)
3. Standar Kompetensi Laboratorium (10%)

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan 3 komponen tersebut, Realisasi Triwulan II tahun 2026 nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 7,58 dan target triwulan II adalah 6,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi triwulan II tercapai/melampaui rencana target triwulan II tahun 2026. Untuk persentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 109,86% dan dikategorikan “Sangat Baik”.

Untuk mempertahankan capaian, Balai POM di Balikpapan akan melaksanakan tiga komponen Standar Kemampuan Laboratorium sesuai rencana pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Diharapkan pada triwulan berikutnya, capaian ini dapat dipertahankan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6,34	7,58

Tabel 3.1.14.1 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Berdasarkan perbandingan realisasi antar triwulan, indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium menunjukkan kinerja yang semakin meningkat. Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi indikator 6,34 dan pada Triwulan II realisasi sebesar 7,58. Terdapat peningkatan sebanyak 1,24. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium telah berjalan sesuai dengan rencana dari pemenuhan ruang lingkup maupun kompetensi laboratorium.

c. Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	Capaian%	Kategori
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9	7,58	84,22	 Akan Tercapai

Tabel 3.1.14.3 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Apabila realisasi nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang dilaksanakan di triwulan II dibandingkan dengan target tahunannya yaitu 9 maka didapat capaian kinerja sebesar 84,22% dan mendapat kategori “Akan Tercapai”. Hal itu wajar terjadi karena capaian bersifat akumulasi dan saat ini triwulan II baru selesai dilewati.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Capaian dari nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang dilaksanakan berada di kategori Sangat Baik. Capaian tersebut disebabkan oleh terpenuhinya standar ruang lingkup, standar peralatan dan standar kompetensi laboratorium. Penilaian ketiga standar tersebut menggunakan matriks khusus penilaian Standar Kemampuan Laboratorium dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN). Laboratorium Balai POM di Balikpapan termasuk dalam tier 2.

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana (peralatan dan bangunan) untuk melakukan pengujian secara kimia dan mikrobiologi yang sesuai dengan laboratorium tingkat 2.	Melanjutkan kegiatan sesuai renlak	Mengusulkan pengadaan peralatan laboratorium serta penyewaan gedung laboratorium dalam perencanaan anggaran Tahun 2027. Untuk saat ini Balai POM di Balikpapan melakukan pengujian dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.	Desember 2026	Y	S18S19	- Keterbatasan peralatan laboratorium di BPOM Balikpapan - Ruangan Laboratorium belum memenuhi syarat untuk pengujian laboratorium Tier 2 setingkat Balai POM.

Tabel 3.1.14.4 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Berdasarkan matriks rekomendasi triwulan di atas, rekomendasi perbaikan kinerja ke depan dengan melaksanakan pengujian sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ada. Sedangkan untuk menyelesaikan kendala belum lengkapnya sarana prasarana laboratorium akan dibuat usulan pengadaan peralatan laboratorium serta penyewaan gedung laboratorium dalam perencanaan anggaran Tahun 2027. Untuk saat ini Balai POM di Balikpapan melakukan pengujian dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Komponen standar ruang lingkup (bobot 75%) didapatkan nilai 4,28% . Nilai tersebut merupakan rata-rata dari SRL kimia (8.55) dan mikrobiologi (0). Pada triwulan II standar ruang lingkup komoditi pangan Balai POM di Balikpapan memenuhi realisasi pada komoditi obat dan NAPPZA yaitu verifikasi metode analisis untuk zat aktif Kandesartan, Piroxicam dan Paracetamol. Berdasarkan matriks yang diberikan oleh PPPOMN berikut untuk komponen standar ruang

lingkup :

No	Laboratorium	Persentase Pemenuhan SRL (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Obat	17.59	20,18	0.00	0.00
2	Kosmetik	0.00	0,00	0.00	0.00
3	OTSK	0.00	0,00	0.00	0.00
4	Pangan	14.04	14,04	0.00	0.00
Rata-rata Kimia		7.91	7.91	8,55	0.00
5	Mikrobiologi	0.00	0,00	0.00	0.00

Tabel 3.1.14.5 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Komponen standar kompetensi laboratorium (bobot 10%) di triwulan II aspek untuk laboratorium pangan dan obat terpenuhi dan masing-masing mendapatkan nilai sebesar 20% sehingga secara keseluruhan standar kompetensi laboratorium menyumbang nilai 40%. Penentuan aspek 1 dan 2 terpenuhi atau tidak adalah jumlah penguji yang dapat menguji parameter tersebut. Jika lebih dari 1 penguji maka aspek 2 mendapatkan nilai 10. Jika hanya 1 penguji maka hanya aspek 1 yang mendapatkan nilai 10.

Berdasarkan matriks yang diberikan oleh PPPOMN berikut perhitungan untuk standar kompetensi laboratorium :

No	Laboratorium	Persentase Pemenuhan Kompetensi Laboratorium (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Obat	20.00	40.00	0.00	0.00
2	Kosmetik				
3	OTSK				
4	Pangan				
Rata-rata Kimia					
5	Mikrobiologi				

Tabel 3.1.14.6 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Komponen ketiga untuk standar peralatan Balai POM di Balikpapan masih hanya memenuhi standar alat kimia. Namun belum semua standar peralatan kimia sudah terpenuhi, yaitu hanya sebesar 50% dari baseline yang sudah terpenuhi. Selain itu pada triwulan III juga sudah dilakukan verifikasi 3 zat aktif yang baru. Sedangkan untuk standar alat mikrobiologi Balai POM di Balikpapan masih belum memenuhi standar. Kedua hal itu disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja modal Balai POM di Balikpapan.

No	Laboratorium	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Obat	5.00	5.00		
2	Kosmetik				
3	OTSK				
4	Pangan				
	Rata-rata Kimia				
5	Mikrobiologi	0.00			

Tabel 3.1.14.7 Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Berdasarkan hasil ketiga komponen tersebut maka realisasi triwulan II untuk Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium masih dapat dipertahankan di kategori “Sangat Baik”.

3.1.15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan Pendampingan yang dilakukan meliputi:

1. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah;
2. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;
3. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.
4. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
5. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) sesuai ketentuan
6. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Tahapan dan jadwal pelaksanaan pendampingan Kabupaten Kota Pangan Aman yaitu:

No.	Tahapan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
1.	Advokasi ke Seluruh Kabupaten/Kota	Januari-April
2.	Penyeleksian Kabupaten/Kota yang akan didampingi	Februari-April
3.	Pendampingan Kab/Kota baru	Februari-Juli
4.	Pengawalan - Kab/Kota yang telah memenuhi ketentuan - Kab/Kota yang belum memenuhi ketentuan	Februari-Juli
5.	Pelaporan	Juni-Agustus

**a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II
Tahun 2026**

Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-

Tabel 3.1.15.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman

Indikator kinerja "Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman" merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga tidak ditetapkan target maupun realisasi pada Triwulan II. Pelaksanaan pendampingan terhadap kabupaten/kota dilakukan secara bertahap sepanjang tahun sesuai tahapan program Kabupaten/Kota Pangan Aman, sedangkan pengukuran capaian indikator baru dapat dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan pendampingan, verifikasi, dan penilaian selesai pada akhir tahun. Oleh karena itu, nilai realisasi akan disampaikan pada laporan kinerja akhir tahun setelah dilakukan penghitungan terhadap capaian indikator tersebut.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya (Triwulan I Tahun 2026)

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-

Tabel 3.1.15.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman dengan target tw

Capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada Triwulan II Tahun 2026 tetap sama seperti pada Triwulan I Tahun 2026. Hal ini disebabkan indikator tersebut merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga belum ditetapkan target maupun realisasi pada setiap triwulan. Pendampingan kepada kabupaten/kota dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun, sedangkan pengukuran capaian indikator baru dapat dilakukan setelah seluruh tahapan pendampingan, verifikasi, dan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman selesai pada akhir tahun. Oleh karena itu, tidak terdapat perubahan capaian antara Triwulan I dan Triwulan II, dan nilai realisasi akan ditetapkan pada laporan kinerja akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66.67	-	-	-

Tabel 3.1.15.3 Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman

Pada indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, realisasi Triwulan II belum dapat dibandingkan dengan target tahunan Tahun 2026 sebesar 66,67% karena pada periode ini belum terdapat data realisasi yang dapat diukur. Hal ini disebabkan indikator tersebut merupakan indikator dengan target tahunan,

sehingga pengukuran capaian baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh tahapan pendampingan, verifikasi, dan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman selesai dilaksanakan. Karakteristik indikator ini memerlukan proses pendampingan yang bersifat bertahap, berkelanjutan, serta membutuhkan waktu untuk melihat hasil pencapaian pada kabupaten/kota yang didampingi. Oleh karena itu, target tahunan sebesar 66,67% akan dievaluasi pada akhir tahun anggaran setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pelaksanaan kegiatan Balai POM di Balikpapan keberhasilan sementara ini didukung oleh perencanaan tahapan kegiatan yang sistematis, dimulai dari advokasi, seleksi, pendampingan, pengawalan hingga pelaporan. Kegiatan advokasi pada Januari–April menjadi faktor kunci dalam membangun pemahaman dan komitmen pemerintah kabupaten/kota, yang selanjutnya memperlancar proses penyeleksian daerah dampingan pada Februari–April. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat pencapaian pernyataan kinerja. Variasi tingkat kesiapan antar kabupaten/kota, baik dari aspek SDM, dukungan anggaran, maupun komitmen lintas sektor, menyebabkan efektivitas program pendampingan tidak merata. Program yang seharusnya memperkuat koordinasi lintas sektor juga belum berjalan maksimal di beberapa wilayah, sehingga berdampak pada lambatnya implementasi kegiatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Balai POM di Balikpapan melakukan langkah strategis berupa pemetaan tingkat kesiapan daerah sebagai dasar penentuan prioritas intervensi program, optimalisasi pendampingan secara hybrid untuk menjangkau seluruh wilayah secara lebih efektif, serta penguatan koordinasi lintas sektor melalui komunikasi intensif dan forum koordinasi berkala. Selain itu, dilakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan melalui penetapan timeline yang lebih terstruktur dan pemberian reminder kepada pemerintah daerah agar penyampaian data dukung dapat tepat waktu.

Sebagai rekomendasi perbaikan, diperlukan penguatan advokasi lanjutan guna menjaga konsistensi komitmen daerah, penyusunan strategi

pendampingan berbasis risiko dengan fokus pada daerah yang belum memenuhi ketentuan, serta pengembangan sistem monitoring progres yang lebih terintegrasi.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman didukung dengan komitmen dari Kepala Balai POM di Balikpapan beserta tim pendampingan Kabupaten Kota Pangan Aman serta seluruh lintas sektor terkait. Balai POM di Balikpapan melakukan langkah strategis berupa pemetaan tingkat kesiapan daerah sebagai dasar penentuan prioritas intervensi program, optimalisasi pendampingan secara hybrid untuk menjangkau seluruh wilayah secara lebih efektif, serta penguatan koordinasi lintas sektor melalui komunikasi intensif dan forum koordinasi berkala

Internal Process Perspective

SS2

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan

3.2 SASARAN KEGIATAN 2

Sasaran strategis Meningkatkan Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan memiliki 4 indikator yaitu Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT, Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Pada triwulan II tahun 2026, semua target bulanan indikator pada sasaran kegiatan 3 sudah tercapai kecuali Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT. Sedangkan untuk capaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT, Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas semua memenuhi kriteria “Baik”. Perincian capaian sasaran kegiatan ini untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut

3.2.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian%	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kota Balikpapan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	91,59	85,91	93,80 %	Baik

Tabel 3.2.1.1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan

Realisasi triwulan II tahun 2026 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di lingkup UPT adalah 85,91 dan target triwulan II adalah 91,59 sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi triwulan II belum melampaui rencana target triwulan II tahun 2026. Sedangkan untuk persentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 93,80% dan dikategorikan “Baik”.

Pelaksanaan pengukuran atas Tingkat KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif menggunakan tools pada link yang telah disiapkan oleh Biro Hukum dan Organisasi terhadap responden yang pernah mengikuti atau menerima KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui tatap muka dan berbagai media dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jumlah sampel minimal responden disesuaikan dengan jumlah populasi target peserta KIE dan dihitung menggunakan tabel Krejcie and Morgan. Pengukuran indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 (empat) aspek yaitu penilaian masyarakat terhadap aspek sumber/narasumber KIE, konten/informasi KIE, pemahaman audiens KIE dan manfaat KIE bagi audiens KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektifitas KIE yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi, nilai efektifitas KIE Balai POM di Balikpapan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 85,91 dengan target tahun 2026 yaitu sebesar 91,59 sehingga persentase capaian kinerja indikator ini

sebesar 93,80% dengan kategori “Baik”. Nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan cukup efektif.

Untuk meningkatkan capaian, Balai POM di Balikpapan akan menyediakan materi dan sarana KIE yang lebih mudah dipahami oleh semua kategori masyarakat. Diharapkan pada triwulan berikutnya, capaian ini dapat ditingkatkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,91	83,67

Tabel 3.1.2.2 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan

Apabila realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan II yang dilaksanakan dibandingkan dengan realisasi triwulan I maka menunjukkan kinerja yang mulai meningkat sebesar 1,43. Namun peningkatan ini masih belum dapat melampaui target bulanan yaitu 91,59.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,59	85,91	93,80	 Akan Tercapai

Tabel 3.1.2.3 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan

Apabila realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan di triwulan II dibandingkan dengan target tahunannya yaitu 91,59 maka didapat capaian kinerja sebesar 93,80% dan mendapat kategori “Akan

Tercapai”. Hal itu terjadi karena capaian bersifat akumulasi dan saat ini triwulan II baru selesai dilewati.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Aspek pemahaman audiens pada KIE tatap muka dan media serta manfaat pada KIE media belum mencapai target	KIE Media bisa dilaksanakan dalam bentuk video podcast dengan narasumber dari fungsi lain secara bergilir	Melaksanakan KIE sesuai rencana pelaksanaan dengan pemberian materi yang lebih menarik dan mudah dipahami	December 2026	Y	S22	Minat Masyarakat dalam mengikuti Komunikasi, Informasi dan Edukasi masih belum sesuai target

Tabel 3.1.2.4 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di

Balikpapan

Capaian dari Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan berada di kategori Baik. Namun jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II masih belum melampaui target.

Belum tercapainya target indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan II Tahun 2026 dapat disebabkan oleh belum optimalnya proses penerimaan informasi kepada masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa aspek narasumber/sumber informasi dan konten/informasi telah memperoleh nilai yang baik, sedangkan aspek pemahaman audiens dan manfaat KIE masih menjadi aspek dengan nilai terendah baik pada KIE tatap muka maupun media. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa informasi telah diterima oleh masyarakat, namun belum sepenuhnya dipahami maupun diterapkan sehingga manfaatnya belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan KIE pada Triwulan II lebih didominasi oleh media digital dibandingkan kegiatan tatap muka. Meskipun media digital efektif dalam menjangkau masyarakat secara luas, penyampaian informasi melalui media tersebut memiliki keterbatasan dalam membangun komunikasi dua arah yang dapat memperkuat pemahaman audiens. Di sisi lain, kegiatan tatap muka yang lebih memungkinkan terjadinya diskusi dan klarifikasi hanya

dilaksanakan dalam jumlah yang terbatas.

Karakteristik materi KIE yang sebagian besar berupa edukasi preventif, seperti Cek KLIK, keamanan obat dan makanan, KIPI pasca vaksinasi, dan layanan BPOM, juga berpengaruh terhadap penilaian aspek manfaat. Manfaat dari materi tersebut umumnya baru dapat dirasakan setelah masyarakat menerapkan informasi yang diterima dalam aktivitas sehari-hari, sehingga pada saat survei dilakukan sebagian responden belum dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Realisasi Indeks efektivitas KIE pada triwulan I belum melampaui target . Berdasarkan pelaksanaan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan pada Triwulan I Tahun 2026 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan, kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya telah mampu menjangkau jumlah responden sesuai target yang ditetapkan. Namun demikian, hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat efektivitas KIE belum mencapai target kinerja, khususnya pada aspek pemahaman audiens dan persepsi manfaat.

Pada Triwulan II Tahun 2026, upaya pencapaian indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan didukung melalui pelaksanaan kegiatan KIE secara tatap muka dan media digital. Kegiatan tatap muka dilaksanakan melalui 1 (satu) kali penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan KIE media dilakukan melalui publikasi informasi pada media sosial Balai POM di Balikpapan dan website resmi yang memuat informasi mengenai Cek KLIK, keamanan obat dan makanan, KIPI pasca vaksinasi, serta layanan BPOM.

Meskipun seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai rencana, hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian indikator masih berada di bawah target. Hal tersebut terlihat dari nilai Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka sebesar 82,44 yang masih berada pada kategori Cukup Efektif, sedangkan Indeks Efektivitas KIE Media telah mencapai 89,38 atau kategori Efektif. Berdasarkan hasil evaluasi, aspek yang masih memerlukan penguatan baik pada KIE tatap muka maupun media adalah pemahaman audiens dan

manfaat KIE. Hal ini menunjukkan bahwa program KIE yang telah dilaksanakan telah mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun belum sepenuhnya meningkatkan pemahaman maupun mendorong penerapan informasi dalam kehidupan sehari-hari.

3.2.2 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kota Balikpapan	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	95%	95%	100%	Baik

Tabel 3.2.2.1 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan salah satu kegiatan Program Prioritas Nasional. Realisasi Triwulan II tahun 2026 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah 95% dan target triwulan II adalah 95% sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi Triwulan II sudah mencapai rencana target triwulan II tahun 2026. Sedangkan untuk persentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 100% dan dikategorikan “Baik”.

Pelaksanaan pengukuran atas Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan menggunakan kesepakatan target dengan unit pengampu indikator kinerja yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Terdapat beberapa tahapan kegiatan untuk Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yaitu:

No	Tahapan Pelaksanaan	Bobot
1.	Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah)	25%
2.	Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20%
3.	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%
4.	Monitoring dan Sertifikasi	25%
5.	Pengawasan	5%

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah koordinasi lintas sektor Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah) dengan Bupati, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara dll. Berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan, realisasi IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada triwulan II tahun 2026 sebesar 5% dengan target triwulan II yaitu sebesar 95% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	95%	5%

Tabel 3.2.2.2 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Target tahunan Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan

Keamanan Pangan sebanyak 1 sekolah. Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan, telah terlaksana beberapa kegiatan yaitu Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah), Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Apabila realisasi IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang dilaksanakan di triwulan II dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya (TW I), maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 5% ke 95%. Hal ini disebabkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini yang tepat waktu. Program ini terdiri dari 2 batch. Apabila ingin memilih batch 1 maka bulan Juni seluruh rangkaian kegiatan harus sudah selesai kecuali tahapan pengawalan. Balai POM di Balikpapan memilih batch 1 sehingga pada bulan Juni 95% tahapan telah terselesaikan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	1	95%	95,00	 Akan Tercapai

Tabel 3.2.2.3 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Apabila realisasi IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang dilaksanakan di triwulan II dibandingkan dengan target tahunannya yaitu 1 sekolah maka masih belum dapat dibandingkan. Karena target tahunan menggunakan satuan jumlah sekolah dan realisasi triwulan II menggunakan satuan persen. Realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2026 pada bagian ini akan dapat dibandingkan di akhir tahun. Angka 95% merupakan progres realisasi target 1 Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada di triwulan II sudah mencapai 95%. Oleh karena itu capaian kinerja sebesar 95% dan mendapat kategori “Akan Tercapai”. Hal itu terjadi karena masih ada satu tahapan lagi yaitu pengawalan yang akan dilakukan pada bulan Juli.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Indikator Kinerja	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak ada kendala	Pengawasan desa dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan sekolah pada bulan Juli	Pelaksanaan tahap pengawasan sekolah intervensi tahun sebelumnya akan dilaksanakan pada bulan Juli	July 2026	Y	S23	Kader keamanan pangan jajanan anak sekolah tidak melaksanakan program yang ditetapkan

Tabel 3.2.2.4 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berada di kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II sudah mencapai target. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026, Sosialisasi Keamanan Pangan pada tanggal 29 April 2026, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah sekaligus Pemberian Paket Edukasi tanggal 30 April 2026, serta Monitoring dan Sertifikasi pada tanggal 21 Mei 2026 dan 17 Juni 2026. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya upaya dari tim Balai POM di Balikpapan untuk melakukan koordinasi dengan Bupati Penajam Paser Utara sebagai pemimpin tertinggi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan lintas sektor terkait seperti Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah dan Dinas Pendidikan Wilayah III Kalimantan Timur. Pihak Pemerintah Daerah juga berkomitmen untuk mensukseskan program ini dengan memberikan rekomendasi sekolah dan juga memberikan fasilitas daerah untuk melaksanakan program kedepannya.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II adalah

Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 28 April 2026, Sosialisasi Keamanan Pangan pada tanggal 29 April 2026, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah sekaligus Pemberian Paket Edukasi tanggal 30 April 2026, serta Monitoring dan Sertifikasi pada tanggal 21 Mei 2026 dan 17 Juni 2026. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah terlaksananya rangkaian kegiatan pembinaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (SAPA Sekolah) secara terencana dan berkesinambungan. Keberhasilan diawali dengan pelaksanaan advokasi lintas sektor yang mampu membangun komitmen, dukungan, dan sinergi antara Balai POM di Balikpapan dengan perangkat daerah serta instansi terkait dalam mendukung implementasi program di sekolah. Kesamaan persepsi mengenai tujuan, peran, dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi faktor penting dalam kelancaran pelaksanaan program.

Selain itu, kegiatan sosialisasi keamanan pangan berhasil meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya penerapan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Pemahaman tersebut kemudian diperkuat melalui bimbingan teknis kepada Kader Keamanan Pangan Sekolah yang disertai dengan pemberian paket edukasi, sehingga kader memiliki pengetahuan, keterampilan, dan media yang memadai untuk melaksanakan edukasi serta mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah masing-masing.

Keberhasilan program juga didukung oleh pelaksanaan monitoring dan sertifikasi sebagai bentuk evaluasi terhadap penerapan keamanan pangan di sekolah. Kegiatan ini memberikan pembinaan secara langsung terhadap kendala yang dihadapi sekolah, memastikan kesesuaian penerapan dengan standar yang ditetapkan, serta mendorong sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Sinergi yang baik antara Balai POM di Balikpapan, pemerintah daerah, pihak sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan, disertai koordinasi yang berkesinambungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan pencapaian indikator kinerja program.

3.2.3 Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kota Balikpapan	Jumlah Desa Pangan Aman	90%	90%	100%	Baik

Tabel 3.2.3.1 Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman merupakan salah satu kegiatan Program Prioritas Nasional. Realisasi triwulan II tahun 2026 Jumlah Desa Pangan Aman adalah 90% dan target triwulan II adalah 90% sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi sudah mencapai rencana target. Sedangkan untuk persentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 100% dan dikategorikan “Baik”.

Pelaksanaan pengukuran atas Jumlah Desa Pangan Aman menggunakan kesepakatan target dengan unit pengampu indikator kinerja yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Terdapat beberapa tahapan kegiatan untuk Desa Pangan Aman yaitu :

No	Tahapan Pelaksanaan	Bobot
1.	Advokasi Kelembagaan Desa	25%
2.	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	25%
3.	Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa	20%
4.	Monitoring dan Evaluasi	20%
5.	Pengawasan	10%

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Kelembagaan Desa pada tanggal 28 April 2026, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa pada tanggal 19 Mei 2026, Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa pada tanggal 20 Mei 2026, serta Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman pada tanggal 18 Juni 2026. Berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan, realisasi IKU Jumlah Desa Pangan Aman pada triwulan II tahun 2026 sebesar 900% dengan target triwulan II yaitu sebesar 90% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I
Jumlah Desa Pangan Aman	90%	5%

Tabel 3.2.3.2 Jumlah Desa Pangan Aman

Target tahunan Jumlah Desa Pangan Aman sebanyak 1 desa/kelurahan. Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan, telah terlaksana beberapa kegiatan yaitu Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa serta Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman. Apabila realisasi IKU Jumlah Desa Pangan Aman yang dilaksanakan di triwulan II dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya (TW I), maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 5% ke 90%. Hal ini disebabkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini yang tepat waktu. Program ini terdiri dari 2 batch. Apabila ingin memilih batch 1 maka bulan Juni seluruh rangkaian kegiatan harus sudah selesai kecuali tahapan pengawalan. Balai POM di Balikpapan memilih batch 1 sehingga pada bulan Juni 90% tahapan telah terselesaikan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
-------------------	-------------------	-----------------	---------	----------

Jumlah Desa Pangan Aman	1	90%	-	 Akan Tercapai
-------------------------	---	-----	---	--

Tabel 3.2.3.3 Jumlah Desa Pangan Aman

Target tahunan Jumlah Desa Pangan Aman sebanyak 1 desa/kelurahan. Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan, telah terlaksana 4 tahapan dari total 5 tahapan yaitu Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa, serta Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman. Apabila realisasi IKU Jumlah Desa Pangan Aman yang dilaksanakan di triwulan II dibandingkan dengan target tahunannya yaitu 1 desa/kelurahan maka masih belum dapat dibandingkan. Karena target tahunan menggunakan satuan jumlah desa/kelurahan dan realisasi triwulan II masih menggunakan satuan persen. Realisasi kinerja triwulan II dengan target tahun 2026 pada bagian ini akan dapat dibandingkan di akhir tahun. Capaian 95% merupakan progres capaian menuju target tahunan yaitu 1 desa/kelurahan. Sehingga pada triwulan II kategori masih di “Akan Tercapai”.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Jumlah Desa Pangan Aman	Sarana dan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan kurang memadai	Pengawasan desa dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan sekolah	Pelaksanaan tahapan pengawasan desa intervensi tahun sebelumnya dilaksanakan di bulan Juli sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan	July 2026	Y	S24	Tim KPD dan Kader keamanan pangan desa tidak melaksanakan program yang ditetapkan

Tabel 3.2.3.4 Jumlah Desa Pangan Aman

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Jumlah Desa Pangan Aman berada di kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target maka realisasi triwulan II sudah mencapai target. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Kelembagaan Desa pada tanggal 28 April 2026, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa pada tanggal 19 Mei 2026, Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa pada tanggal 20 Mei 2026, serta Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman pada tanggal 18 Juni 2026. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya komunikasi yang terjalin berkesinambungan antara Balai POM di Balikpapan, kelurahan yang diintervensi, serta organisasi perangkat daerah yang membidangi pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara .

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja ditunjang dengan keberhasilan pelaksanaan tahapan kegiatan yaitu Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa, serta Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman. Melalui tahapan kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2026 didapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang disampaikan langsung oleh Bupati Penajam Paser Utara terkait pelaksanaan Program Desa Pangan Aman. Tahapan selanjutnya yaitu Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa yang dilaksanakan secara berturut-turut pada 19 dan 20 Mei 2026 terlaksana karena adanya dukungan dari kelurahan yang diintervensi melalui pembentukan Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa. Tim Keamanan Pangan Desa bersama dengan Kader Keamanan Pangan Desa yang terbentuk kemudian menetapkan komunitas yang kemudian dilakukan Bimbingan Teknis Untuk Komunitas Desa. Melalui kerjasama yang terjalin antara Balai POM di Balikpapan, Tim Keamanan

Pangan Desa, dan Kader Keamanan Pangan Desa pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis untuk Komunitas Desa menjadi tepat sasaran dan terlaksana dengan baik. Selain itu, dalam upaya memastikan program berjalan secara berkelanjutan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman. Melalui Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman, ditetapkan rencana aksi program keamanan pangan di kelurahan yang diintervensi sebagai keberlanjutan program Desa Pangan Aman. Selain itu pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman juga didapat masukan dan saran dari organisasi perangkat daerah yang membidangi pengawasan keamanan pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.2.4 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kota Balikpapan	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100 %	100%	100%	Baik

Tabel 3.2.4.1 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan salah satu kegiatan Program Prioritas Nasional. Realisasi triwulan II tahun 2026 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah 100% dan target triwulan II adalah 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi

sudah mencapai rencana target. Sedangkan untuk persentase capaian terhadap target triwulan II sebesar 100% dan dikategorikan “Baik”.

Pelaksanaan pengukuran atas Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas menggunakan kesepakatan target dengan unit pengampu indikator kinerja yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Terdapat beberapa tahapan kegiatan untuk Pasar Pangan Aman yaitu :

No	Tahapan Pelaksanaan	Bobot
1.	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%
2.	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi	20%
5.	Pengawasan	10%

Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan. Berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan realisasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada triwulan I tahun 2026 sebesar 100% dengan target triwulan II yaitu sebesar 100% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 10% dengan kategori “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	Realisasi TW II	Realisasi TW I
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100%	10%

Tabel 3.2.4.2Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Target tahunan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 pasar. Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan, telah terlaksana semua kegiatan yaitu Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi dan Pengawalan. Apabila realisasi IKU Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan di triwulan II dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya (TW I), maka terdapat peningkatan yang signifikan dari 10% ke 100%. Hal ini disebabkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini yang tepat waktu. Program ini terdiri dari 2 batch. Apabila ingin memilih batch 1 maka bulan Juni seluruh rangkaian kegiatan harus sudah selesai. Balai POM di Balikpapan memilih batch 1 sehingga pada bulan Juni 100% tahapan telah terselesaikan tepat waktu.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	100%	100%	 Tercapai/M elampaui

Tabel 3.2.4.3Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Target tahunan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak

1 pasar. Berdasarkan tahapan kegiatan yang telah dilakukan, telah terlaksana semua tahapan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Apabila realisasi IKU Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan di triwulan II dibandingkan dengan target tahunannya yaitu 1 pasar sudah dapat dibandingkan. Karena target tahunan menggunakan satuan jumlah pasar dan realisasi triwulan II persentase capaian sudah 100%. Sehingga pada triwulan I kategori masih di "Tercapai/Melampaui".

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1. Lintas Sektor (OIKN) belum membuat rencana aksi tahun 2027 karena terdapat penyesuaian program kerja di OIKN dan anggaran tahun 2027. 2. Terdapat kendala input laporan pada aplikasi SI PAMAN sehingga pelaporan kegiatan terlambat	Komunikasikan dengan OIKN terkait rencana aksi	1. Berkoordinasi dengan lintas sektor 2. Berkomunikasi kepada PIC aplikasi SI PAMAN, Melaporkan laporan secara manual 2. Melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap kendala yang terjadi pada aplikasi SI PAMAN, kemudian berkoordinasi dengan pengelola aplikasi atau unit teknis terkait untuk memperoleh penyelesaian. Sebagai langkah mitigasi, data dan dokumen pendukung kegiatan perlu disiapkan serta diarsipkan secara lengkap melalui media alternatif agar	July 2026	Y	S25	Fasilitator Pasar dan pengelola pasar tidak menjalankan program keamanan pangan

				dapat segera diinput setelah aplikasi kembali normal.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Tabel 3.2.4.4Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Berdasarkan sajian data di atas, maka terlihat bahwa capaian dari Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berada di kategori Baik. Jika dibandingkan dengan target bulanan maka realisasi triwulan II sudah mencapai target. Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Pengawasan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk pasar yang telah diintervensi pada tahun 2025 yaitu Pasar Segar Sepaku. Penyebab keberhasilan indikator kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara Balai POM di Balikpapan dengan pihak pasar yang kooperatif.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi secara berkelanjutan dengan lintas sektor, khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dalam rangka penyelarasan program kerja dan penyusunan rencana aksi tahun 2027. Koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebijakan, prioritas, dan ketersediaan anggaran pada masing-masing instansi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan didukung oleh pemantauan dan evaluasi secara berkala, pengumpulan data serta dokumen pendukung kegiatan, dan pelaporan melalui aplikasi SI PAMAN. Meskipun terdapat kendala teknis dalam proses penginputan laporan dan belum ditetapkannya rencana aksi OIKN tahun 2027, kegiatan yang telah dilaksanakan tetap didokumentasikan secara tertib sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Upaya komunikasi dengan pengelola aplikasi serta koordinasi intensif dengan lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengatasi

kendala, mempercepat penyelesaian pelaporan, dan menjaga keberlanjutan pencapaian target kinerja

Internal Process Perspective

SS3

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

3.3 SASARAN KEGIATAN 3

Sasaran strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di Balai POM di Balikpapan pada triwulan II tahun 2026 dengan realisasi capaian sebesar 92,50 % dengan kriteria “Baik”

Pencapaian sasaran kegiatan ini menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

3.3.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	55	110	Sangat Baik

Tabel 3.3.1.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan berdasarkan tahapan pendampingan terhadap

UMKM. Target ditetapkan berdasarkan acuan waktu yang ada pada pedoman dan perkiraan pelaksanaan kegiatan. Kriteria UMKM yang didampingi, antara lain :

➤ Untuk UMK Pangan Olahan :

UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

➤ Untuk UMKM OBA :

1. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2. Start-up yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya start-up yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/atau Tahap 3); dan
6. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
7. Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

➤ Untuk UMKM Kosmetik:

- 1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
 - 2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
 - 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
 - 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :
- ✓ Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
 - ✓ Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
 - ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Adapun tahapan pendampingan UMKM yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pangan Olahan

No.	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Persentase
1	Pengumpulan Data Usaha Mikro Kecil (UMK) Pangan Olahan	Januari – Maret	5%
2	Seleksi dan Penetapan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pangan Olahan Target	Januari – Maret	10%
3	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Februari – Juni	30%
4	Pelaksanaan Pendampingan Usaha Mikro Kecil (UMK) Pangan Olahan	Februari – Desember	50%
5	Pelaporan	Februari – Desember	5%

6	Monitoring dan evaluasi	Januari – Desember	
---	-------------------------	--------------------	--

2. Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Obat Tradisional	1 s.d. 28 Februari	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat Tradisional	1 Maret s.d 30 April	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan)	1 Maret s.d 30 Oktober	40	
4	Sertifikasi	1 September – 30 November	20	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I : 30 Maret – 10 April TW. II : 30 Juni – 10 Juli TW III : 30 Agustus – 10 September TW IV : 30 Desember – 10 Januari	10	UPT, setiap TW membuat laporan pelaksanaan pendampingan (Bimtek, Progres fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

3. Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Jadwal	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan	2 - 30	10	Setiap UPT

	calon udaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	Januari		melaporkan ke Dit. PMPU OTSKK
2	Bimtek setiap tahapan (denah CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb - 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir. Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

Realisasi Triwulan II tahun 2026 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah 110% dengan kriteria Sangat Baik. Capaian ini telah melebihi dari target yang ditentukan pada triwulan II di tahun 2026. Realisasi ini didapat dari tahapan pendampingan yang telah terlaksana sesuai dengan perencanaan dan terdapat pelaku usaha pada komoditi pangan olahan telah melakukan proses pengajuan IP CPPOB pada akun esertifikasi. Sampai dengan triwulan 2 sudah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis CPKB, Bimbingan Teknis CPOTB dan Bimbingan Teknis CPPOB serta adanya kegiatan pendampingan sampai dengan coaching pada website. Pembobotan nilai tahapan pendampingan telah disesuaikan dengan presentase yang telah ditetapkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13	55

Tabel 3.3.1.2 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Berdasarkan perbandingan realisasi pada setiap triwulan, indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan mengalami peningkatan. Pada Triwulan I tahun 2026 realisasi indikator 13 dan pada Triwulan II realisasi sebesar 55. Peningkatan signifikan ini dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis yang memiliki bobot besar pada masing-masing komoditi dan kegiatan tersebut telah terselesaikan pada triwulan II. Selain itu penambahan bobot dari hasil pendampingan yang telah dilaksanakan pada triwulan II. Hal ini pula menunjukkan bahwa pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan target jadwal yang ditetapkan dan perlu peningkatan agar capaian sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW I	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	36,36	55	-	 Akan Tercapai

Tabel 3.3.1.3 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target tahunan dikarenakan realisasi yang ada pada setiap triwulan merupakan

persentase dari pembobotan setiap tahapan kegiatan pendampingan yang telah diatur pada pedoman pelaksanaan pendampingan pada setiap komoditi, sedangkan target tahunan merupakan angka dari jumlah UMKM yang didampingi dalam mendapatkan sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dalam tahun berjalan yang terbagi dari jumlah UMKM dalam 5 tahun sesuai dengan jumlah UMKM pada rencana strategis untuk Balai POM di Balikpapan. Jumlah UMKM yang menjadi target pada tahun berjalan sebesar 5 UMKM dengan persentase 36,36%, sedangkan tahapan pendampingan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan sebesar 100% sampai dengan triwulan IV atau selama tahun berjalan sesuai dengan pembobotan. Tahapan pendampingan akan dilakukan sesuai dengan timeline pelaksanaan sehingga capaian akan tercapai pada triwulan selanjutnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Pelaku usaha yang telah ditargetkan berubah tempat produksi, sehingga target diganti	Melanjutkan kegiatan sertifikasi sesuai renlak	Melakukan pendampingan kembali pada sarana produksi kosmetik pengganti	Triwulan III	Y	S26	Sarana UMKM yang telah ditetapkan menjadi target pendampingan UMKM tidak dapat memenuhi seluruh tahapan pendampingan dalam memenuhi standar

Tabel 3.3.1.4 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Realisasi kinerja indikator “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” pada triwulan II tahun 2026 sebesar 46,25% dengan capaian realisasi 92,50% kriteria penilaian Baik.

Adapun realisasi sudah mencapai kriteria baik namun masih belum mencapai target yang ditentukan pada bulan berjalan. Hal ini dikarenakan

semua sarana yang ditargetkan belum memenuhi standar masih dalam proses pendampingan serta pada komoditi kosmetik sarana yang telah ditargetkan tidak dapat mengikuti seluruh tahapan pendampingan dikarenakan pelaku usaha memutuskan untuk sarana produksinya pindah dari wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan sehingga perlu adanya pengganti sarana UMKM yang ditargetkan dan di damping. Pada komoditi obat bahan alam terkendala belum menyelesaikan sarana produksinya dan dokumen persyaratannya sehingga belum dapat melakukan sertifikasi dalam pemenuhan standar. Hal ini akan ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya agar indikator ini dapat mencapai target. Untuk komoditi panganolahan presentasinya meningkat dari yang seharusnya dikarenakan adanya penyesuaian perhitungan persentase bobot dengan jumlah target yang didampingi dikarenakan adanya revisi target sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama BPOM No 04.02.2.04.26.321 tanggal 29 April 2026 perihal Penyampaian Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026 target UMKM yang didampingi dalam Pemenuhan Standar oleh UPT untuk komoditi panganolahan menjadi 2 UMKM, yangmana sebelumnya target tahun 2026 3 UMKM. Hal ini memepengaruhi perhitungan persentase pendampingan. Namun masih perlu adanya pendampingan yang lebih intensif dalam pemenuhan standar untuk sarana UMKM tersebut oleh fasilitator agar target tercapai saat akhir tahun.

Selain itu semua kegiatan didukung oleh terpenuhinya peningkatan kompetensi petugas sehingga dapat memberikan pendampingan yang berkualitas bagi UMKM yang mendapatkan izin penerapan CPPOB, CPOTB maupun CPKB dan surat rekomendasi pemohon notifikasi serta pada proses pengajuan izin edar. Selain itu, dengan tersedianya pendampingan secara online memudahkan petugas untuk mendampingi UMKM dengan cepat. Namun terkadang banyaknya pelaku usaha dan terbatasnya fasilitator di Balai POM di Balikpapan serta prasarana zoom meeting yang tidak dapat dilakukan untuk beberapa pelaku usaha dalam satu waktu karena tidak ada fitur untuk perkelas-kelas sehingga satu waktu hanya dapat dilakukan pendampingan pada satu pelaku usaha sehingga butuh penjadwalan pendampingan online yang lebih banyak.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Belum tercapainya indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di triwulan II tahun 2026 dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Sarana UMKM yang ditargetkan belum memenuhi standar dengan terbitnya memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, KOS yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
2. Sarana UMKM yang telah ditargetkan ada yang tidak dapat melanjutkan pendampingan pada proses masa berjalan kegiatan pendampingan
3. Terdapat sarana UMKM yang telah mengajukan IP CPPOB namun masih belum memenuhi syarat sehingga perlu ada perbaikan dokumen.

Selain itu tim sertifikasi akan terus berusaha agar capaian dapat sesuai dengan target yang ditentukan dengan cara :

1. Inovasi Jempolan (Jemput Bola Balai POM di Balikpapan) yang membantu pendampingan kepada UMKM yang menjadi target UMKM dalam memenuhi standar.
2. Pelaksanaan kegiatan yang dikembangkan dari inovasi JEMPOLAN yaitu JOSS (Jempolan onestep Solution) dengan sarana yang telah ditargetkan dilakukan desk terhadap tahapan pengajuan yang sedang berproses agar bisa diselesaikan setidaknya terdapat progress terhadap pengajuannya, kegiatan ini dijadwalkan secara rutin setiap 2 minggu.
3. Selain dari pendampingan yang telah terjadwal akan target yang telah ditentukan tim sertifikasi juga melakukan pendampingan zoom meeting saat dibutuhkan oleh pelaku usaha dari penjelasan awal

proses pengajuan sampai dengan kegiatan coaching pada website.

4. Pengembangan Kompetensi petugas yang menjadi fasilitator pada setiap komoditi, yaitu pangan olahan, kosmetik dan obat bahan alam.
5. Proses pendaftaran dan permohonan yang tersistem melalui website memudahkan pelaku usaha untuk input data dan pengajuan sertifikasi atau pendaftaran izin edar.
6. Kolaborasi dengan BPOM pusat dalam melaksanakan pendampingan pelaku usaha
7. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang menunjang kegiatan pendampingan UMKM untuk memenuhi standar misalnya menindaklanjuti pelaku usaha yang tertunda pada sistem terkait kendala yang dialami atau mencari solusi bersama jika ada pelaku usaha yang terhambat.

3.4 SASARAN KEGIATAN 4

Internal Process Perspective

SS4

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

3.4.1 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Peningkatan Supremasi Hukum di Sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Balikpapan secara konsisten melaksanakan penegakan hukum di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya. Upaya tersebut diukur melalui indikator sasaran strategis Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Indikator ini merupakan parameter utama dalam mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai POM di Balikpapan. Keberhasilan penyidikan tersebut diukur berdasarkan pemenuhan tahapan progresivitas perkara sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

2. Penyerahan berkas perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Tahap I).
3. Penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Berkas Perkara oleh JPU (P21).
4. Penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU untuk disidangkan oleh pengadilan (Tahap II).

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	15%	0	<i>Tidak Dapat Dihitung tidak ada target di TW II</i>

Tabel 3.4.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan pada Triwulan II Tahun 2026 tercatat sebesar 15%. Capaian tersebut berhasil melampaui target triwulanan yang ditetapkan sebelumnya sebesar 0% dengan Kriteria Tidak Dapat Dihitung dikarenakan tidak da target di Triwulan II.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	TW I	TW II	Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	15%		<i>Tidak Dapat Dihitung</i>

Tabel 3.4.2 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di

Balikpapan pada Triwulan II Tahun 2026 dilaporkan telah mencapai target sebesar 15%. Apabila dikomparasikan dengan Triwulan I, capaian realisasi pada Triwulan II dinilai sangat progresif dan melampaui proyeksi penjadwalan pasca-restrukturisasi. Pada proses perencanaan sebelumnya, target kinerja telah disesuaikan (direstrukturisasi) dengan menggeser target penyelesaian perkara utama ke Triwulan III. Meskipun demikian, akselerasi proses penyidikan yang berjalan efektif pada bulan Juni tetap mampu menghasilkan realisasi kinerja konkret sebesar 15% pada akhir periode Triwulan II.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Balikpapan	100	15%	15%	 Perlu Upaya Keras

Tabel 3.4.3 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi untuk indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tercatat sebesar 0,15 (15%) dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 100%. Secara administratif, capaian kinerja pada periode ini masuk dalam kategori "Perlu Upaya Keras".

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

No.	Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Keterbatasan jumlah SDM di Fungsi Penindakan	Segera di jadwalkan untuk pelaksanaan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dan penyelesaian Administrasi Penindakan	Penyelesaian Berkas Perkara di minggu ke 3 atau ke 4 bulan Juli	Triwulan III	Y	H1, O17, O19, O20, O21, O22	- Praperadilan pada kasus sediaan farmasi dan pangan olahan- Tersangka melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti- Pemeriksaan tersangka tidak berjalan secara maksimal -Proses penyelesaian perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan terhambat dan tidak sesuai dengan timeline -Adanya kebocoran informasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan dan operasi penindakan -Hilang dan/atau rusaknya Barang Bukti

Tabel 3.4.4 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan tercapainya Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan diantaranya:

1. Rasio jumlah personel penindakan saat ini belum proporsional apabila dibandingkan dengan luas wilayah kerja pengawasan serta tingkat kompleksitas kasus pelanggaran hukum yang ditangani di lapangan.

2. Peningkatan kapasitas dan standardisasi kompetensi personel penindakan belum terealisasi secara merata.
3. Kinerja fungsi penindakan belum dapat berjalan secara optimal sebagai akibat dari adanya penugasan ganda (multifungsi) di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama penindakan kepada personel yang bersangkutan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Sinergitas Lintas Sektor dalam Percepatan Penyelesaian Perkara. Penguatan koordinasi pro-justitia bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan terbukti menjadi faktor determinan dalam meningkatkan efisiensi penanganan berkas perkara.
- Optimalisasi Jejaring Pengawasan pada Sektor Jasa Logistik dan Ekspedisi. Mengingat tren peredaran produk ilegal yang beralih ke platform digital, kerja sama strategis dengan jasa pengiriman menjadi langkah krusial dalam memutus rantai distribusi. Kegiatan ini memungkinkan Balai POM untuk melakukan deteksi dini melalui pemantauan jalur paket mencurigakan serta mempermudah penelusuran alamat pengirim/penerima ilegal

3.5 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 5

3.5.1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Pengukuran terhadap indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar dilakukan untuk menilai kualitas dan ketepatan waktu output intelijen taktis. Evaluasi terhadap capaian indikator ini didasarkan pada akuntabilitas penyelesaian tiga dokumen pelaporan utama, yaitu:

1. Aspek Analisis Situasional: Laporan Analisis Kejahatan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan.

2. Aspek Intervensi Pemulihan: Laporan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Cegah Tangkal sebagai bentuk realisasi tindakan preventif.
3. Aspek Pengawasan Digital: Laporan Siber yang dikelola dalam rangka pemetaan risiko peredaran produk ilegal secara daring di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan.

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tercapainya Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Baik

Tabel 3.5.1.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar ditetapkan dengan target sebesar 50%. Adapun realisasi yang berhasil dicapai pada periode ini adalah sebesar 50%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tingkat efektivitas penyelesaian laporan analisis kejahatan di Balai POM di Balikpapan berada pada kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya (TW I)

Indikator Kinerja	TW I	TW II	Capaian	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	 Baik

Tabel 3.5.1.2 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Balikpapan pada Triwulan I Tahun

2026 untuk indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar tercatat sebesar 50%. Jika dilakukan analisis komparatif dengan Triwulan II, kedua periode tersebut menunjukkan tren performa yang konsisten dan stabil, di mana masing-masing menetapkan target triwulanan sebesar 50% dan berhasil merealisasikannya secara penuh (50%). Capaian tersebut merepresentasikan tingkat efektivitas kinerja sebesar 100% dengan predikat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Balikpapan	91	50%	50%	 Perlu Upaya Keras

Tabel 3.5.1.3 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Realisasi indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar hingga akhir Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai angka 50%, yang berarti telah memenuhi target triwulanan secara presisi sebesar 50%. Namun, jika capaian paruh pertama tahun ini disandingkan dengan target akumulatif tahunan yang ditetapkan sebesar 91%, maka pemenuhan target akhir berada dalam kategori 'Perlu Upaya Keras'.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator Kinerja	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	3	4	5	6	7	8	9

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala	Tetap dilaksanakan sesuai dengan target	Dilaksanakan sesuai dengan target	Bulan berikutnya	Y	O23, O24	- Penjualan secara daring produk sediaan farmasi dan pangan olahan Tanpa Izin Edar di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan- Tidak dapat diaksesnya akun aplikasi penunjang kegiatan Fungsi Penindakan Balai POM di Balikpapan
--	-------------------	---	-----------------------------------	------------------	---	----------	--

Tabel 3.5.1.4 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penindakan diantaranya:

1. Adanya penyesuaian atau efisiensi anggaran pada tahun berjalan yang berdampak pada cakupan operasional kegiatan penindakan termasuk pengembangan kompetensi petugas penindakan.
2. Rasio jumlah personel penindakan saat ini belum proporsional apabila dibandingkan dengan luas wilayah kerja pengawasan serta tingkat kompleksitas kasus pelanggaran hukum yang ditangani di lapangan.
3. Peningkatan kapasitas dan standardisasi kompetensi personel penindakan belum terealisasi secara merata.
4. Kinerja fungsi penindakan belum dapat berjalan secara optimal sebagai akibat dari adanya penugasan ganda (multifungsi) di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama penindakan kepada personel yang bersangkutan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

1. Penguatan Kapasitas Intelijen Digital: Akselerasi peningkatan kompetensi petugas secara mandiri dalam pemanfaatan Open Source Intelligence (OSINT).
2. Pengembangan Keterampilan Literasi Pelaporan: Program peningkatan kompetensi penulisan teknis bagi petugas penindakan.

3.6. Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Balikpapan

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
- c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Hasil penilaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Balikpapan akan dinilai oleh Tim Penilai UPP BPOM yang akan dilakukan pada Triwulan ke IV 2026

3.7 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 7

Pencapaian sasaran kegiatan ke-sembilan pada tahun 2026 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator kinerja SK 9 diukur pada Triwulan II Tahun 2026.

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	-	-	-	Dinilai pada akhir tahun
	Nilai AKIP UPT	-	-	-	Dinilai pada akhir tahun
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	Dinilai pada akhir tahun
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Dinilai pada akhir tahun

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Triwulan II Tahun 2026

3.7.1 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) penilaian mandiri pembangunan ZI (PMPZI) menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan

peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja serta pelayanan publik.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/ WBBM meliputi :

1. Manajemen Perubahan : bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot komponen hasil satker/unit kerja untuk memperoleh predikat WBK/ WBBM meliputi :

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	85*)	90*) Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	Min 18,25	Min 19,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	Min 15,75 (indeks 3,60)	Min 15,75 (indeks 3,60)
• Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	Min 2,50 (nilai C)	Min 3,75 (nilai B)
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	Min 14,00 (indeks 3,20)	Min 15,75 (indeks 3,60)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	-	-	-	-

Tabel 3.7.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Nilai Pembangunan ZI UPT belum memiliki capaian karena merupakan indikator dengan target tahunan. Pengukuran dan penetapan nilai indikator dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh tahapan implementasi pembangunan Zona Integritas, pemenuhan data dukung, verifikasi, dan evaluasi oleh Tim Penilai selesai dilaksanakan. Pada periode triwulan II ini sudah menyelesaikan tahapan pemenuhan data dukung, verifikasi dan evaluasi oleh Tim Penilai, namun untuk capaian indikator ini tetap dihitung pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya (Triwulan I Tahun 2026)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	-	-	-	-

Tabel 3.7.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT

Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan capaian pada indikator Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Balikpapan. Realisasi pada Triwulan I maupun Triwulan II sama-sama belum dapat diukur, karena indikator tersebut merupakan indikator dengan target tahunan yang pengukurannya baru dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh tahapan penilaian pembangunan

Zona Integritas selesai dilaksanakan. Dengan demikian, pada Triwulan II belum terdapat capaian yang dapat dibandingkan dengan Triwulan I, dan hasil pengukuran indikator baru akan diketahui pada akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	75	-	-	-

Tabel 3.7.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT

Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT belum memiliki target dan realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 karena merupakan indikator tahunan dengan hasil penilaian baru diperoleh pada akhir tahun setelah seluruh tahapan evaluasi oleh Tim Penilai selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, realisasi Triwulan II belum dapat dibandingkan dengan target tahunan Tahun 2026 sebesar 75.

Meskipun demikian, target sebesar 75 tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sepanjang tahun 2026. Sampai dengan Triwulan II, Balai POM di Balikpapan terus melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian target tersebut, antara lain melalui penguatan implementasi enam area perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan dan penyempurnaan eviden penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), tindak lanjut atas hasil evaluasi, penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, serta internalisasi nilai-nilai integritas dan budaya kerja kepada seluruh pegawai.

Dengan demikian, pada Triwulan II fokus pelaksanaan masih diarahkan pada penguatan implementasi pembangunan Zona Integritas, monitoring dan evaluasi rencana aksi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan kinerja ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menginternalisasikan nilai-nilai reformasi birokrasi, khususnya budaya kerja BerAKHLAK, serta konsistensi dalam pemenuhan komponen pengungkit seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala turut mendorong perbaikan berkelanjutan sehingga progres pemenuhan data dukung pembangunan ZI dapat terjaga sesuai rencana.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi capaian nilai ZI pada akhir tahun. Beberapa di antaranya adalah belum meratanya pemahaman pegawai terhadap substansi pembangunan ZI, khususnya dalam penyediaan data dukung yang berkualitas dan relevan; keterbatasan waktu dalam melengkapi data dukung pada seluruh komponen pengungkit secara optimal; serta masih adanya inkonsistensi dalam dokumentasi kegiatan yang berdampak pada penilaian data dukung.

Sebagai rekomendasi perbaikan, diperlukan penguatan komitmen berkelanjutan dari seluruh unit kerja, peningkatan kapasitas pegawai dalam penyusunan data dukung yang kualitas, serta pengembangan melakukan monitoring yang lebih terstruktur untuk memantau progres pembangunan ZI di Balai POM di Balikpapan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh implementasi pembangunan ZI tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen, tetapi juga mencerminkan perubahan nyata dalam budaya kerja dan kualitas pelayanan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Balikpapan pada akhir tahun dapat optimal dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai BerAKHLAK, pelaksanaan manajemen perubahan, serta penguatan komitmen pimpinan menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan, karena mampu membangun kesadaran dan keterlibatan aktif pegawai dalam pembangunan ZI. Selain itu, kegiatan penataan tata laksana, penyusunan dan penyempurnaan SOP, serta penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses kerja. Kegiatan monitoring dan evaluasi internal, revidi berkala terhadap pemenuhan data dukung pembangunan ZI, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan juga menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan nilai ZI.

3.7.2 Nilai AKIP UPT Balai POM di Balikpapan

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat.

Cara perhitungannya menggunakan Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Periode pelaporan untuk nilai AKIP ini adalah Tahunan, sehingga indikator kinerja ini tidak memiliki capaian di TW II tahun 2026.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Tabel 3.7.2.1 Realisasi Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Nilai AKIP UPT belum memiliki capaian karena merupakan indikator dengan target tahunan yang penilaiannya dilakukan secara periodik dan hasilnya baru diperoleh pada akhir tahun setelah melalui proses evaluasi. Pengukuran dan penetapan nilai indikator dilakukan pada akhir tahun. Oleh karena itu, capaian indikator baru dapat diketahui pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya (Triwulan I Tahun 2026)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Tabel 3.7.2.2 Realisasi Kinerja Nilai AKIP UPT BPOM

Perbandingan realisasi indikator Nilai AKIP UPT pada Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan capaian. Pada Triwulan I maupun Triwulan II, realisasi indikator

sama-sama belum dapat diukur. Hal ini disebabkan indikator Nilai AKIP UPT merupakan indikator dengan target tahunan yang penilaiannya dilakukan pada akhir tahun melalui proses evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, belum terdapat data realisasi yang dapat digunakan untuk mengukur maupun membandingkan capaian kinerja antar triwulan. Fokus pelaksanaan pada Triwulan I dan Triwulan II diarahkan pada penguatan implementasi SAKIP melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas hasil evaluasi sebagai persiapan menghadapi penilaian AKIP pada akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	77,5	-	-	-

Tabel 3.7.2.3 Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator Nilai AKIP UPT belum memiliki realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target tahunan Tahun 2026 sebesar 77,5. Hal ini disebabkan indikator tersebut merupakan indikator dengan target tahunan yang penilaiannya dilaksanakan pada akhir tahun melalui proses evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu, sampai dengan Triwulan II belum tersedia data realisasi yang dapat digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, target sebesar 77,5 tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja sepanjang Tahun 2026. Berbagai upaya telah dilaksanakan hingga Triwulan II, antara lain peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja, penyelarasan indikator kinerja, monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala, penyusunan Laporan Kinerja, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun

sebelumnya.

Dengan demikian, fokus pelaksanaan pada Triwulan II diarahkan pada penyempurnaan seluruh komponen penilaian AKIP dan penguatan implementasi SAKIP sebagai persiapan menghadapi evaluasi pada akhir tahun. Melalui upaya tersebut diharapkan Nilai AKIP UPT yang diperoleh pada akhir tahun dapat mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 77,5.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya indikator output yang menjadi tanggung jawab unit kerja. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan program prioritas, pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala, serta koordinasi yang baik antar fungsi dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang menyebabkan nilai kinerja belum optimal dan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya kualitas tata kelola kinerja, khususnya pada aspek perencanaan, pelaporan, evaluasi internal, dan pengukuran dampak kinerja.

Selain itu, pelaksanaan evaluasi internal telah dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, evaluasi tersebut masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis. Analisis tren capaian kinerja secara periodik, perbandingan terhadap target jangka menengah, identifikasi kendala, serta pemantauan tindak lanjut rencana aksi masih perlu dilakukan secara lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penurunan nilai kinerja bukan disebabkan oleh tidak terlaksananya program dan kegiatan, tetapi lebih dipengaruhi oleh belum optimalnya kualitas pengelolaan kinerja, kedalaman analisis,

konsistensi data, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian target kinerja melalui pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja, koordinasi antar fungsi, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Pemanfaatan aplikasi pengelolaan kinerja seperti SIMETRIS juga telah membantu proses pemantauan capaian kinerja.

Namun, beberapa aspek masih memerlukan penguatan untuk meningkatkan kualitas pencapaian kinerja, antara lain:

1. **Penguatan perencanaan kinerja**, melalui percepatan finalisasi dan pemanfaatan Renstra 2025–2029 serta penyusunan target berbasis data dan analisis yang memadai.
2. **Peningkatan kualitas pelaporan kinerja**, melalui sinkronisasi data antar dokumen dan aplikasi serta penyusunan analisis capaian yang lebih komprehensif, termasuk terhadap indikator yang mengalami penurunan.
3. **Optimalisasi evaluasi efisiensi anggaran**, dengan menghubungkan penggunaan sumber daya dengan capaian indikator kinerja.
4. **Peningkatan kualitas evaluasi internal**, agar tidak hanya bersifat administratif tetapi menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan pengambilan keputusan.

Dengan penguatan aspek perencanaan, pelaporan, evaluasi, dan pemanfaatan data kinerja, diharapkan pengelolaan kinerja organisasi dapat semakin efektif dan mendorong peningkatan capaian pada periode berikutnya.

3.7.3 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Balikpapan

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang

memuat 3 aspek dan 8 indikator; aspek tersebut adalah: (a) kualitas perencanaan anggaran, (b) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (c) kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Ada 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan UP dan TUP
7. Dispensasi Penyampaian SPM
8. Konfirmasi Capaian Output

Indikator revisi DIPA dan penyerapan anggaran tidak dihitung dalam penilaian IKPA Triwulan I tahun 2025.

Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) diukur berdasarkan 4 aspek yaitu: (a) penyerapan anggaran, (b) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, (c) capaian RO, dan (d) nilai efisiensi.

Adapun Pengukuran Bobot Nilai Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 3.7.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT belum terdapat capaian/realisasi yang dapat disajikan. Hal ini dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator yang pengukurannya dilakukan secara tahunan

dan penilaiannya baru dilakukan pada akhir periode tahun anggaran berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek kinerja pelaksanaan anggaran dan kualitas belanja.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Triwulan II Tahun 2026 tetap dilakukan melalui monitoring realisasi anggaran, evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar mendukung pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran pada akhir tahun.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya (Triwulan I Tahun 2026)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 3.7.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, kondisi capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Triwulan II masih sama, yaitu belum terdapat realisasi/capaian yang dapat dihitung karena indikator dinilai pada akhir tahun. Dengan demikian, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan nilai kinerja antar periode pelaporan.

Namun, dari sisi proses pelaksanaan anggaran, terdapat perkembangan melalui peningkatan realisasi pelaksanaan kegiatan, pengendalian terhadap deviasi antara rencana dan realisasi anggaran, serta penguatan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Balikpapan secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Balikpapan	5	-	-	-

Tabel 3.7.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Jika dibandingkan dengan target Nilai Kinerja Anggaran UPT Tahun 2026, capaian Triwulan II belum dapat dibandingkan secara kuantitatif karena indikator belum memasuki periode penilaian. Target tahun 2026 tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran selama tahun berjalan.

Upaya pencapaian target dilakukan melalui optimalisasi perencanaan anggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal, peningkatan kualitas pengadaan, pemantauan realisasi anggaran secara berkala, serta tindak lanjut terhadap potensi kendala yang dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran. Evaluasi terhadap pencapaian indikator akan dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh komponen penilaian Nilai Kinerja Anggaran tersedia.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada periode Triwulan II Tahun 2026, upaya pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT dilakukan melalui monitoring terhadap aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian, khususnya Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OMspan.

Belum terdapat capaian akhir indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun anggaran. Namun, proses pengendalian dan pemantauan terhadap faktor pendukung pencapaian indikator telah dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan sesuai target.

Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain adanya koordinasi antar pengelola kegiatan, pemantauan realisasi anggaran dan capaian output, serta tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang berpotensi mempengaruhi nilai EKA dan IKPA. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, percepatan realisasi anggaran, serta peningkatan kualitas pelaporan agar dapat mendukung optimalisasi nilai kinerja anggaran pada akhir tahun.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran UPT dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran secara berkala, dengan fokus pada aspek-aspek penilaian EKA dan IKPA. Kegiatan tersebut meliputi pemantauan kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana, evaluasi capaian output kegiatan, serta identifikasi kendala yang dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran.

Selain itu, koordinasi antara pengelola keuangan, perencana, dan pelaksana kegiatan terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan. Tindak lanjut atas hasil monitoring menjadi langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.

Namun, untuk menjaga pencapaian target akhir tahun, masih diperlukan penguatan pada pengendalian pelaksanaan kegiatan, optimalisasi penyerapan anggaran, peningkatan ketepatan waktu penyampaian data dukung, serta pemanfaatan hasil monitoring sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan nilai EKA dan IKPA.

3.7.4 Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Balikpapan

- a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Periode pelaporan untuk nilai Indeks Manajemen Risiko ini didapat dari Hasil Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama yang akan diperoleh pada akhir tahun, sehingga indikator kinerja ini tidak memiliki capaian di TW II tahun 2026.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 3.7.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT

Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator Nilai Indeks Manajemen Risiko belum terdapat capaian/realisasi yang dapat disajikan. Hal ini dikarenakan

indikator tersebut merupakan indikator tahunan yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada organisasi.

Meskipun realisasi belum dapat diukur pada periode Triwulan II, pelaksanaan penguatan penerapan manajemen risiko tetap dilakukan melalui identifikasi, analisis, mitigasi, dan pemantauan risiko yang mendukung pencapaian sasaran organisasi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan Sebelumnya (Triwulan I Tahun 2026)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi TW I	Realisasi TW II	Capaian	Kategori
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 3.7.4.2 Tabel Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator Nilai Indeks Manajemen Risiko pada Triwulan II Tahun 2026 masih belum menunjukkan realisasi karena indikator tersebut dilakukan penilaian pada akhir tahun.

Meskipun belum terdapat perubahan nilai capaian, terdapat perkembangan dalam proses implementasi manajemen risiko melalui peningkatan koordinasi pengelolaan risiko, pemantauan risiko unit kerja, serta penguatan pemahaman pegawai melalui kegiatan bimbingan teknis penerapan Manajemen Risiko pada Balai POM di Balikpapan sebagai bagian dari budaya organisasi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi TW II	Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Balikpapan secara Akuntabel	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,48	-	-	-

Tabel 3.7.4.3 Tabel Perbandingan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Realisasi Nilai Indeks Manajemen Risiko pada Triwulan II Tahun 2026 belum dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan target tahun 2026

sebesar 2,48, karena proses penilaian dilakukan pada akhir tahun setelah seluruh tahapan penerapan dan evaluasi manajemen risiko dilaksanakan.

Untuk mencapai target tersebut, organisasi terus melakukan penguatan penerapan manajemen risiko melalui peningkatan kualitas identifikasi dan analisis risiko, penyusunan rencana mitigasi, pemantauan tindak lanjut mitigasi risiko, serta evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Proses pelaksanaan manajemen risiko telah berjalan sebagai bagian dari pengendalian organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Keberhasilan pencapaian target nantinya dipengaruhi oleh tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, mulai dari aspek budaya risiko, proses pengelolaan risiko, hingga struktur pendukung pelaksanaan manajemen risiko. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target antara lain adanya komitmen pimpinan dalam penerapan SPIP, keterlibatan unit kerja dalam melakukan identifikasi dan pengendalian risiko, serta pelaksanaan monitoring terhadap risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi.

Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam konsistensi penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja, peningkatan kualitas analisis risiko, dokumentasi pengendalian risiko, serta pemanfaatan hasil pengelolaan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Nilai Indeks Manajemen Risiko dilakukan melalui implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Identifikasi dan penilaian risiko terhadap sasaran organisasi, untuk memastikan potensi hambatan dalam pencapaian tujuan dapat dikenali dan dikendalikan sejak awal.
2. Penyusunan dan pemantauan rencana mitigasi risiko, melalui penetapan langkah pengendalian terhadap risiko prioritas serta

monitoring pelaksanaan tindak lanjutnya.

3. Peningkatan pemahaman dan budaya risiko, melalui koordinasi, sosialisasi, dan pelibatan pegawai dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja.
4. Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen risiko, untuk memastikan proses pengelolaan risiko berjalan sesuai ketentuan dan mendukung peningkatan tingkat maturitas manajemen risiko organisasi.

Dalam rangka mencapai target Nilai Indeks Manajemen Risiko Tahun 2026 sebesar 2,48, diperlukan penguatan berkelanjutan agar penerapan manajemen risiko tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pengambilan keputusan organisasi. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko dapat mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian sasaran kinerja.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW I)	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak ada kendala	Pertahankan konsistensi pelaksanaan sesuai rencana kerja. Pastikan dokumentasi pelaksanaan dan tindak lanjut tetap lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan	melanjutkan kegiatan sesuai renlak	close	sesuai	April 2026	Y	O1, S1, O2, SDM1	"- Rusaknya sampel sediaan farmasi yang dikirim ke laboratorium spesifik/laboratorium regional- Jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling oleh Balai POM di Balikpapan kurang dari target- Rusaknya sampel sediaan farmasi dalam perjalanan pengiriman ke laboratorium spesifik/laboratorium regional- Sampel sediaan farmasi yang diambil tidak sesuai dengan pedoman sampling"
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-						Y	s2	pada bulan maret sudah dilakukan sosialisasi terkait farmakovigilans dan penunjukan vocal point melalui pemberian akun laporan
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	terdapat sampel TMS yang belum ditindaklanjuti	Tindak lanjut terhadap produk TMS harus segera diselesaikan di bulan April. Lakukan perbaikan sistem monitoring dan reminder internal agar tidak terlewat kembali	Segera melakukan tindak lanjut atas sampel TMS	close	sudah bersurat ke UPT yang memiliki sarana produksi pada bulan april	April 2026	T	-	-

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Nihil karena tidak ada sampel KLB di Bulan Maret 2026	Tetap waspada dan pastikan kesiapan prosedur penanganan KLB	Nihil karena tidak ada sampel KLB di Bulan Maret 2026		sudah terdapat daftar resiko, tidak ada kendala	-	-	-	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	terdapat LHU belum terbit sehingga beberapa aspek belum dapat dihitung realisasinya	Lakukan follow up intensif ke Balai Penguji untuk penerbitan LHU. Koordinasikan lebih lanjut terkait timeline penerbitan LHU.	follow up ke balai penguji	close	untuk di triwulan I terhadap sampel sebelumnya sudah ditindaklanjuti, muncul kendala yang sama untuk sampel dibulan April.	April 2026	T	-	-
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	pengawasan ke sarana baru dimulai pada bulan Februari sehingga surat baru diterbitkan pada akhir bulan Februari	Segera untuk lakukan penerbita surat tindak lanjut dan lakukan monev berkala kepada stakeholder	menerbitkan surat rekomendasi yang dikirim kesarana setelah dilakukan pemeriksaan		sudah ditindaklanjuti, dengan membentuk group Whatsapp untuk mengingatkan terkait rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh stakeholder.	April 2026	Y	S5	Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder masih rendah

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak ada kendala	Lanjutkan sesuai rencana kerja dan pertahankan standar pemeriksaan.	melanjutkan kegiatan sesuai renlak	close	tidak ada kendala	April 2026	Y	S6, S7, S8	"- Target sarana produksi Sediaan Farmasi tutup/ tidak beroperasi sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan- Pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi tidak sesuai dengan pedoman- Masih ditemukan produk sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE) yang beredar di wilayah Balai POM di Balikpapan pada saat pemeriksaan rutin pada sarana produksi Sediaan Farmasi"
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak ada kendala	Pertahankan dan pastikan kualitas pemeriksaan tidak menurun	melanjutkan kegiatan sesuai renlak	close	tidak ada kendala		Y	S9, S10, S11, R2	"- Keterulangan hasil TMK pada sarana produksi pangan olahan sehingga sarana beroperasi tidak sesuai dengan peraturan perundangan sehingga merugikan masyarakat.- Target sarana produksi pangan olahan tutup/ tidak beroperasi sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan- Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan tidak sesuai dengan pedoman- Masih ditemukan produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE) yang beredar di wilayah Balai POM di Balikpapan pada saat pemeriksaan rutin pada sarana produksi pangan olahan"

9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak ada kendala	Lanjutkan sesuai rencana kerja dan pertahankan standar pemeriksaan.	melanjutkan kegiatan sesuai renlak		penambahan resiko penolakan pelaku usaha.	April 2026	Y	R3, S12, S13, R4, O10	"- Keterulangan hasil TMK pada sarana distribusi Sediaan Farmasi sehingga sarana beroperasi tidak sesuai dengan peraturan perundangan sehingga merugikan masyarakat.- Target sarana distribusi Sediaan Farmasi tutup/ tidak beroperasi sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan- Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi tidak sesuai dengan pedoman- Masih ditemukan produk sediaan farmasi Tanpa Izin Edar (TIE) yang beredar di wilayah Balai POM di Balikpapan pada saat pemeriksaan rutin pada sarana distribusi Sediaan Farmasi- Penambahan wilayah kerja tidak diimbangi dengan penambahan SDM"
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak ada kendala	Lanjutkan sesuai rencana kerja dan pertahankan standar pemeriksaan.	melanjutkan kegiatan sesuai renlak	CLOSED	sudah selesai	-	-	-	-
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Keterbatasan petugas dan waktu karena bersamaan dengan libur Idul Fitri	Identifikasi yang menjadi GAP antara target dan realisasi, lanjutkan sesuai perencanaan dan target			akan dilaksanakan koordinasi pada minggu kedua bulan Mei 2026 dengan ONIX dan KPFM.	Mei 2026	Y	S16	

12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	tidak ada kendala	Lanjutkan pengawasan sesuai rencana dan pertahankan pencapaian.	-		Tidak ada kendala			O12	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-		-		tidak ada kendala			S17,O13	
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	tidak ada kendala	Lanjutkan sesuai dengan perencanaan. Pastikan kesiapan menghadapi penilaian TW selanjutnya.	melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan pada TW 2		sesuai, tidak ada kendala	TW 2	Y	S18, S19	"- Keterbatasan peralatan laboratorium di BPOM Balikpapan- Ruang Laboratorium belum memenuhi syarat untuk pengujian laboratorium Tier 2 setingkat Balai POM."
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-		Tidak ada kendala		T	S20	
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Aspek pemahaman audiens pada KIE tatap muka dan media serta manfaat pada KIE media belum mencapai target	"Lanjutkan pelaksanaan sesuai dengan rencana"	Melaksanakan KIE sesuai rencana pelaksanaan dengan pemberian materi yang lebih menarik dan mudah dipahami		Tools terkait aspek minat masyarakat sudah tidak ada, pembuktian risk event dikaitkan dengan pemahaman dan manfaat.	April 2026	Y	S22	Minat Masyarakat dalam mengikuti Komunikasi, Informasi dan Edukasi masih belum sesuai target
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak ada kendala	"Lanjutkan pelaksanaan sesuai dengan rencana"	Penyusunan rencana pelaksanaan Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan sesuai dengan anggaran dan		Sudah sesuai	Juli 2026	Y	S23	Kader keamanan pangan jajanan anak sekolah tidak melaksanakan program yang ditetapkan

				juknis pelaksanaan						
18	Jumlah desa pangan aman	Anggaran untuk pelaksanaan program Desa Pangan Aman di luar kota terbatas	"Lanjutkan pelaksanaan sesuai dengan rencana"	Penyusunan rencana pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang efisien sesuai dengan anggaran dan juknis pelaksanaan		Pelaksanaan program Desa Pangan Aman telah dilaksanakan sesuai dengan juknis pelaksanaan. Tahapan pengawalan yang merupakan tahap terakhir akan dilaksanakan Triwulan III Tahun 2026	Juli 2026	Y	S24	Tim KPD dan Kader keamanan pangan desa tidak melaksanakan program yang ditetapkan
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	"Pengawalan Pasar yang di Intervensi tahun 2025 dilaksanakan secara daring (zoom meeting) pada tanggal 11 Maret 2026 dengan peserta Pengelola pasar, paguyuban pasar dan pedagang pasar. Kendala : Peserta kegiatan yang merupakan pedagang pasar tidak dapat hadir, karena kegiatan bersamaan dengan waktu berjualan."	"Lanjutkan pelaksanaan sesuai dengan rencana"	Penyusunan rencana pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang efisien sesuai dengan anggaran dan juknis pelaksanaan	selesai	Pelaksanaan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman yang Berbasis Komunitas telah selesai dilaksanakan sesuai dengan juknis pelaksanaan. Perlu upaya koordinasi dengan OIKN dalam rangka penyusunan rencana aksi sebagai upaya keberlanjutan program dan pengawalan di tahun selanjutnya	Juli 2026	Y	S25	Fasilitator Pasar dan pengelola pasar tidak menjalankan program keamanan pangan
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Penetapan target baru dapat dilaksanakan pada bulan Maret, mengingat konfirmasi kesediaan UMKM	"Lanjutkan pelaksanaan sesuai dengan rencana"	Melaksanakan kegiatan Bimtek CPKB dan CPOBAB pada bulan April	selesai	sudah dilaksanakan, Risk event terkait penetapan target belum ada.	April 2026	T		

		baru diterima pada bulan tersebut								
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum dilaksanakan Operasi Penindakan	"Lanjutkan pelaksanaan sesuai dengan rencana"	Segera melaksanakan operasi penindakan	selesai	Penjadwalan Operasi Penindakan	Juni 2026	T	H1, O17, O19, O20, O21, O22	"- Praperadilan pada kasus sediaan farmasi dan pangan olahan - Tersangka melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti - Pemeriksaan tersangka tidak berjalan secara maksimal - Proses penyelesaian perkara di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan terhambat dan tidak sesuai dengan timeline - Adanya kebocoran informasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan dan operasi penindakan - Hilang dan/atau rusaknya Barang Bukti"
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	tidak ada kendala	"Lanjutkan pelaksanaan sesuai dengan rencana"	Pelaksanaan sesuai dengan renlak	selesai	tidak ada kendala	April 2026	Y	O23, O24	"- Penjualan secara daring produk sediaan farmasi dan pangan olahan Tanpa Izin Edar di wilayah kerja Balai POM di Balikpapan- Tidak dapat diaksesnya akun aplikasi penunjang kegiatan Fungsi Penindakan Balai POM di Balikpapan"
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM				-	-	-	-	-	-
25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2026 Balai POM di Balikpapan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3,290,614,000- Sesuai DIPA Revisi Nomor SP DIPA- 063.01.2.690471/2026 yang diterbitkan tanggal 04 Juni 2026 . Pada Triwulan II ini terealisasi sebesar Rp. 1,754,658,062,- atau terealisasi sebesar 53.32 % dari total pagu anggaran.

Pengelolaan anggaran Balai POM di Balikpapan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Balikpapan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

A. Realisasi Anggaran per Output

No,	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian%
a	b	f	g	$h=(g/f \times 100)$
1	3165.AEA.001 Laporan Analissi Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	5,000,000	0	0.00%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	9,614,000	3,969,000	41.28%
3	3165.BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8,643,000	6,723,500	77.79%

4	3165.BDB.002 Desa Pangan Aman	30,854,000	28,508,224	92.40%
5	3165.BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	24,056,000	21,737,827	90.36%
6	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	15,708,000	8,121,673	51.70%
7	3165.BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	19,921,000	2,703,737	13.57%
8	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	15,978,000	1,907,000	11.94%
9	3165.BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	5,400,000	1,217,347	22.54%
10	3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	28,230,000	28,229,985	100.00%
11	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	80,000,000	79,999,999	100.00%
12	3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	175,747,000	77,205,484	43.93%
13	3165.QCD.U38 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	137,269,000	34,106,663	24.85%

14	3165.QDC.002 Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	3,140,000	1,780,000	56.69%
15	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	7,097,000	1,844,000	25.98%
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	52,273,000	13,329,420	25.50%
17	3165.QIA.002 Sampel Obat. Obat Tradisional. Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	48,371,000	21,245,347	43.92%
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	9,617,000	2,040,000	21.21%
19	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat. Obat Tradisional. Kosmetik. Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	117,541,000	50,182,900	42.69%
20	6384.EBA.956 Layanan BMN	2,500,000	1,961,200	78.45%
21	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	2,493,655,000	1,367,844,756	54.85%
TOTAL		3,290,614,000	1,754,658,062	53.32 %

B. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Strategis		Indikator	Anggaran per Sasaran Kegiatan		
				Pagu	Realisasi	Capaian%
				i	j	$k(j/i*100)$
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	48,371,000	19,705,347	40.74%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	3,140,000	1,780,000	56.69%
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13,068,250	3,025,208	23.15%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	13,068,250	3,025,208	23.15%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13,068,250	3,025,208	23.15%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	3,205,667	680,000	21.21%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3,205,666	680,000	21.21%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3,205,667	680,000	21.21%
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	29,385,250	9,498,225	32.32%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	29,385,250	9,498,225	32.32%

		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	29,385,250	9,498,225	32.32%
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	19,921,000	2,087,737	10.48%
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	29,385,250	9,498,225	32.32%
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	175,747,000	72,991,230	41.53%
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	13,068,250	3,025,208	23.15%
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	21,108,000	9,339,020	44.24%
		17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	8,643,000	4,803,500	55.58%
		18	Jumlah desa pangan aman	30,854,000	12,807,000	41.51 %
		19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24,056,000	11,325,970	47.08%
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	7,097,000	1,844,000	25.98%
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	74,557,000	21,518,163	28.86%

5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	5,000,000		0.00%
6	Layanan Publik UPT yang prima	23	Indeks Pelayanan Publik UPT	9,614,000	3,969,000	41.28%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	655,090,750	291,992,837	44.57%
		25	Nilai AKIP UPT BPOM	655,090,750	291,992,838	44.57%
		26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	655,090,750	291,992,838	44.57%
		27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	655,090,750	291,992,837	44.57%

C. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran

a) Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Capaian Output Triwulan II 2026 Balai POM di Balikpapan

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian % $e=(d/c*100)$	Pagu	Realisasi	Capaian $H=(g/f*100)$			
a		b	c	d	$e=(d/c*100)$	f	g	$H=(g/f*100)$			
1	AEA	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	7	50	5,000,000	-	0	0.00	-1.00	Tidak Efisien
2	BAH	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	21	11	52.38	9,614,000	3,969,000	41.28	0.79	-0.21	Tidak Efisien
3	BDB.001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	0.95	95	8,643,000	6,723,500	77.79	0.82	-0.18	Tidak Efisien
4	BDB.002	Desa Pangan Aman pangan	1	1	100	30,854,000	28,508,224	92.40	0.92	-0.08	Tidak Efisien
5	BDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100	24,056,000	21,737,827	90.36	0.90	-0.10	Tidak Efisien
6	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	110	70	63.64	15,708,000	8,121,673	51.70	0.81	-0.19	Tidak Efisien
7	BIA.001	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	144	72	50	19,921,000	2,703,737	13.57	0.27	-0.73	Tidak Efisien
8	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0.5	50	15,978,000	1,907,000	11.94	0.24	-0.76	Tidak Efisien
9	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	5	1	20	5,400,000	1,217,347	22.54	1.13	0.13	Efisien
10	CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100	28,230,000	28,229,985	100.00	1.00	0.00	Tidak Efisien
11	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	6	6	100	80,000,000	79,999,999	100.00	1.00	0.00	Tidak Efisien
12	PDD	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0.5	50	175,747,000	77,205,484	43.93	0.88	-0.12	Tidak Efisien

13	QCD	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM BALIKPAPAN	1	0	0	137,269,000	34,106,663	24.85	-	-	-
14	QDC.002	Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	30	0	0	3,140,000	1,780,000	56.69	-	-	-
15	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	4	0	0	7,097,000	1,844,000	25.98	-	-	-
16	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	63	30	47.62	52,273,000	13,329,420	25.50	0.54	-0.46	Tidak Efisien
17	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	116	74	63.79	48,371,000	21,245,347	43.92	0.69	-0.31	Tidak Efisien
18	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	9	5	55.56	9,617,000	2,040,000	21.21	0.38	-0.62	Tidak Efisien
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	131	65	49.62	117,541,000	50,182,900	42.69	0.86	-0.14	Tidak Efisien
20	EBA.956	Layanan BMN	1	1	100	2,500,000	1,961,200	78.45	0.78	-0.22	Tidak Efisien
21	EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0.5	50	2,493,655,000	1,367,844,756	54.85	1.10	0.10	Efisien
Efisiensi Berdasarkan Output			662	347.45	1197.603	3,290,614,000	1,754,658,062	1019.67	0.85	-0.15	Tidak Efisien

Tabel. 3.3.3 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Capaian Output Triwulan II 2026 Balai POM di Balikpapan

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026 dengan output berupa capaian setiap kegiatan, Balai POM di Balikpapan menghasilkan tingkat efisiensi sebesar -0,15 yang termasuk dalam kriteria “Tidak Efisien”. Capaian output kinerja Balai POM di Balikpapan belum tercapai secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan rincian output yang sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 terealisasi sebesar 347,45 dari target sebesar 662. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian program dan kegiatan masih dalam tahap pelaksanaan dan akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya. Meskipun

demikian, pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana, sehingga target kinerja diharapkan dapat diwujudkan secara optimal pada akhir Tahun 2026.

b) Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Indikator Kinerja Utama Triwulan II 2026 Balai POM di Balikpapan

No.	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d TW II	%	Pagu	Realisasi s.d Juni	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.7	100	101.32	48,371,000	21,245,347	43.92	2.31	1.31	Tidak Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0		0.00	3,140,000	1,780,000	56.69	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	92.80	105.45	13,068,250	3,332,355	25.50	4.14	3.14	Tidak Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	13,068,250	3,332,355	25.50	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	100	110.00	13,068,250	3,332,355	25.50	4.31	3.31	Tidak Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5	76.54	85.52	3,205,667	680,000	21.21	4.03	3.03	Tidak Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	3,205,666	680,000	21.21	4.71	3.71	Tidak Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.6	100	107.99	3,205,667	680,000	21.21	5.09	4.09	Tidak Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.5	100	102.56	29,385,250	12,545,725	42.69	2.40	1.40	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	29,385,250	12,545,725	42.69	2.34	1.34	Tidak Efisien

11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.44	95.75	96.29	29,385,250	12,545,725	42.69	2.26	1.26	Tidak Efisien
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	82.75	87.5	105.74	19,921,000	2,703,737	13.57	7.79	6.79	Tidak Efisien
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0		0.00	29,385,250	12,545,725	42.69	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.9	7.58	109.86	175,747,000	77,205,484	43.93	2.50	1.50	Tidak Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0		0.00	13,068,250	3,332,355	25.50	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.59	85.91	93.80	21,108,000	9,339,020	44.24	2.12	1.12	Tidak Efisien
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100.00	8,643,000	6,723,500	77.79	1.29	0.29	Efisien
18	Jumlah desa pangan aman	90	90	100.00	30,854,000	28,508,224	92.40	1.08	0.08	Efisien
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100.00	24,056,000	21,737,827	90.36	1.11	0.11	Efisien
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	55	110.00	7,097,000	1,844,000	25.98	4.23	3.23	Tidak Efisien
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	15	0.00	137,269,000	34,106,663	24.85	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	5,000,000	0	0.00	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	0		0	9,614,000	3,969,000	41.28	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0		0	655,090,750	369,985,735	56.48	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
25	Nilai AKIP UPT BPOM	0		0	655,090,750	369,985,735	56.48	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0		0	655,090,750	369,985,735	56.48	0.00	- 1.00	Tidak Efisien

27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0		0	655,090,750	369,985,735	56.48	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
Efisiensi Berdasarkan Indikator Kinerja Utama				1728.53			1,117.35	1.55	0.55	Efisien

Tabel. 3.3.4 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Indikator Kinerja Utama Triwulan II 2026 Balai POM di Balikpapan

Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026 dengan output berupa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Balai POM di Balikpapan menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 0,55. Mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian tersebut dikategorikan sebagai “Efisien”. Hasil tersebut didukung oleh akumulasi capaian output sebesar 1.728,53%, dibandingkan dengan akumulasi capaian input anggaran sebesar 1.117,35%, sehingga menghasilkan Indeks Efisiensi sebesar 1,55. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah mampu menghasilkan capaian kinerja yang relatif lebih tinggi. Hal tersebut mencerminkan komitmen Balai POM di Balikpapan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Berikut Perhitungan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis:

No.	Sasaran Kegiatan	%Capaian Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Pagu	Realisasi	Capaian%			
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102.25	426,610,000	168,486,888	39.49	0.4	- 0.61	Tidak Efisien
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	98.45	84,661,000	66,308,571	78.32	0.8	- 0.20	Tidak Efisien
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	110.00	7,097,000	1,844,000	25.98	0.2	- 0.76	Tidak Efisien
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0	137,269,000	34,106,663	24.85	-	- 1.00	Tidak Efisien

5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	5,000,000	0	0.00	-	- 1.00	Tidak Efisien
6	Layanan Publik UPT yang prima	0	9,614,000	3,969,000	41.28	-	- 1.00	Tidak Efisien
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	0	2,620,363,000	1,479,942,940	56.48	-	- 1.00	Tidak Efisien
Efisiensi Berdasarkan Sasaran Strategis		410.70	3,290,614,000	1,754,658,062	266	0.65	- 0.35	Tidak Efisien

Tabel. 3.3.5 Perhitungan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

Apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran yang berdasarkan pada output berupa sasaran strategis, Balai POM di Balikpapan pada Triwulan II Tahun 2026 masih termasuk dalam kriteria “Tidak Efisien (75%)”. Meskipun demikian, capaian ini sekaligus menjadi titik awal yang berharga untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi agar pemanfaatan anggaran dapat lebih optimal. Hasil tersebut menunjukkan adanya ruang perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat efektivitas program, meningkatkan kualitas output, serta memastikan setiap kegiatan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan komitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor, Balai POM di Balikpapan memiliki peluang besar untuk meningkatkan efisiensi pada triwulan berikutnya dan mendukung pencapaian sasaran strategis secara lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Balikpapan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Strategis Balai POM di Balikpapan Tahun 2025–2029. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Balai POM di Balikpapan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 102,68.% dengan predikat kinerja organisasi “Istimewa”.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai POM di Balikpapan triwulan I diperoleh dari capaian kinerja organisasi yang terdiri dari 7 Sasaran Kegiatan dengan 27 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Adapun pelaksanaan kegiatan Balai POM di Balikpapan didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA Revisi Nomor SP DIPA-063.01.2.690471/2026 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2026, dengan total pagu anggaran sebesar Rp3.290.614.000,00. Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran Balai POM di Balikpapan mencapai Rp1.754.658.062,00 atau sebesar 53,32% dari total pagu anggaran.

4.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Interim Triwulan II Tahun 2026, perlu dilakukan langkah – langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk berkomitmen dalam menerapkan perbaikan pada ketidaksesuaian

- Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dengan menerapkan manajemen risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- Melibatkan SDM dari fungsi lain dalam kegiatan sampling (DK/LK).
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan sampling dan pengujian yang telah disusun,
- Meningkatkan Sinergi dengan Kementerian/Lembaga/Stakeholder
- Meningkatkan Strategi Komunikasi, Sosialisasi dan Penyuluhan
- Menyusun konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KIE.
- Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut atas hasil survei dan rekomendasi hasil pengukuran indeks untuk peningkatan kesadaran masyarakat kedepannya

LAMPIRAN

1. DOKUMEN PK



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI KOTA BALIKPAPAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GERSON PARARAK
Jabatan : Kepala Balai POM di Balikpapan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Balikpapan



GERSON PARARAK

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI



TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI KOTA BALIKPAPAN**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,7
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89,5
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,6
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,5
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99,44
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	82,75
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	66,67
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91,59

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1
		05 - Jumlah desa pangan aman	1
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	36.36
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.85
7.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.5
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.48

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 3,228,932,000 (Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	732,672,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,496,260,000

Balikpapan, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai POM di Balikpapan



GERSON PARARAK

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI



TARUNA IKRAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

No,	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian%	Pagu	Realisasi	Capaian %
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	3165.AEA.001 Laporan Analissi Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	1	1.00	100.00	5,000,000	0	0.00%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	3	3.00	100.00	9,614,000	3,969,000	41.28%
3	3165.BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0.13	0.00	8,643,000	6,723,500	77.79%
4	3165.BDB.002 Desa Pangan Aman	0.2	0.20	100.00	30,854,000	28,508,224	92.40%

5	3165.BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	0.05	1.00	2000.00	24,056,000	21,737,827	90.36%
6	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	0	0.00	0.00	15,708,000	8,121,673	51.70%
7	3165.BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	12	12.00	100.00	19,921,000	2,703,737	13.57%
8	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0.0833	0.08	99.64	15,978,000	1,907,000	11.94%
9	3165.BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	0	0.00	0.00	5,400,000	1,217,347	22.54%
10	3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0	0.00	0.00	28,230,000	28,229,985	100.00%

11	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	5.00	100.00	80,000,000	79,999,999	100.00%
12	3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0.08	0.08	103.75	175,747,000	77,205,484	43.93%
13	3165.QCD.U38 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	0	0.00	0.00	137,269,000	34,106,663	24.85%
14	3165.QDC.002 Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	0	0.00	0.00	3,140,000	1,780,000	56.69%
15	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0	0.00	0.00	7,097,000	1,844,000	25.98%

16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	7	6.00	85.71	52,273,000	13,329,420	25.50%
17	3165.QIA.002 Sampel Obat. Obat Tradisional. Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	14	13.00	92.86	48,371,000	21,245,347	43.92%
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1	1.00	100.00	9,617,000	2,040,000	21.21%
19	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat. Obat Tradisional. Kosmetik. Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	21	20.00	95.24	117,541,000	50,182,900	42.69%

20	6384.EBA.956 Layanan BMN	0	0.00	0.00	2,500,000	1,961,200	78.45%
21	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	0.0833	0.08	100.84	2,493,655,000	1,367,844,756	54.85 %
TOTAL		64.50	62.58	97.03%	3,290,614,000	1,754,658,062	53.32 %

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

No.	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target s.d. TW II	Realisasi s.d TW II	%	Pagu	Realisasi s.d Juni	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.7	100	101.32	48,371,000	21,245,347	43.92	2.31	1.31	Tidak Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0		0.00	3,140,000	1,780,000	56.69	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	92.80	105.45	13,068,250	3,332,355	25.50	4.14	3.14	Tidak Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0.00	13,068,250	3,332,355	25.50	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	100	110.00	13,068,250	3,332,355	25.50	4.31	3.31	Tidak Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	89.5	76.54	85.52	3,205,667	680,000	21.21	4.03	3.03	Tidak Efisien

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	3,205,666	680,000	21.21	4.71	3.71	Tidak Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.6	100	107.99	3,205,667	680,000	21.21	5.09	4.09	Tidak Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.5	100	102.56	29,385,250	12,545,725	42.69	2.40	1.40	Tidak Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100.00	29,385,250	12,545,725	42.69	2.34	1.34	Tidak Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	99.44	95.75	96.29	29,385,250	12,545,725	42.69	2.26	1.26	Tidak Efisien
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	82.75	87.5	105.74	19,921,000	2,703,737	13.57	7.79	6.79	Tidak Efisien
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0		0.00	29,385,250	12,545,725	42.69	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6.9	7.58	109.86	175,747,000	77,205,484	43.93	2.50	1.50	Tidak Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0		0.00	13,068,250	3,332,355	25.50	0.00	- 1.00	Tidak Efisien

16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.59	85.91	93.80	21,108,000	9,339,020	44.24	2.12	1.12	Tidak Efisien
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100.00	8,643,000	6,723,500	77.79	1.29	0.29	Efisien
18	Jumlah desa pangan aman	90	90	100.00	30,854,000	28,508,224	92.40	1.08	0.08	Efisien
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100.00	24,056,000	21,737,827	90.36	1.11	0.11	Efisien
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50	55	110.00	7,097,000	1,844,000	25.98	4.23	3.23	Tidak Efisien
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	15	0.00	137,269,000	34,106,663	24.85	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	5,000,000	0	0.00	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	0		0	9,614,000	3,969,000	41.28	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0		0	655,090,750	369,985,735	56.48	0.00	- 1.00	Tidak Efisien

25	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	655,090,750	369,985,735	56.48	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	655,090,750	369,985,735	56.48	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	655,090,750	369,985,735	56.48	0.00	- 1.00	Tidak Efisien
Efisiensi Berdasarkan Indikator Kinerja Utama				1728.53		1,117.35	1.55	0.55	Efisien

Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Per Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	%Capaian Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Pagu	Realisasi	Capaian%			
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102.25	426,610,000	168,486,888	39.49	0.4	- 0.61	Tidak Efisien
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	98.45	84,661,000	66,308,571	78.32	0.8	- 0.20	Tidak Efisien
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	110.00	7,097,000	1,844,000	25.98	0.2	- 0.76	Tidak Efisien
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0	137,269,000	34,106,663	24.85	-	- 1.00	Tidak Efisien

5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00	5,000,000	0	0.00	-	- 1.00	Tidak Efisien
6	Layanan Publik UPT yang prima	0	9,614,000	3,969,000	41.28	-	- 1.00	Tidak Efisien
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	0	2,620,363,000	1,479,942,940	56.48	-	- 1.00	Tidak Efisien
Efisiensi Berdasarkan Sasaran Strategis		410.70	3,290,614,000	1,754,658,062	266	0.65	- 0.35	Tidak Efisien

4. KERTAS KERJA RHPK

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	TARGET Sampel Sediaan Farmasi	TARGET Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Januari	98.70	98.70	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	tidak ada kendala	lanjutkan pelaksanaan sesuai reniak
Februari	98.70	98.70	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	tidak ada kendala	lanjutkan pelaksanaan sesuai reniak
Maret	98.70	98.70	96.43	100.00	#DIV/0!	100.00	98.81	tidak ada kendala	lanjutkan pelaksanaan sesuai reniak
April	98.70	98.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	pengujian kimia pada 4 sampel kos belum	lanjutkan pelaksanaan sesuai reniak
Mei	98.70	98.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tidak ada kendala	lanjutkan pelaksanaan sesuai reniak
Juni	98.70	98.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tidak ada kendala	lanjutkan pelaksanaan sesuai reniak

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	TARGET Sampel Pangan Olahan	TARGET Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Kelengkapan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Kelengkapan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Kelengkapan Waktu Pelaporan Sampel dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Januari		88.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	100.00	tidak ada kendala	lanjutkan reniak
Februari		88.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	100.00	tidak ada kendala	lanjutkan reniak
Maret		88.00	100.00	100.00	60.00	100.00	60.00	0.00	68.00	- Terdapat sampel belum selesai uji karena terdapat 2 sampel belum selesai uji: 1 sampel sampel mei belum selesai uji shinoaga	- follow up progres ke balai penilai
April		88.00	100.00	100.00	84.62	100.00	84.62	100.00	95.38		follow up ke balai penilai
Mei		88.00	100.00	100.00	68.42	100.00	68.42	100.00	90.53		follow up progres ke balai penilai

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April	100	0	Tidak ada sampel KLB di Bulan April 2025	Tetap memantau informasi terkini tentang kejadian KLB di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan
Mei	100	0	Tidak ada sampel KLB di Bulan Mei 2026	Tetap memantau informasi terkini tentang kejadian KLB di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan
Juni	100	0	Tidak ada sampel KLB di Bulan Juni 2026	Tetap memantau informasi terkini tentang kejadian KLB di wilayah pengawasan Balai POM di Balikpapan

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung*
Januari	86.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	belum ada pelaksanaan kegiatan	follow up reniak	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12idoGTxmnkKzLHQ-GzKhXczv13K1nIK-5d
Februari	86.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	belum ada pelaksanaan kegiatan	follow up reniak	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12idoGTxmnkKzLHQ-GzKhXczv13K1nIK-5d
Maret	86.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	#DIV/0!	62.50	LHU belum terbit sehingga belum bisa diambil kesimpulan terhadap sampel	follow up progres ke Balai penguji	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12idoGTxmnkKzLHQ-GzKhXczv13K1nIK-5d
April	86.00	100.00	100.00	50.00	100.00	50.00	#DIV/0!	61.25	terdapat 1 sampel (0014) belum selesai uji	follow up ke Balai penguji, evaluasi perencanaan agar pelaksanaan sampling dapat dilakukan lebih awal	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12idoGTxmnkKzLHQ-GzKhXczv13K1nIK-5d
Mei	86.00	100.00	100.00	60.00	100.00	60.00	#DIV/0!	85.00	terdapat 2 sampel belum selesai uji sehingga belum dapat diambil kesimpulan	follow up progres ke Balai penguji	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12idoGTxmnkKzLHQ-GzKhXczv13K1nIK-5d
Juni	86.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	tidak ada kendala	monitoring feedback dari lintas sekt	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12idoGTxmnkKzLHQ-GzKhXczv13K1nIK-5d

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kondisi	Rencana Tindak Lanjut
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	89.50	77.78	100.00	88.89	stakeholder belum melakukan tindak lanjut terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT	memberikan surat peringatan kedua kepada stakeholder untuk melakukan tindak lanjut terhadap surat yang telah diterbitkan oleh UPT
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	89.50	66.67	100.00	83.33	stakeholder belum melakukan tindak lanjut terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT	memberikan surat peringatan kedua kepada stakeholder untuk melakukan tindak lanjut terhadap surat yang telah diterbitkan oleh UPT
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni		73.08	80.00	76.54	stakeholder belum melakukan tindak lanjut terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT	memberikan surat peringatan kedua kepada stakeholder untuk melakukan tindak lanjut terhadap surat yang telah diterbitkan oleh UPT

6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00	tidak ada kendala	melaksanakan pengawasan sesuai renrak yang dibuat
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00	tidak ada kendala	melaksanakan pengawasan sesuai renrak yang dibuat
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	100.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00	tidak ada kendala	melaksanakan pengawasan sesuai renrak yang dibuat

7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa 2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Kelepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTPI) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	92.60	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	tidak ada kendala	melaksanakan pengawasan sesuai renrak
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTPI) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	92.60	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	tidak ada pengawasan bulan mei, direncanakan bulan berikutnya	melaksanakan pengawasan sesuai renrak
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTPI) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	92.60	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	100.00	tidak ada kendala	melaksanakan pengawasan sesuai renrak

8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Satisf Obat	% Satisf OBA	% Satisf SK	% Satisf Kosmetik	% Satisf	Kendala	RTL
Persentase fasilitas dis	April	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	menentukan	menentukan
Persentase fasilitas dis	Mei	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	menentukan	menentukan
Persentase fasilitas dis	Juni	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	menentukan	Melaksanakan

9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Rentak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Satisf PO	Kendala	RTL
Persentase sarana distribusi	Januari	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	belum ada	dijadwalkan di
Persentase sarana distribusi	Februari	4	4	4	20,00	4	4	70,00	4	4	10,00	100,00	tidak ada	pelaksanaan
Persentase sarana distribusi	Maret	7	7	7	20,00	7	7	70,00	7	7	10,00	100,00	tidak ada	pelaksanaan
Persentase sarana distribusi	April	8	8	8	20,00	8	8	70,00	8	8	10,00	100,00	tidak ada	pelaksanaan
Persentase sarana distribusi	Mei	9	9	9	20,00	9	9	70,00	9	9	10,00	100,00	tidak ada	pelaksanaan
Persentase sarana distribusi	Juni	13	13	13	20,00	13	13	70,00	13	13	10,00	100,00	tidak ada	pelaksanaan

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO	Kendala	RTL	Link Data Dukung*
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	99,44	66,57	90,87	93,33	88,89	92,88	85,53	Keterbatasan personil	Mengusahkan penyelesaian di target bulan berikutnya	https://drive.google.com/drive/folders/1myyKwaGq5dn95AfsAtT4F5zXGfmz_UMh?usp=sharing
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	99,44	78,57	94,40	94,59	100,00	98,00	93,11	Tidak ada kendala	Mengusahkan penyelesaian di target bulan berikutnya	https://drive.google.com/drive/folders/1myyKwaGq5dn95AfsAtT4F5zXGfmz_UMh?usp=sharing
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	99,44	91,43	91,82	95,65	100,00	99,83	95,75	iklan obat media lokal dan iklan OBA dengan klaim dokter belum ada, sedangkan untuk iklan lainnya tidak ada kendala hanya belum di input ke SIPT	koordinasi mengenai langganan media cetak lokal dengan tata usaha dan komoditi yang belum tercapai akan di lanjutkan pengawasan pada bulan selanjutnya	https://drive.google.com/drive/folders/1myyKwaGq5dn95AfsAtT4F5zXGfmz_UMh?usp=sharing

11. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label (A)	% Ketepatan waktu pelaporan label (B)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektr	April	82,75	100,00	100,00	100,00	tidak ada kendala	melakukan pengawasan produk sesuai rencana
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektr	Mei	82,75	100,00	90,00	95,00	keterlambatan pelaporan dari spv 1 ke kepala upt	melakukan pengawasan produk sesuai rencana
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektr	Juni	82,75	100,00	75,00	87,50	keterlambatan pelaporan dari spv 1 ke kepala upt	melakukan pengawasan produk sesuai rencana

12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar

Bulan s.d. TIV IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April	5.9	6.34	-	melakukan kegiatan sesuai rentak
Mei	5.9	6.34	-	melakukan kegiatan sesuai rentak
Juni	6.9	7.58	-	melakukan kegiatan sesuai rentak

13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April	91,59	83,88	Aspek pemahaman audiens pada KIE tatap muka dan media serta manfaat pada KIE media belum mencapai target.	Melaksanakan KIE sesuai rencana pelaksanaan dengan pemberian materi yang lebih menarik dan mudah dipahami
Mei	91,59	83,88	Aspek pemahaman audiens pada KIE tatap muka dan media serta manfaat pada KIE media belum mencapai target.	Melaksanakan KIE sesuai rencana pelaksanaan dengan pemberian materi yang lebih menarik dan mudah dipahami
Juni	91,59	85,91	Aspek pemahaman audiens pada KIE tatap muka dan media serta manfaat pada KIE media belum mencapai target.	Melaksanakan KIE sesuai rencana pelaksanaan dengan pemberian materi yang lebih menarik dan mudah dipahami

14. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SANA Sekolah (25%)	Realisasi Keamanan Pangan (20%)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (25%)	Pengawasan (5%)	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kemuka	RTL
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembt April		70	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	70.00		Pada kegiatan sosialisasi	Melakukan persiapan
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembt Mei		95	25.00	20.00	25.00	12.50	0.00	82.50		Adanya penyesuaian jadwal dengan	Regulasi Sertifikasi akan
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembt Juni		95	25.00	20.00	25.00	25.00	0.00	95.00		Sertifikasi telah dilaksanakan pada	Selanjutnya kegiatan pengawal

15. Jumlah desa pangan aman

Bulan	Target	Advokasi Awakpangan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Disseminasi Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pemeriksaan Lintas Sektor) (20%)	Pengawasan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kandasa	RTL	Link Data Dukung
April	25	25.00					25.00		Pervakilan Kelurahan yang akan diintervensi tidak hadir dalam kegiatan Advokasi secara langsung terhadap kelurahan yang akan ditre	■ Laporan dan Kertas Kerja	
Mei	70	25.00	25.00	20.00			70.00		Sarana dan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis	Pelaksanaan tahapan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di	■ Laporan dan Kertas Kerja
Juni	90	25.00	25.00	20.00	20.00		90.00		Sarana dan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan kurang memadai	Pelaksanaan tahapan pengawalan desa-intervensi tahun sebel	■ Laporan dan Kertas Kerja

16. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum Advokasi Berbasis Pasar dan Lintas Sektor Pasar (25%)	Berkes dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (20%)	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi (20%)	Pengawasan (10%)	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kemuka	RTL	Link Data Dokumentasi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom April		35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00		Pervakilan Pasar	Advokasi	■ Balai POM di Balikpapan
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom Mei		50	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00		Sarana dan	Pelaksanaan	■ Balai POM di Balikpapan
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Kom Juni		70	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00				■ Balai POM di Balikpapan

17. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	April		95.00	35.00	35.00	33.00	5
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Mei		70.00	35.00	35.00	35.00	4
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Juni		150.00	35.00	35.00	55.00	4

18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
April	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	operasi penindakan namun belum layak naik ke projustitia	kegiatan operasi penindakan dilaksanakan dibulan Mei
Mei	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Belum ada perkara atau telah dilakukan operasi penindakan namun belum layak naik ke projustitia	kegiatan operasi penindakan dilaksanakan dibulan Juni
Juni	0	1	0	1	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.00		Sudah keluar SPDP per tanggal 29

19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April	50	50		Kegiatan terlaksana sesuai target
Mei	50	50		Kegiatan terlaksana sesuai target
Juni	50	50		Kegiatan terlaksana sesuai target

20. Indeks Pelayanan Publik UPT

Bulan s.d. Triwulan (Jan - Des)	Indeks Pelayanan Publik UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April	-	-	Pelaksanaan PEKPPP untuk mendapatkan indeks pelayanan publik UPT belum dimulai	Pelaksanaan PEKPPP berkoordinasi dengan Biro Hukum BPOM
Mei	-	-	Pelaksanaan PEKPPP untuk mendapatkan indeks pelayanan publik UPT belum dimulai	Pelaksanaan PEKPPP berkoordinasi dengan Biro Hukum BPOM
Juni	-	-	Pelaksanaan PEKPPP untuk mendapatkan indeks pelayanan publik UPT belum dimulai	Pelaksanaan PEKPPP berkoordinasi dengan Biro Hukum BPOM

21. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April	-	-	Pada tahun 2025, telah dilakukan penilaian mandiri pada LKE ZI, diperoleh hasil evaluasi oleh inspektorat dengan nilai 72 yang mana nilai tersebut masih kurang dari Target Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT pada tahun 2026 yaitu 75.	Melakukan asesmen mandiri LKE ZI sesuai dengan pedoman dan hasil evaluasi penilaian mandiri LKE ZI tahun 2025
Mei	-	-	Pada tahun 2025, telah dilakukan penilaian mandiri pada LKE ZI, diperoleh hasil evaluasi oleh inspektorat dengan nilai 72 yang mana nilai tersebut masih kurang dari Target Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT pada tahun 2026 yaitu 75.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta rekomendasi dari hasil pelaksanaan desk LKE ZI Tahun 2026
Juni	-	-	Pada tahun 2025, telah dilakukan penilaian mandiri pada LKE ZI, diperoleh hasil evaluasi oleh inspektorat dengan nilai 72 yang mana nilai tersebut masih kurang dari Target Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT pada tahun 2026 yaitu 75.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta rekomendasi dari hasil pelaksanaan desk LKE ZI Tahun 2027

22. Nilai AKIP UPT BPOM

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai AKIP UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April			Nilai AKIP Balai POM di Balikpapan pada Tahun 2025 belum mencapai target dengan hasil akhir nilai dengan predikat Baik	Melakukan identifikasi terhadap komponen yang mengalami penilaian dan penurunan serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang disampaikan tim APIP
Mei			Nilai AKIP Balai POM di Balikpapan pada Tahun 2025 belum mencapai target dengan hasil akhir nilai dengan predikat Baik	Melakukan identifikasi terhadap komponen yang mengalami penilaian dan penurunan serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang disampaikan tim APIP
Juni				

23. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Bulan s.d. Triwulan IV (Jan - Des)	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April	-	-	Tidak ada kendala	Walaupun pada TA 2025 nilai NKA sudah mencapai target namun tetap perlu dikaji lebih lanjut komponen yang bisa dioptimalkan agar Nilai Kinerja Anggaran meningkat dari tahun sebelumnya
Mei	-	-	Tidak ada kendala	Walaupun pada TA 2025 nilai NKA sudah mencapai target namun tetap perlu dikaji lebih lanjut komponen yang bisa dioptimalkan agar Nilai Kinerja Anggaran meningkat dari tahun sebelumnya
Juni	-	-	Tidak ada kendala	Walaupun pada TA 2025 nilai NKA sudah mencapai target namun tetap perlu dikaji lebih lanjut komponen yang bisa dioptimalkan agar Nilai Kinerja Anggaran meningkat dari tahun sebelumnya

24. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
April	5	-	Tidak ada kendala	Menjaga konsistensi dalam mengidentifikasi, memantau, mengelola risiko serta tindakan pencegahannya. Menginternasaskan manajemen risiko dalam pelaksanaan kerja sehari-hari
Mei	5	-	Tidak ada kendala	Menjaga konsistensi dalam mengidentifikasi, memantau, mengelola risiko serta tindakan pencegahannya. Menginternasaskan manajemen risiko dalam pelaksanaan kerja sehari-hari
Juni	5	-	Tidak ada kendala	Menjaga konsistensi dalam mengidentifikasi, memantau, mengelola risiko serta tindakan pencegahannya. Menginternasaskan manajemen risiko dalam pelaksanaan kerja sehari-hari

5. PENGINTUPAN CAPAIAN KINERJA

2026

User - Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan

Panduan

Data Realisasi Iku

Pilih Bulan

April

Kirim Data Terpilih

Export Data

Cari

	SASARAN	KPI	BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KETERANGAN	KENDALA	STATUS
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	95,7	100	101,32%	sesuai rencana	pengujian kimia pada 4 sampel koj belum dilakukan, namun telah dilakukan lock off pada sistem SIPT	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85,0	95,56	106,39%	pelaksanaan baik	terdapat 2 sampel belum selesai uji 1 sampel (0009) TMS harus diuji ulang, 1 sampel (0012) belum selesai uji	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	April	100,0	0	0,00%	Tidak ada sampel KLB keracunan pangan yang disampling dan diuji di Bulan April 2026	Nilai	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85,0	81,25	94,48%	pelaksanaan cukup	terdapat 1 sampel (0014) belum selesai uji	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan	April	88,5	88,89	99,32%		stakeholder belum melakukan tindak lanjut terhadap surat	

2026

User - Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan

Panduan

Data Realisasi Iku

Pilih Bulan

Mei

Kirim Data Terpilih

Export Data

Cari

	SASARAN	KPI	BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KETERANGAN	KENDALA	STATUS
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja LPT	Persentase sampel sediaan farmasi bersiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	98.7	100	101.32%	+	Tidak ada kendala	+
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja LPT	Persentase sampel pangan olahan bersiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	86.0	95.53	102.68%	+	sampel mei belum selesai uji sehingga belum dapat diambil kesimpulan dan dilaporkan	+
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja LPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Mei	100.0	0	0.00%	Tidak ada sampel KLB di Bulan Mei 2025	NIHIL	+
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja LPT	Persentase sampel PIRT bersiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	86.0	85	98.84%	-	terdapat 2 sampel belum selesai uji sehingga belum dapat diambil kesimpulan	+
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja LPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Mei	89.5	83.33	93.11%	-	stakeholder belum melakukan tindak lanjut terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPT	+

2026 User - Balai Pengawas Obat dan Makanan di Balikpapan Panduan									
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	86.0	100	116.20%	sesuai target	tidak ada kendala; seluruh target sampel sudah disampling, uji, dan ditindaklanjuti sesuai pedoman sampling	Verified	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Juni	89.5	75.54	85.52%	-	stakeholder belum melakukan tindak lanjut, temapat surat rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT	Verified	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	100.0	100	100.00%	sesuai target	tidak ada kendala	Verified	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	92.6	100	107.99%	sesuai target	tidak ada kendala	Verified	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	97.5	100	102.56%	-	menentukan target sarana yang diperiksa	Verified	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	100.0	100	100.00%	-	tidak ada kendala	Verified	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Juni	89.44	95.1	96.84%	-	iklan obat media lokal dan iklan OBA dengan klaim dokter belum ada, sedangkan untuk iklan lainnya tidak ada kendala hanya belum di input ke SIRT	Verified	

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BALIKPAPAN

NOTA DINAS
NOMOR : PR.10.01. 47B.06.26.187

Yth. : ASN Balai POM di Balikpapan
Dari : Kepala Balai POM di Balikpapan
Lampiran : -
Hal : Undangan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan
II dan Perencanaan bulan Juli Tahun 2026
Tanggal : 30 Juni 2026

Sehubungan dengan perlunya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II dan Perencanaan bulan Juli Tahun 2026, bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada seluruh pegawai untuk menghadiri rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II dan Perencanaan bulan Juli tahun 2026, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 06 Juli 2026
Waktu : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Rapat Balai POM di Balikpapan

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Gerson Pararak, S.Si., Apt., M.H

NOTULENSI RAPAT

Pimpinan Rapat : Gerson Pararak., S.Si., Apt., M.H.
 Peserta Rapat : Terlampir
 Notulen : Febrianti, S.Ak
 Tempat : Ruang Rapat
 Hari / Tanggal : 06 Juli 2026
 Waktu : 09.00 – selesai
 Agenda Rapat : Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II dan Perencanaan bulan Juli Tahun 2026.

Notulensi Rapat :

Pada tanggal 06 Juli 2026 dilaksanakan Rapat Monev Kegiatan Triwulan II dan Perencanaan bulan Juli Tahun 2026 di lingkungan Balai POM Balikpapan dengan peserta berjumlah 20 orang pegawai Balai POM di Balikpapan. Kegiatan diawali dengan pembukaan dari Kepala Balai POM di Balikpapan.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan capaian kinerja pada Triwulan II dan Perencanaan bulan Juli Tahun 2026 dan kegiatan yang akan datang. Adapun hal-hal yang dibahas sebagai berikut:

Kode IKK	Indikator	Notulen	Target Juni	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	Kendala Keberhasilan / Kegagalan	Rencana Tindak Lanjut	Arahan Pimpinan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak ada kendala terkait laporan pelaksanaan sampling	98,7	100	101,32	Sangat Baik	Terdapat permintaan dari lab untuk mengirim sampel di akhir bulan sebelum bulan uji	Melaksanakan sesuai rekomendasi lab	- Melaksanakan sesuai rekomendasi lab - Petugas agar dibuatkan ST dalam rentang waktu satu bulan agar dapat lebih fleksibel melaksanakan sampling
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	tidak ada kendala terkait pelaksanaan sampling	88	92,80	105,45	Sangat Baik	Untuk parameter penilaian laporan dan pengambilan kesimpulan kemungkinan tidak akan bisa 100% karena sampel masih masuk timeline pengujian sampai	Melaksanakan sesuai renlak	Melaksanakan sesuai renlak. Tetap lakukan koordinasi ke lab untuk progres pengujian sampel

							tenggat waktu pelaporan kinerja		
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	tidak ada sampel KLB yang disampling dan diuji pada bulan Juni	100	0	0,00	Tidak Ada KLB	tidak ada kendala	memonitoring berita terkait KLB di wilayah kerja	melakukan monitoring terkait berita atau kejadian KLB di wilayah kerja
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Seluruh target sampel telah disampling dan telah bersurat ke dinkes terkait hasil pelaksanaan sampling	86	100	116,28	Tidak dapat disimpulkan	Tidak ada kendala	Monitoring feedback dari dinkes	Melakukan tindak lanjut bersama dinkes untuk sampel Nikimie Black Garlic karena pada label tercantum klaim kesehatan sementara nomor izin yang diajukan berupa PIRT sehingga perlu kejelasan komitmen dari pelaku usaha
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Masih terdapat beberapa pelaku usaha dan linsek belum mengirimkan CAPA. Terhambat karena perbaikan yang belum selesai dilakukan	89,5	76,54	85,52	Cukup	kendala pihak linsek dan sarana yang sulit dihubungi	Melakukan jemput bola untuk menyelesaikan CAPA dari sarana	masing-masing PIC SIPT diharapkan untuk mengingatkan sarana dalam menyelesaikan CAPA
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Seluruh target sarana telah diperiksa dan telah dilakukan tindak lanjut bersama lintas sektor terhadap sarprod Rumah Madu Al-Ikhlas	100	100	100,00	Baik	Tidak ada kendala	Monitoring progres tindak lanjut dari Rumah Madu Al-Ikhlas	Monitoring progres tindak lanjut dari Rumah Madu Al-Ikhlas sampai batas waktu yang telah disepakati bersama (6 bulan dari 30 Juni 2026). Apabila ingkar, maka sarana produksi harus di PSK dan produk beredar tanpa izin ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilaksanakan pemeriksaan sebanyak 3 dari 7 target sarana	92,6	100	107,99	Sangat Baik	Target terlalu sedikit sementara sarana yang butuh perhatian banyak	Review kembali target sarana	Lakukan review target, masukkan Selera Borneo sebagai target sarana tahun ini

9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	pemeriksaan sarana dilakukan sesuai dengan renlak yang telah ditentukan dengan capaian pada semester 1 mencapai 56%	97,5	100	102,56	Sangat Baik	Tidak ada kendala	melaksanakan inspeksi sesuai dengan renlak bulanan	melanjutkan kegiatan pemeriksaan sesuai renlak
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi target 13 dari 22 sarana	100	100	100,00	Baik	Tidak ada kendala	Melanjutkan kegiatan sesuai rencana	Diperhatikan untuk inspeksi HSM agar disesuaikan dengan peraturan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tindak lanjut terhadap pengawasan iklan pada media lokal dengan berlangganan media cetak lokal disambut baik oleh Tim Tata Usaha dan akan berlangganan per Agustus 2026. Mengenai feedback pusat perihal capaian Ketepatan waktu pelaporan UPT untuk iklan OBA, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan nilai "0" akan diperbaiki dengan mengingatkan kembali petugas input pengawasan iklan.	99,44	96,10	96,64	Baik	iklan obat media lokal belum ada, sedangkan untuk iklan lainnya tidak ada kendala hanya belum di input ke SIPT	koordinasi mengenai langganan media cetak lokal dengan tata usaha dan komoditi yang belum tercapai akan di lanjutkan pengawasan pada bulan selanjutnya	Silahkan untuk berkoordinasi mengenai berlangganan media cetak dan harap lebih diperhatikan lagi perihal timeline input SIPT
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	pemenuhan target sudah mencapai 100% namun ketepatan waktu belum mencapai target	82,75	87,50	105,74	Sangat Baik	ketepatan waktu pelaporan belum memenuhi ekspektasi	perbaikan ketepatan waktu pelaporan pengawasan di SIPT	melaksanakan pengawasan label sesuai dengan renlak dan target capaian
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	-	-	-	-	Dinilai pada Akhir Tahun			
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan lab pada TW 2 menjadi 7,58. Terdapat peningkatan pada komponen ruang lingkup dan kompetensi	6,9	7,58	109,86	Sangat Baik	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana (peralatan dan bangunan) untuk melakukan pengujian secara kimia dan mikrobiologi yang sesuai dengan laboratorium tingkat 2.	Mengusulkan pengadaan peralatan laboratorium serta penyewaan gedung laboratorium dalam perencanaan anggaran Tahun 2027. Untuk saat ini Balai POM di Balikpapan melakukan pengujian dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada.	Melanjutkan kegiatan sesuai renlak

15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	Dinilai pada Akhir Tahun				
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pada bulan Juni terealisasi dalam kegiatan KIE Media melalui Layanan informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan melalui Media Sosial dan Media Online bulan Juni 2026	91.59	85,91	93,80	Baik	Aspek pemahaman audiens pada KIE tatap muka dan media serta manfaat pada KIE media belum mencapai target	Melaksanakan KIE sesuai rencana pelaksanaan dengan pemberian materi yang lebih menarik dan mudah dipahami	KIE Media bisa dilaksanakan dalam bentuk video podcast dengan narasumber dari fungsi lain secara bergilir
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Kegiatan tahap sertifikasi pada SMP N 13 PPU telah dilaksanakan tanggal 17 Juni 2026	95	95,00	100,00	Baik	Tidak ada kendala	Pelaksanaan tahap pengawasan sekolah intervensi tahun sebelumnya akan dilaksanakan pada bulan Juli	Pengawasan desa dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan sekolah pada bulan Juli
18	Jumlah desa pangan aman	Pada bulan Juni telah terealisasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman tanggal 18 Juni 2026. Selanjutnya tahapan pengawasan akan dilaksanakan bulan Juli pada Kelurahan Gunung Sari Ilir yang telah diintervensi pada tahun sebelumnya sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan	90	90	100,00	Baik	Sarana dan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan kurang memadai	Pelaksanaan tahapan pengawasan desa intervensi tahun sebelumnya dilaksanakan di bulan Juli sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan	Pengawasan desa dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan sekolah
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Seluruh Tahapan Selesai Dilaksanakan	100	100	100,00	Baik	1. Lintas Sektor (OIKN) belum membuat rencana aksi tahun 2027 karena terdapat penyelarasan program kerja di OIKN dan anggaran tahun 2027 2. Terdapat kendala input laporan pada aplikasi SI PAMAN sehingga pelaporan kegiatan terlambat	1. Berkoordinasi dengan lintas sektor 2. Berkomunikasi kepada PIC aplikasi SI PAMAN, Melaporkan laporan secara manual	

20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Tahapan kegiatan sertifikasi sudah dilaksanakan sesuai perencanaan	50	46,25	92,50	Baik	Pelaku usaha yang telah ditargetkan berubah tempat produksi, sehingga target diganti	Melakukan pendampingan kembali pada sarana produksi kosmetik pengganti	Melanjutkan kegiatan sertifikasi sesuai renlak
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	- Sarana yang bentuknya toko diperiksa terlebih dahulu, bisa minta ke pemeriksaan untuk membantu. Bisa dijadwalkan pemeriksaan sarana yang bentuknya toko. - Pengaktifan kembali Database penindakan terkait pembinaan dan sarana. - Minggu ini akan dijadwalkan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dengan tembusan ke Korwas Polda Kaltim - Ahli dari Balai POM di Balikpapan an Meylandika. - Kasus di passer akan dijadwalkan di akhir bulan setelah dilakukan Tahap 1 di Balikpapan. - Laporan Intelijen, Penyidikan dan Penanganan Barang Bukti sudah diinput di ADP dan dilaporkan ke pusat	0	15	-	tidak dapat dihitung, tidak ada target dibulan juni	Keterbatasan jumlah SDM di Fungsi Penindakan	Penyelesaian Berkas Perkara di minggu ke 3 atau ke 4 bulan Juli	Segera di jadwalkan untuk pelaksanaan Gelar Perkara Penetapan Tersangka dan penyelesaian Administrasi Penindakan
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	- Capaian 100% dan terlaksana sesuai dengan target - Patroli siber sudah dilaporkan sesuai dengan timeline - Profiling untuk bulan Juni NIHIL dan sudah dilaporkan ke pusat - Kerawanan Kejahatan untuk bulan Juni tidak target - Kegiatan Cegah Tangkal rekomendasi menunggu surat dari pusat dan analisa sudah proses pengumpulan data	50	50	100,00	Baik	Tidak ada kendala	Dilaksanakan sesuai dengan target	Tetap dilaksanakan sesuai dengan target
23	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	-	-
24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	-	-

25	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	-	-
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	-	-
27	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		-	Dinilai pada Akhir Tahun	-	-	-

Dari rapat yang dilakukan sangat diharapkan seluruh pegawai dapat mengetahui capaian dan juga target yang harus di capai Balai POM di Balikpapan. Untuk ini kegiatan ini harus terus selalu di lakukan dengan materi yang lebih lengkap dan dapat menjelaskan hal apa saja yang perlu evaluasi dan ditingkatkan.

Tambahan:

1. Pada tanggal 22 Juni 2026, terdapat pelaksanaan layanan PPID sebagai bentuk pemenuhan keterbukaan informasi publik, yang dilaksanakan sesuai mekanisme pelayanan informasi di lingkungan Balai POM di Balikpapan. Kegiatan layanan PPID tersebut mencakup penerimaan, pencatatan, penelaahan, dan tindak lanjut atas permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Data yang diminta ditujukan untuk penulisan tugas akhir penyelesaian studi dengan rencana judul tugas akhir "Tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Balikpapan".
2. Beberapa hal yang harus ditindaklanjuti sehubungan dengan Pertanggungjawaban keuangan:
 - Untuk kedepannya klaim transport dari Balikpapan menuju Samarinda maksimal senilai Rp 1.300.000 per ST
 - Untuk tujuan Balikpapan menuju Paser maksimal senilai Rp 2.000.000 per ST
 - Jika berangkat hanya 2 orang/ petugas wajib menggunakan mobil kantor, dan bisa klaim bensin saja
3. Lalu untuk timeline pertanggungjawaban keuangan disepakati Bersama bahwa:
 - Untuk klaim pertanggungjawaban perjalanan dinas adalah 1 Hari Kerja setelah selesai tugas
 - Untuk klaim pertanggungjawaban acara dan kegiatan penindakan Adalah 3 Hari Kerja setelah selesai tugas

- Lalu untuk proses dari operator ke PPK maksimal adalah 2 Hari Kerja
- Lalu untuk Proses dari PPK dan seterusnya sesuai dengan timeline dari Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Kepala Balai POM di Balikpapan,



Gerson Pararak, S.Si., Apt., M.H.

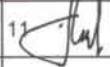
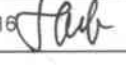
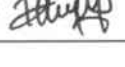
DAFTAR HADIR

BALAI POM DI BALIKPAPAN

Hari, Tanggal : Senin, 06 Juli 2026

Waktu : 09.00 WITA – selesai

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II dan Perencanaan bulan Juli Tahun 2026

NO	NAMA	Jenis Kelamin	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Gerson Pararak, S.Si, Apt., M.H.	L	Kepala Balai POM di Balikpapan	1 
2	Denisa Ayu Fitriyari, S.T.P	P	Kasubbag Tata usaha Balai POM di Balikpapan	2 
3	Indah Widiarini, S.Farm, Apt.	P	PFM Ahli Muda	3 
4	Eflinora Norma Furqia S.Farm, Apt	P	PFM Ahli Muda	4 CUTI
5	Gabriella Christyani, S.Farm, Apt.	P	PFM Ahli Muda	5 
6	Lucia Adventiana S.Farm, Apt	P	PFM Ahli Pertama	6 
7	Riskha Rinanda S.K.M.	P	PFM Ahli Pertama	7 
8	Bella Nindita Prabawati S.H	P	PFM Ahli Pertama	8 
9	Nikma Ulya S.Si	P	PFM Ahli Pertama	9 
10	Nitra Wahyuningsih S.Si	P	PFM Ahli Pertama	10 DL
11	Hanafi Basri Waskita, S.AK	L	PK APBN Mahir	11 
12	Annisa Hidayatika	P	PFM Ahli Pertama	12 
13	Meylandika Saputri, S.Farm	P	PFM Terampil Pelaksana	13 
14	Kelvin Rodi, A.Md	L	Pranata Komputer Pelaksana	14 
15	Ayu Tiara Kusuma	P	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	15 
16	Adinda Putri Wulansari	P	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	16 
17	Febrianti	P	Perencana Ahli Pertama	17 
18	Roby Ardila Sahab	L	Pranata Sumber Daya Manusia	18 
19	Rahmawati Diyah Nugraheni	P	Penata Laksana Barang Terampil	19 
20	Arfian Radyka Pradana, S.Farm., Apt	L	PFM Ahli Pertama	20 
21	Fitriani, S.Farm., Apt	P	PFM Ahli Pertama	21 
22	Apt. Salmawati., Apt	P	PFM Ahli Pertama	22 



Mengetahui
Kepala Balai POM di Balikpapan,

Gerson Pararak, S.Si, Apt., M.H.

Lampiran :



Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Capaian Program / Kegiatan

Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Balikpapan

NO	KRO/ RO	Kondisi Awal/ Kondisi Periode Sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian	Kendala/ Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL Periode Sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai/Belum	Jika Belum isi Timeline penyelesaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3165.AEA.001 Laporan Analissi Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Laporan Cegah Tangkal & Laporan Siber	14	7	50	tidak ada kendala	dilaksanakan sesuai dengan target	Bulan berikutnya	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan renlak	Belum	Desember 2026	
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	"- Layanan Pengaduan dan Informasi Maret 2026 - Rekomendasi IP CPPOB skala usaha menengah	24	11	52,38	tidak ada kendala	Monitoring proses sertifikasi dan resertifikasi sarana		-	Selesai		Melakukan Monitoring proses sertifikasi dan resertifikasi sarana pada triwulan selanjutnya

3	3165.BDB.001 Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Koordinasi dengan dinas kesehatan terkait program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan	1	0,95	95	tidak ada kendala	Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun sebelumnya akan dilaksanakan pada bulan Juli	Juli 2026	Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun sebelumnya akan dilaksanakan pada bulan Juli	Belum	Juli 2026	
4	3165.BDB.002 Desa Pangan Aman	Koordinasi dengan desa yang akan menjadi target intervensi program Desa Pangan Aman	1	0,9	90	Sarana dan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan kurang memadai	Pelaksanaan tahapan pengawalan desa intervensi tahun sebelumnya dilaksanakan di bulan Juli sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan	Juli 2026	Pelaksanaan tahapan pengawalan desa intervensi tahun sebelumnya dilaksanakan di bulan Juli sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan	Belum	Juli 2026	
5	3165.BDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Pengawalan Pasar Intervensi 11 Maret 2026	1	100	100	Rencana Aksi belum tersedia	Koordinasi secara daring kepada OIKN terkait Rencana Aksi	Juli 2026	Koordinasi secara daring kepada OIKN terkait Rencana Aksi	Belum	Juli 2026	
6	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Persiapan pelaksanaan Kampanye Cerdas Memilih Obat serta Makanan Aman melalui	150	70	63,64	tidak ada kendala	Pelaksanaan KIE dilaksanakan sesuai perencanaan	Desember 2026	Pelaksanaan KIE dilaksanakan sesuai perencanaan	Belum	Desember 2026	

		Kegiatan Gerakan Sejuta Vaksin HPV										
7	3165.BIA.001 Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	melakukan sampling produk tembakau	144	72	50	tidak ada kendala	akan dilakukan pengawasan label sesuai dengan renlak		Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan target tahunan	Belum	Desember 2026	
8	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Belum ada realisasi kegiatan bulan Maret	1	0,5	49,98	tidak ada kendala	-		-			
9	3165.BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	- Layanan informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan melalui Media Sosial bulan Maret 2026 - Layanan informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan melalui Media Online bulan Maret 2026	7	1	20	tidak ada kendala	Melaksanakan layanan informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan sesuai dengan perencanaan	Desember 2026	Melaksanakan layanan informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan sesuai dengan perencanaan	Belum	Desember 2026	

10	3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Belum ada realisasi pengadaan Sarpras	33	1	100	tidak ada kendala	tidak ada kendala		Pengadaan Akan dilaksanakan di TW II	Selesai		Realisasi pengadaan telah selesai dilaksanakan pada TW II
11	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	Pengadaan 1 Unit PC Dekstop melalui e-Purchasing	9	6	100	Sedang dalam proses pembayaran	ditargetkan terealisasi bulan Juni 2026 karena merupakan target belanja modal TW II		Pengadaan Akan dilaksanakan di TW II	Selesai		Realisasi pengadaan telah selesai dilaksanakan pada TW II
12	3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	perjalanan dinas mobling	1	0,5	49,83	tidak ada kendala	melaksanakan kegiatan sesuai renlak	Desember 2026	Melaksanakan kegiatan pengujian sesuai dengan POA yang telah diisusun	Belum	Desember 2026	
13	3165.QCD.U38 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Belum ada kegiatan Penindakan	1	0	0	Akan dijadwalkan Operasi Penindakan di TW II dan TW III	Perencanaan kegiatan	TW III	Penjadwalan Operasi Penindakan	Belum	Desember 2026	Penjadwalan kegiatan operasi penindakan
14	3165.QDC.002 Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	Belum ada realisasi kegiatan bulan Maret	45	0	0	laporan KTD/ESO dari sarana belum terintegrasi pada website baru	jumlah pelapor akan menjadi perhitungan di akhir tahun	TW IV	perhitungan dilakukan pada akhir tahun	Belum	Desember 2026	
15	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	- Belum ada realisasi UMKM yang memenuhi standar pada bulan maret	5	0	0	- Sarana masih dalam tahap persiapan untuk	- pendampingan lebih lanjut pada sarana yang telah ditargetkan	TW 4	Pendampingan secara berkala pelaku usaha yang menjadi target dan belum	belum	TW 3	

		dikarenakan bulan ini merupakan tahapan kegiatan penetapan target UMKM yang akan didampingi				memenuhi standar			memenuhi standar			
16	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pelaksanaan sampling sesuai renlak	78	30	47,62	tidak ada kendala	follow up progress dan melanjutkan kegiatan sesuai perencanaan		segera ditindaklanjuti di bulan selanjutnya	belum	TW 3	
17	3165.QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Pelaksanaan sampling sesuai renlak	155	74	63,79	tidak ada kendala	follow up progress dan melanjutkan kegiatan sesuai perencanaan		follow up ke balai penguji	belum	TW 3	
18	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	tidak ada jadwal pemeriksaan pada bulan Maret	16	5	55,56	tidak ada kendala	melakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak		Dilakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak tahunan	belum	TW 3	
19	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	tidak ada jadwal pemeriksaan pada bulan Maret	254	65	49,62	tidak ada kendala	pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai renlak		Dilakukan pemeriksaan sarana sesuai renlak tahunan	belum	TW 3	

20	6384.EBA.956 Layanan BMN	Tidak ada kegiatan layanan BMN di bulan Maret	1	1	100	tidak ada kendala	-		Akan dilakukan perencanaan layanan BMN	Selesai		Layanan BMN telah direalisasikan Sesuai target
21	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	Pembayaran Gaji dan THR PNS , PPPK & Outshorcing bulan Maret 2026 ; Belanja Keperluan Kantor dan Pemeliharaan bulan Maret 2026; Pembayaran Tagihan Listrik, Air, dan Langganan Jaringan Internet bulan Maret 2026	1	0,5	50	tidak ada kendala	-		-	belum	TW IV	